

# Profile: Directorate of Literacy and Equivalency Education Development



Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia  
Directorate General of Early Childhood and Community Education  
Directorate of Literacy and Equivalency Education Development  
2016



Profile: Directorate of Literacy and Equivalency Education Development



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan  
Tahun 2016



## Profil Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

**Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan**

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kompleks Kemendikbud, Gedung E Lantai 8,  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270,  
Telepon (021) 5725575, Faksimile (021) 5725039,  
email: [program.paudni@kemdikbud.go.id](mailto:program.paudni@kemdikbud.go.id)  
website: [www.paudni.kemdiknas.go.id/dikmas](http://www.paudni.kemdiknas.go.id/dikmas)





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan  
Tahun 2016



# Profil Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan



# KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan



**"Menjangkau yang Tidak Terjangkau dan Melayani yang Belum Terlayani"**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu dimana dan kapanpun. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

Terwujudnya masyarakat yang berdaya, berakarsa, cerdas, dan mandiri khususnya bagi warga masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat memperoleh pendidikan yang layak pada jalur formal, dapat dicapai melalui layanan pendidikan nonformal yang pada hakekatnya ditujukan bagi masyarakat dalam upaya "menjangkau yang tidak terjangkau" dan "melayani yang belum terlayani".



**Dr. Erman Syamsuddin**  
Direktur Pembinaan Pendidikan  
Keaksaraan dan Kesetaraan

Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan layanan pendidikan nonformal yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan orang dewasa ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya. Oleh karena itu layanan pendidikan nonformal diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal dalam kondisi kemarjinalannya (geografis, ekonomi, sosial dan budaya, serta faktor lainnya). Layanan pendidikan nonformal antara lain dilaksanakan dengan menu program: pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan usaha mandiri, pendidikan multikeaksaraan, pengembangan budaya baca masyarakat, pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, serta berbagai menu layanan pendidikan berkelanjutan (antara lain pendidikan pemberdayaan perempuan), serta didukung dengan penataan kelembagaan satuan pendidikan nonformal.



Program kegiatan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan antara lain ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan bagi orang dewasa, pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekolah dalam rangka mendukung wajib belajar 12 tahun dan pendidikan kesetaraan bagi orang dewasa, penyediaan layanan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dalam mendukung pengembangan minat baca dan budaya baca masyarakat, penyediaan layanan pendidikan berkelanjutan (antara lain pendidikan pemberdayaan perempuan), penyediaan sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, dan penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Rumah Pintar (Rumpin), dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang semakin berkembang.


Untuk memastikan kelayakan layanan pendidikan keaksaraan bagi seluruh lapisan masyarakat, salah satu tantangan yang dihadapi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan saat ini adalah upaya peningkatan keberaksaraan penduduk orang dewasa dengan misi kesetaraan yang tidak mendiskriminasi para pihak, sehingga terjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan untuk semua.

Buku "Profil Program Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan" ini disusun untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara komprehensif tentang keberadaan dan kiprah Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam memberikan layanan program pendidikan nonformal kepada masyarakat yang membutuhkannya. Tentunya buku ini diharapkan sebagai salah satu media sosialisasi bagi pihak-pihak terkait, pemangku kepentingan, lembaga/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah, dan lembaga/organisasi mitra, serta masyarakat luas, sehingga lebih memahami keberadaan dan seluk beluk program yang dibina dan dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan buku "Profil Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan" ini. Akhirnya semoga buku yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,

  
Dr. Erman Syamsuddin  
NIP. 195703041983031015

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Sekilas tentang Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan .....	1
B. Peran Strategis Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan .....	3
BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA .....	9
A. Visi, Misi, dan Kebijakan Mutu .....	9
B. Struktur Organisasi .....	10
C. Tugas dan Fungsi .....	12
D. Ketenagaan .....	18
BAB III KEBIJAKAN DAN PROGRAM .....	25
A. Arah Kebijakan .....	25
B. Strategi Pengembangan Program .....	34
C. Program dan Kegiatan .....	44
D. Program dan Anggaran Tahun 2016 .....	74
E. Mekanisme Bantuan Program Tahun 2016 .....	77
BAB IV PROGRAM TEROBOSAN .....	101
A. Gerakan Indonesia Membaca (GIM) .....	101
B. Gerakan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM) .....	106
C. Akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) .....	108
D. Revitalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) .....	112
BAB V PENUTUP .....	117

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Sekilas tentang Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, program pendidikan masyarakat memegang peranan penting dan strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesungguhnya para pendiri negara ini sangat tepat mencantumkan dan menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Sebelum kemerdekaan, diperkirakan hanya sekitar 3% penduduk Indonesia yang berkesempatan menduduki bangku sekolah, sehingga pada awal proklamasi kemerdekaan diperkirakan sekitar 92% penduduk Indonesia sebagai penyandang buta huruf. Untuk mengatasi persoalan besar di bidang pendidikan pada saat itu, pada tahun 1946 Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan melalui Bagian Pendidikan



"Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat".



Masyarakat menetapkan program pemberantasan buta huruf menjadi salah satu prioritas pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dengan nama program "Kursus ABC". Kemudian pada tahun 1949 Bagian Pendidikan Masyarakat berubah menjadi Jawatan Pendidikan Masyarakat, dan salah satu tugas pokoknya adalah pemberantasan buta huruf. Pada tahun 1951 disusunlah rencana "Sepuluh Tahun Pemberantasan Buta Huruf", dengan harapan akan menuntaskan dan membebaskan penduduk yang buta huruf dalam jangka waktu 10 tahun. Namun ternyata pada tahun 1960, masih terdapat sekitar 40% penduduk Indonesia khususnya orang dewasa yang masih buta huruf (Dit. Dikmas, PBH di Indonesia, 1972).

Kemudian pada tahun 1960, dikeluarkanlah "Komando Presiden" untuk menuntaskan buta huruf sampai tahun 1964, dan pada tanggal 31 Desember 1964 penduduk Indonesia yang berusia 13 s.d. 45 tahun (kecuali Irian Barat) dinyatakan telah bebas buta huruf. Pengertian bebas buta huruf di sini adalah mereka telah dapat menulis dan membaca kalimat-kalimat pendek seperti nama dan alamatnya. Pada tahun 1966-1970 mulai dikembangkan PBH fungsional dengan kampanye gerakan nasional pemberantasan buta huruf yang dilakukan secara besar-besaran untuk menghasilkan aksarawan baru sebanyak-banyaknya, dan secara selektif memilih sasaran kelompok buta huruf yang bekerja di berbagai bidang seperti pekerja pabrik, petani, buruh perkebunan, sehingga dapat memanfaatkan kemampuan keaksaraannya untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

Seiring dengan tuntutan perubahan dan kemajuan pembangunan nasional khususnya dalam birokrasi pemerintahan, dan untuk memperkuat pengelolaan manajemen di bidang pendidikan, pemerintah telah beberapa kali melakukan perubahan nomenklatur satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Namun hingga saat ini, karena pemerintah memandang pentingnya peranan pendidikan masyarakat, maka Direktorat Pendidikan Masyarakat sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional tetap dipertahankan untuk melanjutkan berbagai programnya yang pada hakekatnya bermuara pada upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat marjinal. Bahkan pada awal tahun 2000-an untuk mempertajam fokus programnya, secara bertahap Direktorat Pendidikan Masyarakat dimekarkan sehingga "melahirkan" direktorat baru setingkat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (Ditjen PLS), yaitu: Direktorat Pendidikan

Anak Usia Dini, Direktorat Kursus dan Kelembagaan, dan Direktorat Pendidikan Kesetaraan.

Pada tahun 2007 nomenklatur Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah berubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI) dan pada akhir tahun 2010 berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), meliputi; Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI (P2TK PAUDNI).

Kemudian pada tahun 2015, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terjadi perubahan nomenklatur di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) berubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), yang membawahi: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, serta Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas.

Untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara komprehensif kepada berbagai pemangku kepentingan, lembaga/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah, dan lembaga/organisasi mitra, serta masyarakat luas tentang keberadaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, maka disusunlah buku "Profil Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan" ini.

## **B. Peran Strategis Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan**

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembukaan-nya menekankan perlunya upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan dalam pasal 31 ditekankan bahwa tiap-tiap warganegara berhak untuk mendapat pengajaran, sehingga merupakan tanggung jawab yang patut diwujudkan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia. Komitmen nasional tersebut menjadi kekuatan pendorong bagi seluruh elemen pemerintah dan komponen masyarakat untuk melaksanakan amanat tersebut, sebagai bagian integral dari upaya pemberdayaan masyarakat dari kebodohan,

kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan dalam kerangka makro pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia secara tegas dinyatakan dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yaitu: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan pada pasal 28C ayat (1) dinyatakan: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia dan mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Sejatinya, keberadaan dan kehadiran Pendidikan Nonformal (PNF) secara alamiah senantiasa bertumbuhkembang sesuai dengan dinamika dan aktivitas masyarakat di manapun dan kapanpun. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (UU Sisdiknas), secara eksplisit pada pasal 26 dan 27 tentang pendidikan nonformal dan informal, antara lain disebutkan bahwa PNF memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan jalur pendidikan formal sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional. "Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat". Kemudian pada bagian lain disebutkan bahwa "Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik".

Dalam UU Sisdiknas tersebut juga ditegaskan bahwa "hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan".

Pada bagian lain juga disebutkan "satuan pendidikan nonformal terdiri atas: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar



masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis". Sementara itu, pendidikan informal ditempatkan sebagai pendidikan yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan di mana masyarakat hidup dan berada serta kegiatan belajar dapat dilakukan secara mandiri.



Pada hakekatnya PNF merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat, yang sebenarnya sudah ada jauh sebelum pendidikan formal lahir. Maka sangat wajar dan beralasan jika penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan PNFI, sebagian besar dilaksanakan oleh yayasan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, keagamaan, profesi, dan keluarga yang ada di lingkungan masyarakat. Namun demikian, tidak dapat dibenarkan jika pemerintah tinggal diam dan berpangku tangan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pendidikan nonformal. Pendekatan dan strategi pelaksanaan PNF sejalan dengan kodrat alam dan hukum sejarah, karena sesungguhnya keluarga beserta lingkungannya merupakan tempat yang pertama dan utama berlangsungnya proses pendidikan. Di dalam keluarga dan lingkungannya pribadi seseorang dapat terbentuk, tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Fase pendidikan dalam keluarga dan lingkungan ini sangat bergantung pada seberapa jauh intensitas dan kualitas intervensi pendidikan dalam keluarga dan lingkungan sesuai dengan prinsip PNF.



Menyadari pentingnya peranan PNF dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia seiring dengan semakin beratnya persaingan hidup sebagai dampak dari cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi saat ini, maka pemerintah sangat membutuhkan peranserta masyarakat dan seluruh komponen bangsa untuk mengembangkan layanan pendidikan yang lebih proaktif dalam menjawab perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Hal ini sejalan dengan amanat UU Sisdiknas (pasal 55) yang

menyatakan bahwa “masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat”. Namun pada pasal 62 ditegaskan bahwa “setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah”.



Sejalan dengan pemikiran di atas, sejak tahun 1998 Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional telah merintis dan membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pendirian dan pembentukan PKBM tersebut dimaksudkan sebagai wadah pembelajaran dan pelatihan berbagai program pendidikan nonformal dan pemberdayaan masyarakat lainnya untuk memenuhi kebutuhan belajar komunitas masyarakat tertentu sesuai potensi, kondisi dan karakteristik masyarakat setempat, serta berfungsi sebagai wadah koordinasi sentra pembelajaran masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan/keahlian, penyaluran bakat atau hobby yang semuanya diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat.

Dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir, seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan pendidikan khususnya pendidikan nonformal dan semakin tingginya komitmen, dukungan dan perhatian pemerintah terhadap pembinaan PKBM, maka pengembangan PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal, mengalami pertumbuhan yang pesat di seluruh Indonesia.



# BAB 2

## ORGANISASI DAN TATA KERJA



"Pengintegrasian Pendidikan karakter, pengembangan keterampilan dilakukan dengan peningkatan kemampuan berakhsara dan berusaha mandiri melalui keterampilan bermata pencaharian yang diintegrasikan dengan program pendidikan pemberdayaan perempuan"

### A. Visi, Misi, dan Kebijakan Mutu

#### 1. Visi

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Ditbindiktara) sebagai salah satu unit teknis atau satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan visi, yaitu: "Terbentuknya pelaku serta ekosistem pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong".

#### 2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menetapkan misi sebagai berikut:

Penguatan pelaku pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, peningkatan mutu dan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, serta pengembangan efektifitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik, melalui layanan:

- pendidikan keaksaraan;
- pengembangan budaya baca;
- pendidikan kesetaraan;
- pendidikan berkelanjutan (pendidikan pemberdayaan perempuan); dan
- peningkatan penataan kelembagaan dan kemitraan.

#### 3. Kebijakan Mutu

Sejak tahun 2007, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (sebelumnya Direktorat Pendidikan Masyarakat) telah



memperoleh ISO 9001:2008 dari UKAS Quality Management dengan Sertifikat Nomor: 28787/A/0001/UK/En Tanggal 14 Desember 2007, sebagai bentuk penghargaan atas kinerjanya yang semakin baik. Sehubungan dengan itu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menetapkan Kebijakan Mutu, yaitu:

Memberikan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang merata dan bermutu bagi peserta didik melalui kinerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang dibuktikan dengan:

- Dedikasi ; yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaan
- Inovasi ; yang cerdas dalam mengembangkan program
- Komitmen ; yang kuat untuk memberdayakan masyarakat
- Mutu ; layanan yang prima dalam pengabdian terbaik
- Agenda ; program dan kegiatan yang pasti dan bermakna
- Sinergitas ; yang harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi program.

## B Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dapat digambarkan sebagai berikut:



## Bagan 1 Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan



## C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 (Pasal 305 - 324) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, adalah sebagai berikut:

### 1. Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan:

- Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
  - c. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
  - d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
  - f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan kesetaraan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
  - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan; dan
  - i. pelaksanaan administrasi Direktorat.

### 2. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Program dan Evaluasi:

- Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan laporan Direktorat.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
  - b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
  - c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
  - d. penyusunan bahan dan fasilitasi pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat; dan
  - f. penyusunan laporan Direktorat.

### 3. Tugas Seksi Program:

Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat serta penyusunan bahan fasilitasi pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan.

### 4. Tugas Seksi Evaluasi:

Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan serta penyusunan laporan Direktorat.

### 5. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca:

- Subdirektorat Keaksaraan dan Budaya Baca mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan



pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan dan budaya baca.

- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan dan budaya baca;
  - b. penyusunan bahan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan dan budaya baca;
  - c. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan serta sarana dan prasarana budaya baca;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan keaksaraan dan budaya baca; dan
  - f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan keaksaraan dan budaya baca.

#### 6. Tugas Seksi Pendidikan Keaksaraan:

Seksi Pendidikan Keaksaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi penjaminan mutu kurikulum dan sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan.

#### 7. Tugas Seksi Budaya Baca:

Seksi Budaya Baca mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang sarana dan prasarana budaya baca.

#### 8. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan:

- Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu kurikulum, dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;
  - b. penyusunan bahan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;
  - c. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan; dan
  - f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan.

#### 9. Tugas Seksi Pendidikan Kesetaraan:

Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi penjaminan mutu kurikulum, sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan.

#### 10. Tugas Seksi Pendidikan Berkelanjutan:

Seksi Pendidikan Berkelanjutan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan berkelanjutan.

#### 11. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan:

- Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu tata kelola, dan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
  - b. penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
  - c. penyusunan bahan fasilitasi penjaminan mutu tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

#### 12. Tugas Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik:

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, evaluasi, dan laporan di bidang tata kelola dan peserta didik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

#### 13. Tugas Seksi Kemitraan:

Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

#### 14. Tugas Subbagian Tata Usaha:

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumaha-tanggaan Direktorat.





D. Ketenagaan

1. Pejabat di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Susunan pejabat di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan seperti digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1  
Susunan Pejabat di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan per Desember Tahun 2015

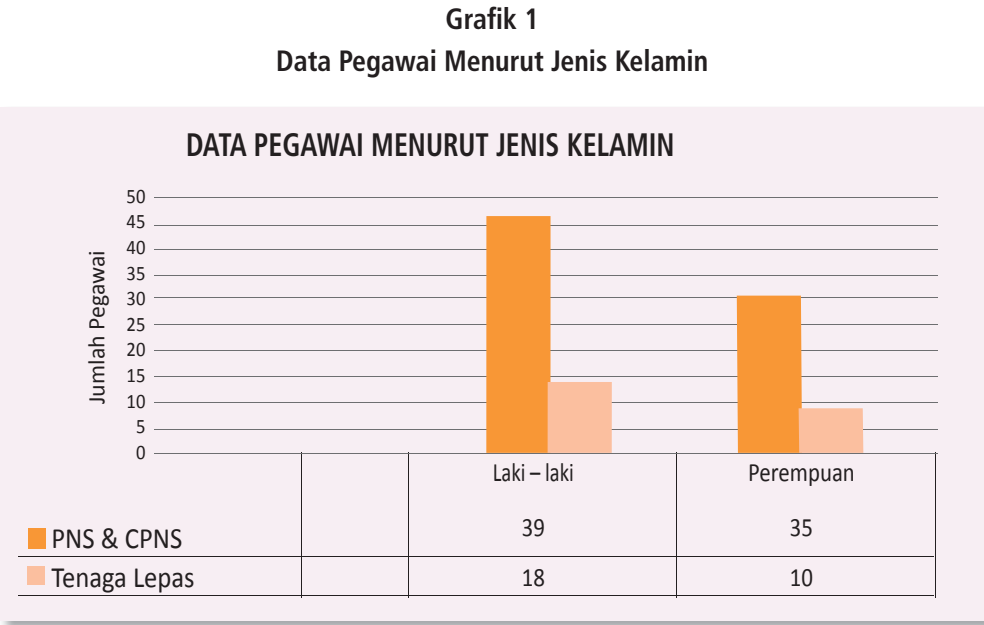
No	Nama	Jabatan	N I P	Gol
1	Dr. Erman Syamsuddin, SH., M.Pd.	Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	195703041983031015	IV/d
2	Drs. Pahala Simanjuntak, MM.	Kepala Subdit Program dan Evaluasi	195901181985031003	IV/b
3	Dr. Samto	Kepala Subdit Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca	196506201992031002	IV/b
4	Dr. Kastum	Kepala Subdit Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan	196407171993031001	IV/b
5	Drs. Cecep Suryana, MM.	Kepala Subdit Kelembagaan dan Kemitraan	196505301992031003	IV/a
6	Thuarita Cahyawati, S.Sos.	Kepala Subbag Tata Usaha	197008111998022001	III/d
7	Khairullah, M.Si.	Kasi Program	197506072006041001	III/d
8	Yohana Rumanda, M.Pd.	Kasi Evaluasi	197506282003122001	III/c
9	Johan Winarni, M.Pd.	Kasi Pendidikan Keaksaraan	197211101998022001	IV/a
10	Mohamad Alipi, S.Pd.	Kasi Budaya Baca	196701071992031003	III/c
11	Drs. Bambang Windoko, M.Pd.	Kasi Pendidikan Kesetaraan	196210281991031002	IV/a
12	Subi Sudarto, S.Sos., M.Si.	Kasi Pendidikan Berkelanjutan	197401282006041001	III/c
13	Lismanto, S.AP., M.Si.	Kasi Kelembagaan dan Peserta Didik	197004211990091002	III/c
14	Drs. Y. Toto Argo Nugroho	Kasi Kemitraan	195903041985031002	IV/a

2. Data kepegawaian di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Data kepegawaian yang ada di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan saat ini, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2  
Data Pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Menurut Jenis Kelamin per Desember Tahun 2015

No	Jenis Kelamin	PNS / CPNS	Tenaga Lepas	Jumlah
1	Laki-Laki	39	18	57
2	Perempuan	35	10	45
Jumlah		74	28	102



Sumber: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, 2015

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sebanyak 102 orang, yang terdiri dari: 74 orang (73%) berstatus Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/CPNS), dan sebanyak 28 orang (27%) berstatus sebagai tenaga lepas.



Dari jumlah tersebut, pegawai laki-laki sebanyak 57 orang (56%) yang terdiri dari: 39 orang berstatus sebagai PNS/CPNS, dan 18 orang berstatus sebagai tenaga lepas. Sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 45 orang (46%) yang terdiri dari: 35 orang berstatus sebagai PNS/CPNS, dan sebanyak 10 orang berstatus sebagai tenaga lepas.

Data pegawai Ditbin Diktara berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Data Pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Menurut Unit Kerja per Desember Tahun 2015**

No	Unit Kerja (Subdit/TU)	PNS/CPNS			Tenaga Lepas			Jumlah		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Program dan Evaluasi	6	6	12	4	2	6	10	8	18
2	Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca	6	5	11	4	2	6	10	7	17
3	Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan	8	5	13	3	2	5	11	7	18
4	Kelembagaan dan Kemitraan	7	6	13	3	2	5	10	8	18
5	Tata Usaha	12	13	25	4	2	6	16	15	31
Jumlah		39	35	74	18	10	28	57	45	102

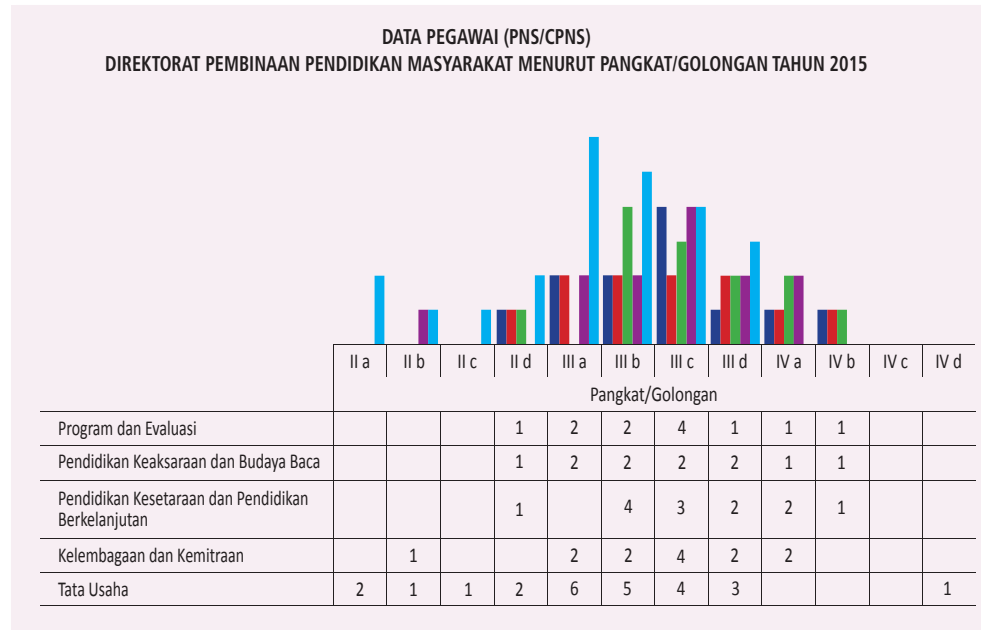


**Tabel 4**  
**Data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Menurut Pangkat/Golongan per Desember Tahun 2015**

No	Unit Kerja (Subdit/ TU)	Pangkat/Golongan												Jlh	
		Ib	Ila	Ilb	Ilc	Ild	IIla	IIlb	IIlc	IIId	IVa	IVb	IVc		IVd
1	Program dan Evaluasi					1	2	2	4	1	1	1			12
2	Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca					1	2	2	2	2	1	1			11
3	Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan					1		4	3	2	2	1			13
4	Kelembagaan dan Kemitraan			1			2	2	4	2	2				13
5	Tata Usaha		2	1	1	2	6	5	4	3				1	25
Jumlah			2	2	1	5	12	15	17	10	6	3		1	74



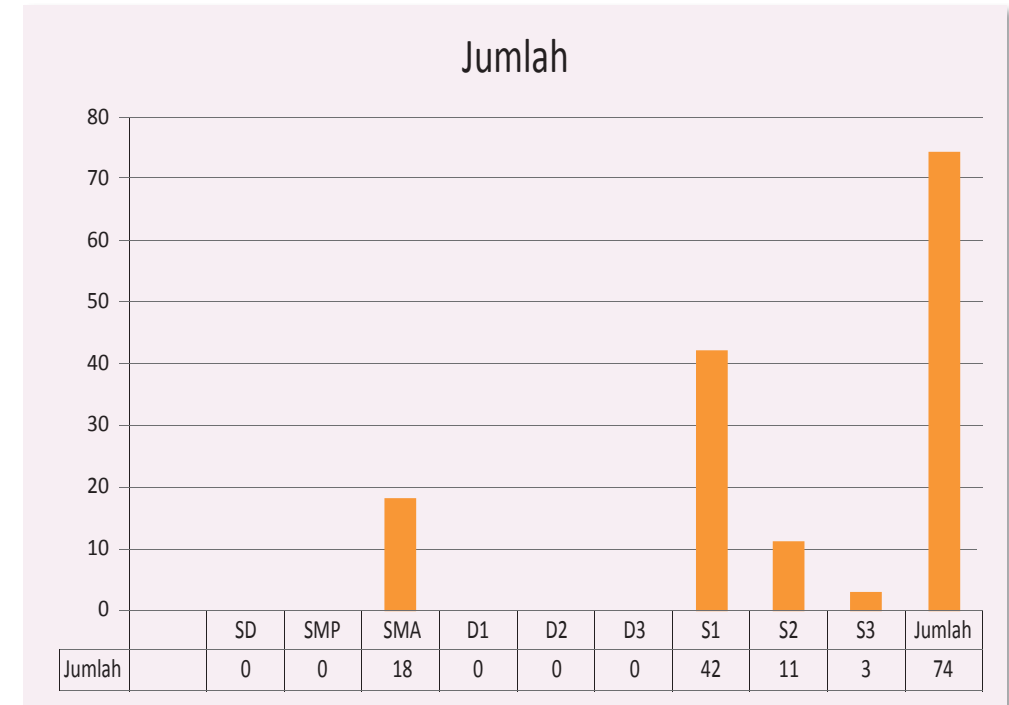
**Grafik 2**  
**Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat/Golongan**



**Tabel 5**  
**Data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Menurut Jenjang Pendidikan per Desember Tahun 2015**

No	Unit Kerja (Subdit/TU)	Jenjang Pendidikan									Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	Program dan Evaluasi			2				6	4		12
2	Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca			4				5	1	1	11
3	Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan			2				7	3	1	13
4	Kelembagaan dan Kemitraan			2				9	2		13
5	Tata Usaha			8				15	1	1	25
Jumlah				18				42	11	3	74

**Grafik 3**  
**Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenjang Pendidikan**



# BAB 3

## KEBIJAKAN DAN PROGRAM



**"Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat".**

### A. Arah Kebijakan

Pendidikan nonformal merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat, sehingga layanan pendidikan nonformal lebih diarahkan pada ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan orang dewasa yang berkelanjutan dan berkesetaraan, bermutu serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan Keaksaraan dikembangkan dalam rangka memberikan layanan pendidikan khususnya bagi penduduk tuna aksara. Sejalan dengan kesepakatan Abuja tentang keaksaraan untuk pembangunan, program keaksaraan mulai menekankan multikeaksaraan disamping keaksaraan fungsional dan kecakapan hidup. Mengingat sekitar 70 persen penduduk niraksara dewasa adalah perempuan dan sebagian besar dari mereka berusia di atas 45 tahun, maka pendidikan keaksaraan perlu diintegrasikan dengan program pendidikan pemberdayaan perempuan dan pengembangan budaya baca.

Untuk mencegah kekambuhan keniraksaraan penduduk dewasa, sekaligus untuk meningkatkan budaya baca dengan slogan "Gerakan Indonesia Membaca", maka program pendidikan keaksaraan disinergikan dengan perluasan akses terhadap bahan bacaan. Layanan ketersediaan bahan bacaan ini diwujudkan dengan perluasan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) pada tingkat kecamatan dan desa, serta diperluas di ruang publik seperti pasar, mall, rumah ibadah, rumah sakit, dan panti sosial.

Sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai tahun 2015 program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan



Paket C) dialihkan pengelolaan dan pembinaannya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yaitu pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Menyadari masih tingginya angka putus sekolah dan putus lanjut di tingkat SD sampai dengan SMA sederajat, maka program pendidikan kesetaraan perlu dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan pendidikan saat ini, khususnya dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah tentang wajib belajar pendidikan dasar (sembilan tahun) menuju wajib belajar pendidikan menengah (universal) atau pendidikan 12 tahun.

Pendidikan berkelanjutan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup perempuan sebagai bagian terbesar dari sasaran program pendidikan keaksaraan melalui pelatihan keterampilan praktis yang dilakukan dengan peningkatan kemampuan beraksara dan berusaha mandiri dengan keterampilan bermata pencaharian. Melalui sinergi dan integrasi program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dengan berbagai program pendidikan keterampilan, diharapkan akan terbangun investasi masyarakat pembelajar dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk belajar sepanjang hayat yang menghasilkan penduduk berkarakter, beraksara, berbudaya baca, responsive gender, dan berakhlak mulia.



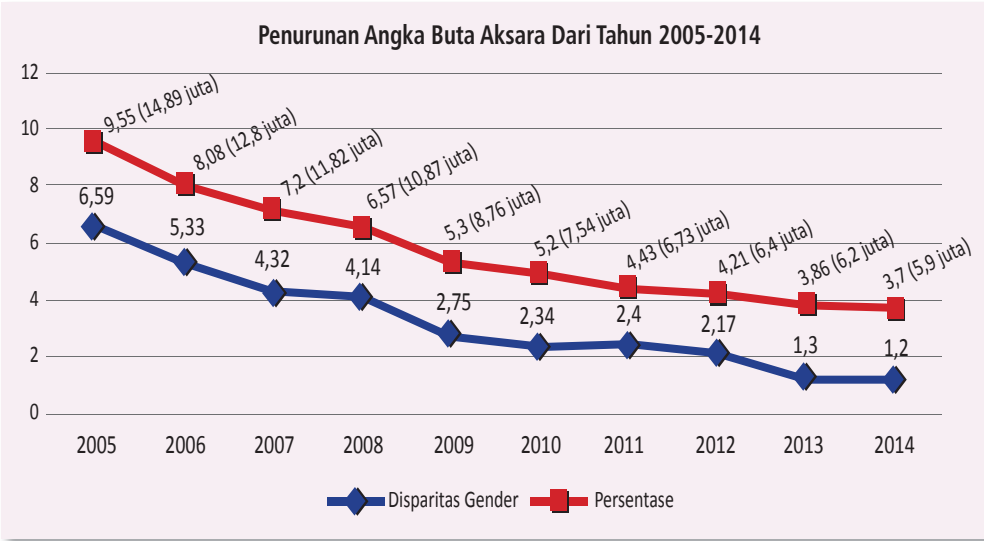
Oleh karena itu, arah kebijakan dan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dikembangkan secara terpadu melalui sinergi dan integrasi program yang saling mendukung seperti tergambar dalam bagan di bawah ini.

**Bagan 2**  
**Kebijakan dan Program Ditbindiktara**



Dalam sepuluh tahun terakhir ini, Indonesia perlu bersyukur karena berhasil meningkatkan keaksaraan masyarakat secara signifikan. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah membuktikan keberhasilannya dengan mencapai prestasi melebihi target Pendidikan untuk Semua (PUS) Dakar, dengan mengurangi separuh penduduk tuna aksara dari 15,4 juta (10,20%) pada tahun 2004 menjadi 7,54 juta (5,02%) pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang telah berhasil diberaksarakan mencapai 96,30 persen, sehingga yang masih tuna aksara tinggal sekitar 5,9 juta orang (3,7%). Disparitas antar provinsi menunjukkan kemajuan yang signifikan, di mana hanya tersisa dua provinsi dengan persentase tuna aksara orang dewasa di atas 10% dan tersisa enam provinsi dengan jumlah tuna aksara di atas 200.000 orang.

**Grafik 4**  
**Penurunan Jumlah dan Persentase Penduduk Tuna Aksara Usia 15-59 tahun dari tahun 2005 - 2014**



Angka Tuna Aksara usia 15-59 tahun secara nasional sebesar 3,70% (5.984.075 jiwa). Dilihat dari sebaran di masing-masing provinsi masih terdapat 2 provinsi memiliki angka buta huruf di atas 10%, yaitu Papua (28,61%) dan NTB (10,62%). Sementara itu terdapat 6 provinsi memiliki nilai 5,0% - 9,9%, yaitu: Sulawesi Barat (7,63%), Sulawesi Selatan (7,15%), NTT (6,94%), Jawa Timur (5,78%), Kalimantan Barat (5,50%), dan Bali (5,11%). Sedangkan, 26 provinsi lainnya sudah berada di bawah angka 5%. Hal ini terlihat pada gambar berikut.



Keaksaraan atau literasi biasa dimaknai sebagai penguasaan kemampuan membaca dan menulis bahan cetak disertai dengan kemampuan berkomunikasi dalam teks lisan dan tulis. Namun, seiring dengan makin pesatnya tuntutan dunia global dan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengertian literasi berkembang menuju konteks yang sangat majemuk. Keaksaraan sekarang bermakna penguasaan menggunakan berbagai bentuk semiotik dalam berbagai mode visual, aural dan digital. Penguasaan teks visual, aural dan digital sudah menjadi keharusan dalam pendidikan keaksaraan saat ini.

Melihat bagaimana keaksaraan dimaknai, bahwa keaksaraan merupakan alat yang kuat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan harkat dan martabat seseorang. Perlu dipahami bahwa keaksaraan merupakan bagian dari pendidikan dasar untuk semua. Bedanya, keaksaraan merupakan kesempatan kedua bagi mereka yang pada usia wajib belajar belum memperoleh kemampuan beraksara yang cakap. Dengan demikian, keaksaraan dianggap sebagai cara efektif untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan merangkul mereka dalam menghadapi tantangan hidup yang kompleks, meningkatkan kualitas kehidupan serta membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu keberhasilan dalam upaya pengentasan tuna aksara di Indonesia adalah keterlibatan masyarakat termasuk organisasi perempuan dalam

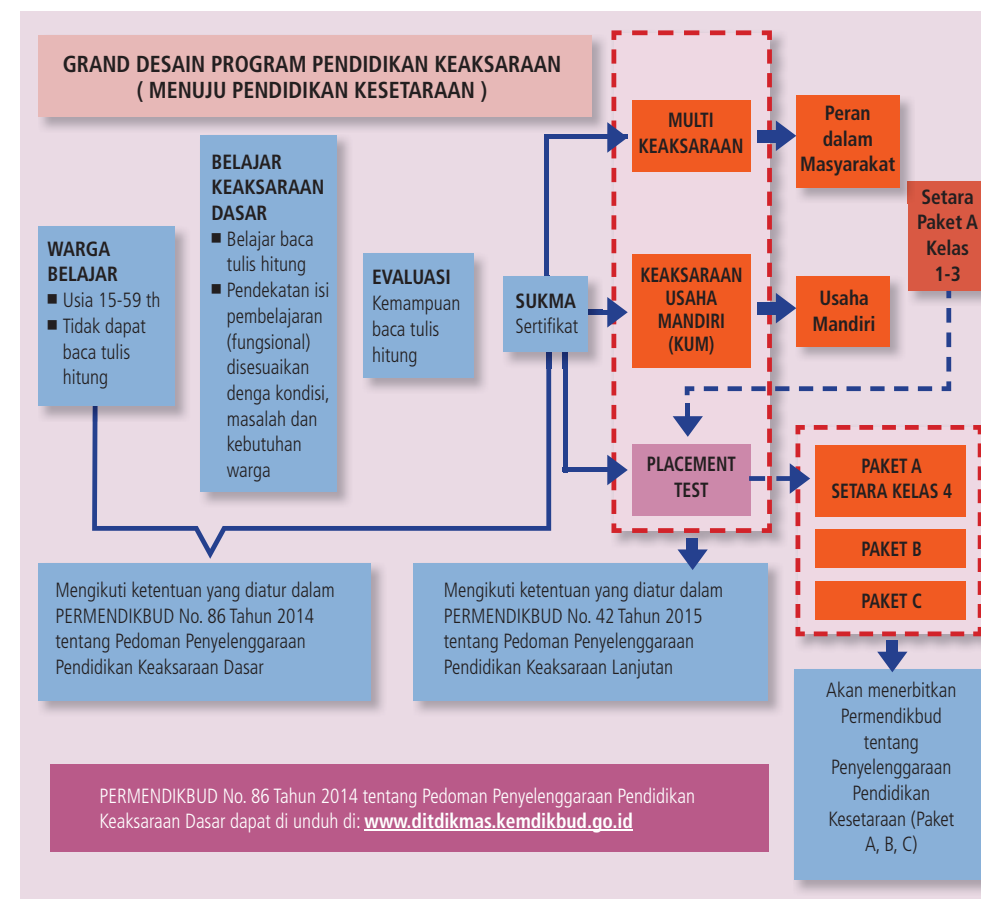


meningkatkan dan memelihara keaksaraan di Indonesia. Terdapat beberapa pembelajaran yang dapat dipetik dari berbagai pengalaman keberhasilan peningkatan keaksaraan yang menunjukkan keterlibatan organisasi perempuan dalam meningkatkan keaksaraan perempuan, kepemimpinan kepala daerah dalam mempercepat pengentasan tuna aksara, penggunaan bahasa ibu dalam proses pembelajaran keaksaraan, pengintegrasian kewirausahaan pada program pendidikan keaksaraan dan penyediaan lingkungan beraksara melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebagai layanan pasca keaksaraan. Hal lain yang cukup membahagiakan sehingga menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia adalah UNESCO telah memberikan anugerah King Sejong Literacy Prize 2012 atas komitmen tinggi dan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan keaksaraan. Program “Meningkatkan Kualitas Keaksaraan melalui Aksara Kewirausahaan, Budaya Baca dan Pelatihan Tutor” yang dikembangkan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat telah memukau UNESCO, karena jangkauannya yang luas mendekati tiga juta orang dan pendekatan pendidikan keaksaraan yang diintegrasikan dengan pengenalan kewirausahaan dan pembinaan taman bacaan masyarakat di ruang publik, seperti pasar dan tempat ibadah, serta pengembangan tutor profesional. Semoga penghargaan ini semakin mengingatkan peran dan makna nyata pentingnya keaksaraan bagi masyarakat Indonesia.



Program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, terbuka dan bermutu bagi masyarakat yang memilih pendidikan nonformal sebagai pendidikan alternatif dan/atau mereka yang belum mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan seperti yang dijelaskan pada bagian awal buku ini, dan dipengembangannya digambarkan dalam bagan berikut ini.

**Bagan 3**  
**Grand Desain Pengembangan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan**



Dalam upaya perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan masyarakat yang bermutu dan relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, menetapkan kebijakan pembangunan dan merencanakan program yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemecahan berbagai permasalahan bangsa khususnya di bidang pendidikan nonformal dan informal dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia Indonesia.

Dalam rangka pengembangan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, dan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, maka Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Direktorat Pembinaan Pendidikan**  
**Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2015 – 2019**

IKK	Sasaran Program/Kegiatan	Sat	2015	2016	2017	2018	2019
SK. 4.2018.1	Meningkatnya remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kab/kota						
IKK – 1	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	Org	150,525	150,525	150,525	150,525	150,525
IKK – 2	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pra paket A	Org	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200
IKK – 3	Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	Org	3,140	2,635	2,345	2,245	2,025
IKK – 4	Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa paket B yang menerima bantuan operasional	Org	652,213	169,660	156,558	143,456	130,354
IKK – 5	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (paket C) dan vokasional	Org	25,200	407,070	427,449	433,308	429,611
IKK – 6	Jumlah komunitas sekolah rumah (homeschooling) yang memperoleh bantuan operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR)	Lbg	-	35	45	50	50
IKK – 7	Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi	Desa	-	68	68	68	68

IKK – 8	Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi	Desa	-	68	68	68	68
IKK – 9	Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan	Org	10,000	13,000	15,500	18,000	20,500
IKK – 10	Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota	Lbg	260	307	307	307	102
IKK – 11	Jumlah PKBM Memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM	Lbg	445	545	600	625	675
IKK – 12	Jumlah TBM memperoleh bantuan Sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat	Lbg	-	214	235	257	280
IKK – 13	Jumlah lembaga TBM baru yang dibentuk di satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar	Lbg	-	97	125	125	42
IKK – 14	Satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan Dikmas	Lbg	-	20	10	25	25
IKK – 15	Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran Dikmas	Lbg	-	68	80	100	120
IKK – 16	Jumlah dokumen NSPK pendidikan masyarakat	Nskh	20	15	10	10	10
IKK – 17	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	1	1	1	1	1
IKK – 18	Kendaraan operasional perkantoran	Unit	2	-	-	2	-
IKK – 19	Jumlah dokumen perencanaan dan Evaluasi pelaksanaan rencana	Dok	2	2	2	2	2
IKK – 20	Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	Dok	4	4	4	4	4
IKK – 21	Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, lomba dan apresiasi	Dok	1	1	1	1	1



## B. Strategi Pengembangan Program

Berdasarkan arah dan kebijakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan seperti yang telah digambarkan di atas, maka strategi yang ditempuh untuk mengembangkan program, dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 7**

**Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2015-2019**

No	Arah Kebijakan	Strategi Pengembangan Program
1	Pengembangan program pendidikan keaksaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan standar kompetensi pendidikan keaksaraan dasar</li> <li>▪ Penyediaan standar kompetensi pendidikan keaksaraan usaha mandiri</li> <li>▪ Penyediaan standar kompetensi pendidikan multi keaksaraan</li> <li>▪ Penyediaan bahan belajar pendidikan keaksaraan dasar, KUM, dan multi keaksaraan</li> <li>▪ Pelatihan tutor (TOT) pendidikan keaksaraan dasar, KUM, dan multi keaksaraan</li> <li>▪ Pelatihan tim penilai keaksaraan dasar, KUM, dan multi keaksaraan</li> <li>▪ Afirmasi keaksaraan dasar ke daerah terpadat angka tuna aksara, Papua, daerah 3 T, dan komunitas adat terpencil</li> <li>▪ KUM diprioritaskan di daerah pasca keaksaraan dasar sebagai tindak lanjut program</li> <li>▪ Pembentukan kelompok belajar di desa-desa sebagai penyelenggara program</li> <li>▪ Penyediaan subsidi penyelenggaraan program</li> </ul>
2	Pengembangan program minat dan budaya baca masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perluasan akses bahan bacaan di daerah lokasi kegiatan pasca keaksaraan dasar untuk keberlanjutan tingkat literasi</li> <li>▪ Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di ruang publik</li> <li>▪ Pengembangan dan perluasan Gerakan Indonesia Membaca (GIM)</li> <li>▪ Penyediaan subsidi penyelenggaraan program</li> </ul>

3	Pengembangan program pendidikan kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan standar kompetensi pendidikan kesetaraan Paket A</li> <li>▪ Penyediaan standar kompetensi pendidikan kesetaraan Paket B</li> <li>▪ Penyediaan standar kompetensi pendidikan kesetaraan Paket C</li> <li>▪ Pengembangan pendidikan kesetaraan Paket C Vokasional</li> <li>▪ Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C</li> <li>▪ Pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C</li> <li>▪ Penyediaan subsidi penyelenggaraan program</li> </ul>
4	Pengembangan program pendidikan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan pendidikan kecakapan hidup perempuan</li> <li>▪ Pengembangan pendidikan pemberdayaan perempuan dengan fokus keberpihakan pada perempuan marginal dan etnik minoritas</li> <li>▪ Pengembangan Gerakan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM)</li> <li>▪ Penyediaan subsidi penyelenggaraan program</li> </ul>
5	Pengembangan kerjasama dan kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan kerjasama dengan berbagai lembaga/organisasi mitra penyelenggara program</li> <li>▪ Pengembangan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan</li> </ul>
6	Penguatan sistem pendataan dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan aplikasi dapodik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan</li> <li>▪ Pengembangan sistem layanan informasi berbasis website</li> <li>▪ Pengumpulan data berbasis by name by adress (melalui aplikasi data online)</li> </ul>
7	Penataan kelembagaan satuan pendidikan nonformal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penataan kelembagaan PKBM dan satuan PNF sejenis</li> <li>▪ Revitalisasi SKB sebagai satuan PNF</li> <li>▪ Pengembangan Satuan PNF unggulan/rujukan</li> </ul>

## 1. Strategi Pengembangan Program Pendidikan Keaksaraan

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan berupaya menyiapkan materi pembelajaran yang lebih fungsional dan kontekstual sehingga dapat dirasakan manfaat dan kegunaannya dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, penyelenggaraan program harus bersifat luwes dan fleksibel dalam penyediaan tempat, waktu, materi dan proses pembelajaran sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat dan sesuai tingkat usia, tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup warga belajar.

Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan program pembelajaran, setiap lembaga/ organisasi penyelenggara program pendidikan keaksaraan harus merumuskan strategi dan pendekatan pembelajaran yang efektif dan efisien, mengingat alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah relatif kecil.

Misalnya, dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar, harus mempertimbangkan pendekatan pembelajaran sebagai berikut:

- Peserta didik (warga belajar) dikelompokkan berdasarkan kedekatan tempat tinggal, setiap kelompok maksimal 10 orang;
- Setiap kelompok dibimbing oleh minimal satu orang tenaga pendidik (tutor) yang telah dibekali melalui pelatihan dan atau bahan-bahan/acuan pembelajaran program;
- Metoda atau pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan konteks lokal (tematik fungsional), namun tetap mengacu pada pedoman yang ditentukan;



- Jadwal pembelajaran disepakati oleh tutor dan warga belajar sesuai kebutuhan dan kondisi setempat;
- Lama pembelajaran tergantung kemampuan warga belajar, namun dirancang selama 6 (enam) bulan dengan jumlah jam pembelajaran selama 114 (seratus empat belas) jam;
- Penilaian hasil belajar dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian hasil belajar sesuai standar kompetensi keaksaraan (SKK);
- Memberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) bagi warga belajar yang dinyatakan lulus sesuai tahapan pembelajaran yang diikuti.

Untuk menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau dan melayani masyarakat yang belum terlayani pendidikan khususnya untuk menjangkau masyarakat tuna aksara yang sangat sulit dilakukan (*hardrock*) karena sebagian besar diantara mereka berusia diatas 4 tahun, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan membuat kebijakan pengelolaan program, khususnya program pendidikan keaksaraan, yaitu:

- Penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pembelajaran.
- Mengkonsentrasikan penyelenggaraan program di daerah-daerah terpadat penduduk tuna aksara, khususnya di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), yaitu di kawasan: transmigrasi, pesisir,



hutan, pulau-pulau kecil, perbatasan, pesantren tradisional, komunitas adat terpencil (KAT), dan sebagainya.

- c. Melibatkan tokoh atau pemuka agama/adat/masyarakat, serta lembaga/organisasi masyarakat setempat dalam penyelenggaraan program.
- d. Mendayagunakan potensi sumber daya setempat dalam mendukung pelaksanaan program pembelajaran dan pelatihan.
- d. Mensinergikan pelaksanaan program dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi terkait.

Oleh karena itu, prioritas sasaran program akan diarahkan pada daerah atau kawasan terpencil dan tertinggal seperti disebutkan di atas. Hingga saat ini, masih terdapat penduduk Indonesia yang tergolong masyarakat terpencil dan sangat sulit memperoleh akses pendidikan, misalnya: Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi, Suku Bajo di Provinsi Sulawesi Tenggara, Suku Kajang di Provinsi Sulawesi Selatan, Suku Badui di Provinsi Banten, Suku Dayak di wilayah Kalimantan, dan masih banyak suku yang bermukim di pedalaman Papua. Kebanyakan dari komunitas adat terpencil tersebut tergolong buta aksara, karena sesuai tradisi dan budaya setempat terkesan sulit menerima perubahan, kurang bersosialisasi dengan masyarakat luar, kurang terbuka terhadap orang lain, menggantungkan hidupnya terhadap lingkungan, dan sulit mengubah perilakunya.



Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, dalam pemetaan sasaran program selalu memperhatikan prioritas pendanaan dengan mendasarkan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Prioritas pendanaan pendidikan dimaksudkan untuk

melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: (i) menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan keluarga yang kurang beruntung karena faktor ekonomi, geografi, dan sosial-budaya, serta tidak memperoleh layanan pendidikan yang memadai; (ii) memenuhi hak konstitusional warga negara melalui satuan dan jenis pendidikan pada jalur nonformal, serta untuk menjawab komitmen internasional dan tujuan pendidikan nasional; dan (iii) melihat perkembangan kemampuan keuangan negara dan potensi kontribusi masyarakat terhadap pendidikan.

## 2. Strategi Pengembangan Program Pendidikan Kesetaraan

Khusus untuk program pendidikan kesetaraan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, akan mengembangkan program dengan pendekatan antara lain sebagai berikut:

- a. Pendataan warga belajar *“by name by adress”* untuk pemberian Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- b. Menyusun kurikulum berbasis vokasi (hanya memuat kompetensi akademik yang esensial saja);
- c. Pengembangan bahan belajar yang adaptif dengan sistem kredit per modul/buku paket mata pelajaran (tidak perlu lagi raport);
- d. Pengembangan model pembelajaran dengan pendekatan orang dewasa;
- e. Menyusun acuan pengelolaan program dan acuan pembelajaran;
- f. Memperkuat kompetensi pendidik dan pengelola program;
- g. Pemetaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan satuan pendidikan sebagai penyelenggara program sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- h. Seleksi ketat kelayakan satuan pendidikan sebagai penyelenggaran program;
- i. Penerapan sanksi berat bagi satuan pendidikan yang melakukan kecurangan;
- j. Penerapan *“placement test”* atau RPL (pengakuan pembelajaran lampau) untuk menentukan pemeringkatan kelas;
- k. Menyiapkan satuan pendidikan yang terakreditasi (berkinerja A dan B) sebagai *“testing centre”*.

### 3. Strategi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Terkait dengan penataan dan peningkatan mutu manajemen kelembagaan dilakukan pendekatan dan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan peran satuan pendidikan nonformal dan lembaga/ organisasi mitra terkait untuk peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan
- b. Peningkatan pengelolaan pendataan satuan pendidikan berbasis dapodik, pengembangan satuan pendidikan rujukan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
- c. Pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi satuan pendidikan, penguatan manajemen kelembagaan dan manajemen pembelajaran serta pemberdayaan PKBM untuk peningkatan efesiensi manajemen pengelolaan PKBM dan satuan PNF lainnya.

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan berupaya menyiapkan materi pembelajaran yang lebih fungsional dan kontekstual sehingga dapat dirasakan manfaat dan kegunaannya dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, penyelenggaraan program harus bersifat luwes dan fleksibel dalam penyediaan tempat, waktu, materi dan proses pembelajaran sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat dan sesuai tingkat usia, tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup warga belajar.

Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan program pembelajaran, setiap lembaga/ organisasi penyelenggara program pendidikan keaksaraan dan

kesetaraan harus merumuskan strategi dan pendekatan pembelajaran yang efektif dan efisien, mengingat alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah relatif kecil. Misalnya, dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar, harus mempertimbangkan pendekatan pembelajaran sebagai berikut:

- 1) Peserta didik (warga belajar) dikelompokkan berdasarkan kedekatan tempat tinggal, setiap kelompok maksimal 10 orang;
- 2) Setiap kelompok dibimbing oleh minimal satu orang tenaga pendidik (tutor) yang telah dibekali melalui pelatihan dan atau bahan-bahan/ acuan pembelajaran program;
- 3) Metoda atau pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan konteks lokal (tematik fungsional), namun tetap mengacu pada pedoman yang ditentukan;
- 4) Jadwal pembelajaran disepakati oleh tutor dan warga belajar sesuai kebutuhan dan kondisi setempat;
- 5) Lama pembelajaran tergantung kemampuan warga belajar, namun dirancang selama 6 (enam) bulan dengan jumlah jam pembelajaran selama 114 (seratus empat belas) jam;
- 6) Penilaian hasil belajar dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian hasil belajar sesuai standar kompetensi keaksaraan (SKK);
- 7) Memberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) bagi warga belajar yang dinyatakan lulus sesuai tahapan pembelajaran yang diikuti.





Untuk menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau dan melayani masyarakat yang belum terlayani pendidikannya khususnya untuk menjangkau masyarakat buta aksara yang sangat sulit dilakukan (hardrock) karena sebagian besar diantara mereka berusia di atas 44 tahun, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan membuat kebijakan pengelolaan program, khususnya program pendidikan keaksaraan, yaitu:

- a. Penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pembelajaran.
- b. Mengkonsentrasikan penyelenggaraan program di daerah-daerah terpadat penduduk tuna aksara, khususnya di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), yaitu di kawasan: transmigrasi, pesisir, hutan, pulau-pulau kecil, perbatasan, pesantren tradisional, komunitas adat terpencil (KAT), dan sebagainya.
- c. Melibatkan tokoh atau pemuka agama/adat/masyarakat, serta lembaga/ organisasi masyarakat setempat dalam penyelenggaraan program.
- d. Mendayagunakan potensi sumber daya setempat dalam mendukung pelaksanaan program pembelajaran dan pelatihan.
- e. Mensinergikan pelaksanaan program dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga/ instansi terkait.

Oleh karena itu, prioritas sasaran program akan diarahkan pada daerah atau kawasan terpencil dan tertinggal seperti disebutkan di atas. Hingga saat ini, masih terdapat penduduk Indonesia yang tergolong masyarakat terpencil dan sangat sulit memperoleh akses pendidikan, misalnya: Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi, Suku Bajo di Provinsi Sulawesi Tenggara, Suku Kajang di Provinsi Sulawesi Selatan, Suku Badui di Provinsi Banten, Suku Dayak di wilayah Kalimantan, dan masih banyak suku yang bermukim di pedalaman Papua. Kebanyakan dari komunitas adat terpencil tersebut tergolong buta aksara, karena sesuai tradisi dan budaya setempat terkesan sulit menerima perubahan, kurang bersosialisasi dengan masyarakat luar, kurang terbuka terhadap orang lain, menggantungkan hidupnya terhadap lingkungan, dan sulit mengubah perilakunya.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, dalam pemetaan sasaran program selalu memperhatikan prioritas pendanaan dengan mendasarkan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Prioritas

pendanaan pendidikan dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: (i) menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan keluarga yang kurang beruntung karena faktor ekonomi, geografi, dan sosial-budaya, serta tidak memperoleh layanan pendidikan yang memadai; (ii) memenuhi hak konstitusional warga negara melalui satuan dan jenis pendidikan pada jalur nonformal, serta untuk menjawab komitmen internasional dan tujuan pendidikan nasional; dan (iii) melihat perkembangan kemampuan keuangan negara dan potensi kontribusi masyarakat terhadap pendidikan.

Khusus untuk program pendidikan kesetaraan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, akan mengembangkan program dengan pendekatan antara lain sebagai berikut:

1. Pendataan warga belajar "*by name by adress*" untuk pemberian Nomor Induk Siswa (NIS);
2. Menyusun kurikulum berbasis vokasi (hanya memuat kompetensi akademik yang esensial saja);
3. Pengembangan bahan belajar yang adaptif dengan sistem kredit per modul/buku paket mata pelajaran (tidak perlu lagi raport);
4. Pengembangan model pembelajaran dengan pendekatan orang dewasa;
5. Menyusun acuan pengelolaan program dan acuan pembelajaran;
6. Memperkuat kompetensi pendidik dan pengelola program;
7. Pemetaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan satuan pendidikan sebagai penyelenggara program sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Seleksi ketat kelayakan satuan pendidikan sebagai penyelenggara program;
9. Penerapan sanksi berat bagi satuan pendidikan yang melakukan kecurangan;
10. Penerapan "*placement test*" atau RPL (pengakuan pembelajaran lampau) untuk menentukan pemeringkatan kelas;
11. Menyiapkan satuan pendidikan yang terakreditasi (berkinerja A dan B) sebagai "*testing centre*" (sebagai pengganti UN ?)

### C. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka program dan kegiatan akan dikembangkan dan dikemas ke dalam beberapa menu program, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Pendidikan Keaksaraan

Program pendidikan keaksaraan dan pendidikan keaksaraan lanjutan dikembangkan dalam upaya memberikan berbagai menu layanan pendidikan keaksaraan sesuai karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat.

Layanan pendidikan keaksaraan dikemas dalam berbagai menu kegiatan, dan berikut ini adalah deskripsi dari masing-masing kegiatan.

##### a. Pendidikan Keaksaraan Dasar

Keaksaraan Dasar merupakan layanan pendidikan yang ditujukan bagi warga masyarakat yang tuna aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.



Keaksaraan atau literasi biasa dimaknai sebagai penguasaan kemampuan membaca dan menulis bahan cetak disertai dengan kemampuan berkomunikasi dalam teks lisan dan tulis. Namun, seiring dengan makin pesatnya tuntutan dunia global dan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengertian

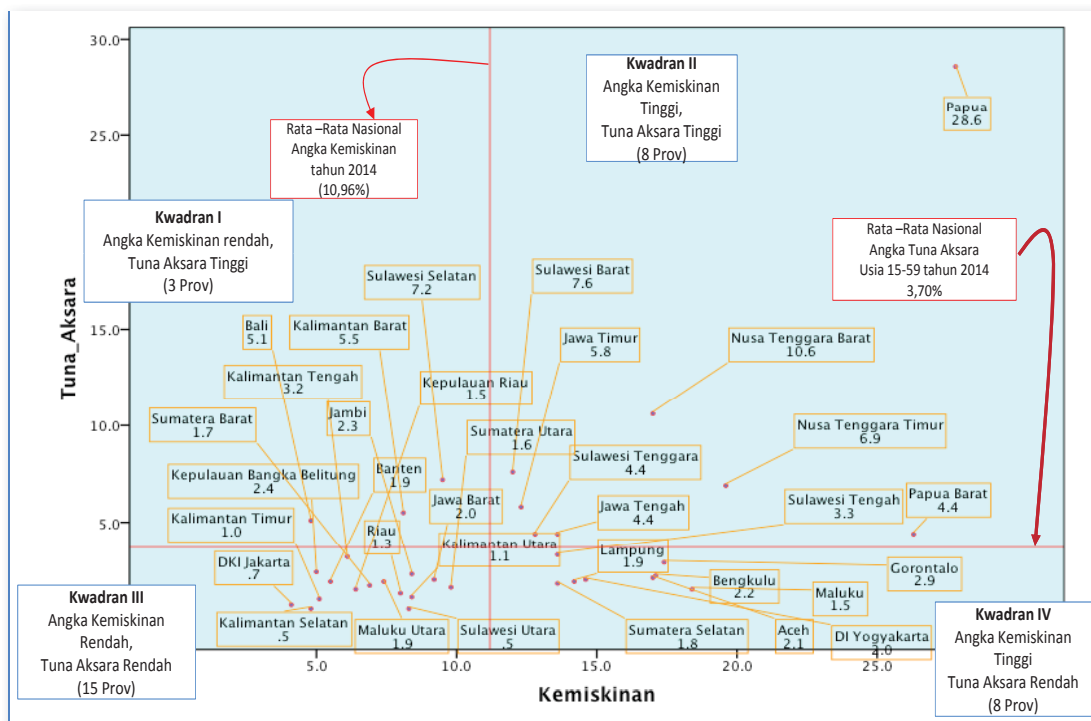
literasi berkembang menuju konteks yang sangat majemuk. Keaksaraan sekarang bermakna penguasaan menggunakan berbagai bentuk semiotik dalam berbagai mode visual, aural dan digital. Penguasaan teks visual, aural dan digital sudah menjadi keharusan dalam pendidikan keaksaraan saat ini.

Melihat bagaimana keaksaraan dimaknai, bahwa keaksaraan merupakan alat yang kuat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan harkat dan martabat seseorang. Perlu dipahami bahwa keaksaraan merupakan bagian dari pendidikan dasar untuk semua. Bedanya, keaksaraan merupakan kesempatan kedua bagi mereka yang pada usia wajib belajar belum memperoleh kemampuan beraksara yang cakap. Dengan demikian, keaksaraan dianggap sebagai cara efektif untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan merangkul mereka dalam menghadapi tantangan hidup yang kompleks, meningkatkan kualitas kehidupan serta membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Walau keaksaraan bukan tujuan eksplisit pencapaian pembangunan millennium (MDG's), tetapi keaksaraan menunjukkan dasar dari pencapaian pendidikan dasar universal. Keaksaraan terutama bagi perempuan dapat meningkatkan mata pencaharian, perbaikan kesehatan ibu dan anak, mengurangi risiko tertular HIV dan AIDS, dan mempermudah akses perempuan generasi berikutnya terhadap pendidikan sehingga dapat mengurangi kemiskinan, menunda usia perkawinan, mengurangi tingkat kesuburan, dan meningkatkan harkat dan martabat perempuan.

Ada beberapa tantangan besar dalam pengentasan dan penuntasan tuna aksara sekarang ini, yaitu: 1) Karakteristik penduduk tuna aksara yang tersisa sekitar 3,7% adalah mereka dari kelompok paling miskin, terpencil dan terpencar, serta sebagian dari mereka berada pada komunitas dengan budaya tertentu; 2) Masih besarnya jumlah aksarawan baru yang mengalami relapsing (menjadi tuna aksara kembali), karena kurangnya motivasi untuk memelihara melek aksara yang telah diperoleh; 3) Masih besarnya potensi bertambahnya penduduk tuna aksara, yakni dari jumlah siswa SD kelas awal (1-3) yang drop-out, yang berpotensi menjadi tuna aksara.



**Grafik 5**  
**Pola Hubungan Persentase Angka Kemiskinan dengan**  
**Persentase Angka Tuna Aksara di Indonesia**

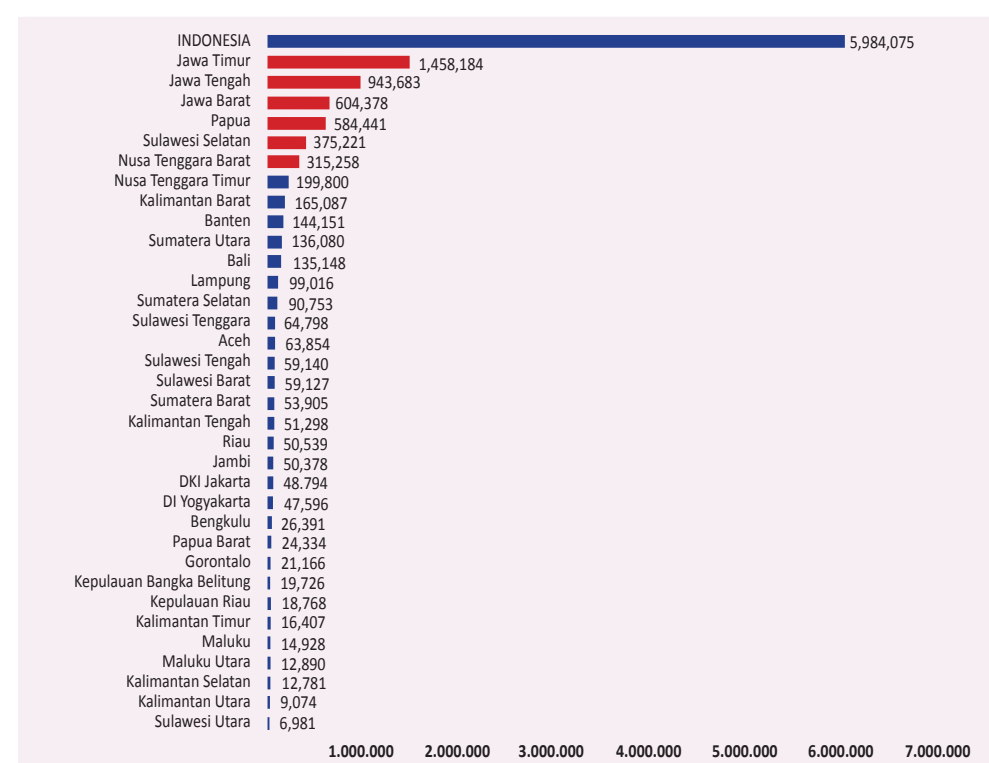


Namun demikian, tantangan tersulit terletak pada kesadaran dan komitmen tentang pentingnya keaksaraan. Mungkin sulit untuk mengubah mindset tersebut, mewujudkan lingkungan pembelajar sepanjang hayat dan lingkungan kondusif bagi pendidikan anak-anak, memerlukan masyarakat yang beraksara. Keaksaraan bukan hanya sekedar pemenuhan hak, tetapi kewajiban untuk membukakan pintu menuju pembangunan nasional berbasis pengetahuan.

Banyak kemajuan telah diraih untuk mencapai target 2015 dalam bidang keaksaraan, namun tantangan berat di masa yang akan datang tetap ada. Tantangan-tantangan ini harus diatasi dengan tekad internasional yang lebih kuat, apabila kita ingin membuktikan janji-janji yang dibuat di Dakar pada tahun 2000 lalu.

Jika dilihat secara absolut, jumlah tuna aksara terbesar per provinsi di Indonesia masih berada di Provinsi Jawa Timur, seperti tergambar dalam grafik di bawah ini.

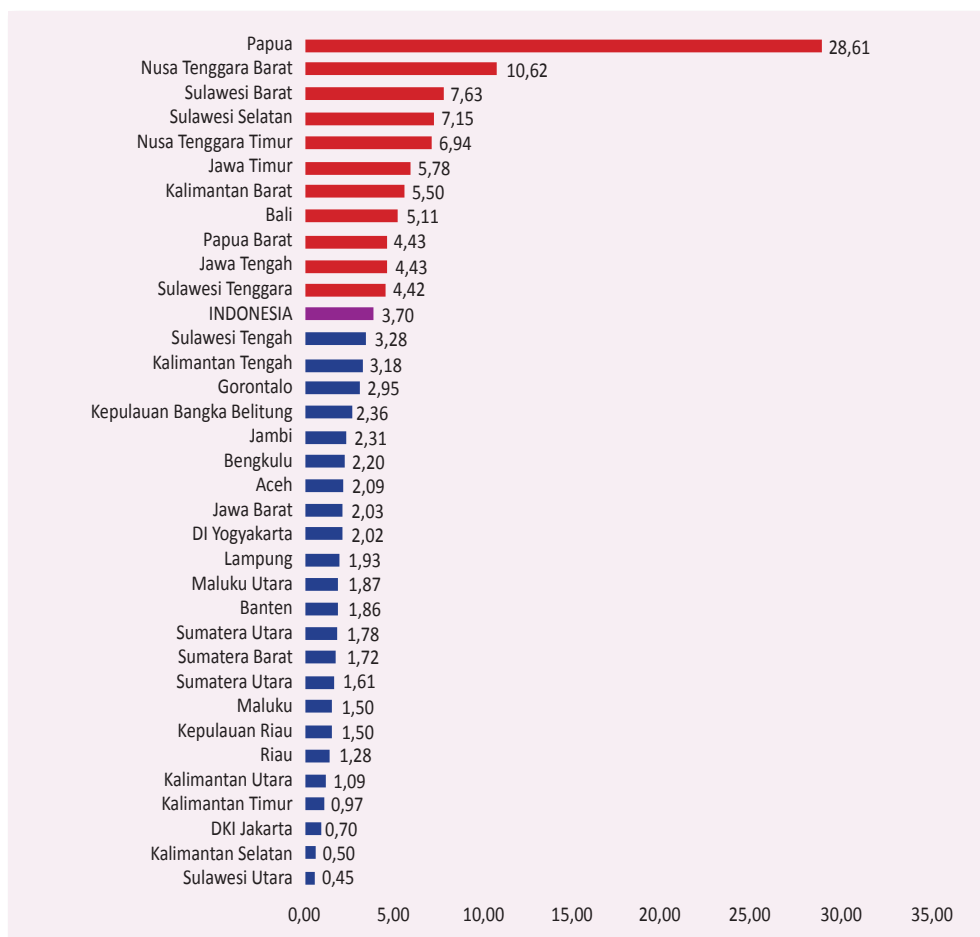
**Grafik 6**  
**Jumlah Penduduk Tuna Aksara Usia 15-59 tahun**  
**per Provinsi, Tahun 2014**



Adapun untuk konteks Indonesia ke depan, program pendidikan keaksaraan diharapkan tidak hanya sekedar gerakan nasional yang bertumpu pada upaya pemerintah saja, tetapi harus lebih kuat sehingga menjadi sebuah gerakan masyarakat yang mampu untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dan berperan dalam kegiatan ekonomi, budaya, dan dunia informasi digital serta dalam rangka membangun dan mewujudkan Indonesia yang damai, adil, beradab, dan makmur.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat terus berupaya untuk menurunkan angka tuna aksara secara bertahap. Namun jika dilihat dari persentase penduduk tuna aksara di setiap provinsi, ternyata Provinsi Papua berada pada urutan pertama yang sangat jauh perbedaannya jika dibanding dengan provinsi Sulawesi Utara yang berada pada urutan terbaik.

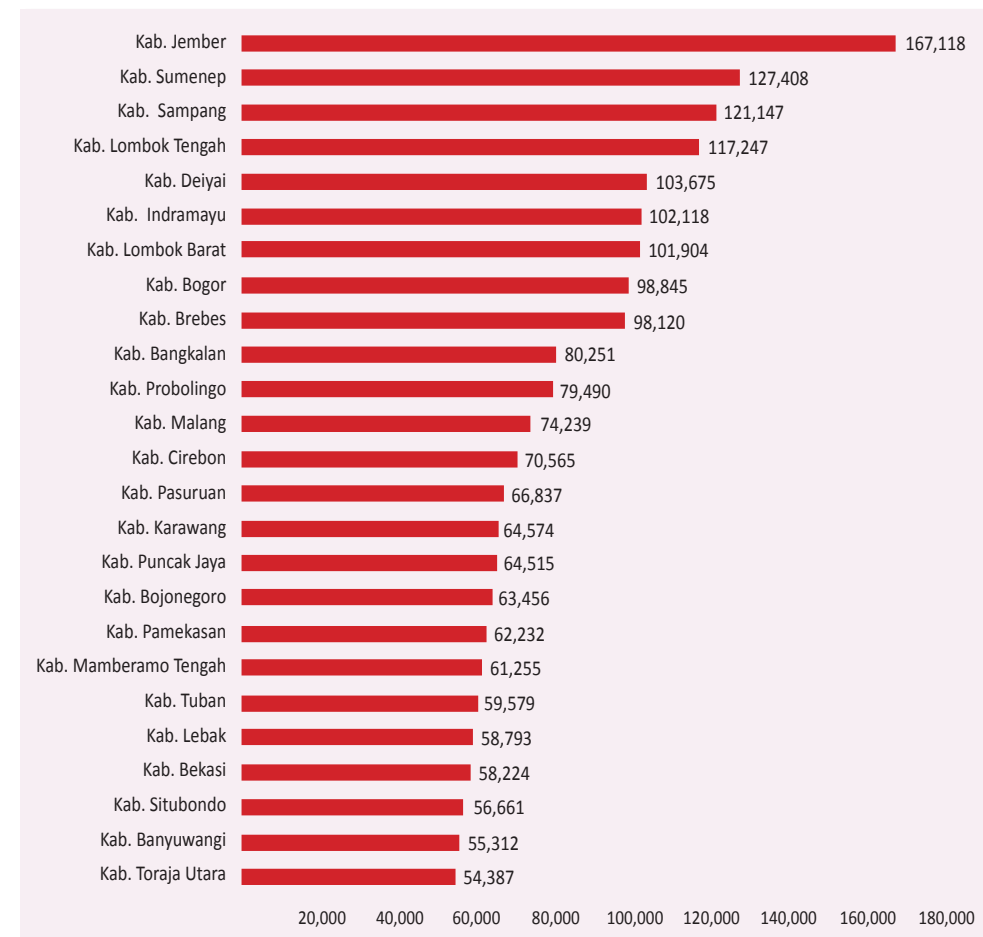
**Grafik 7**  
**Persentase Penduduk Tuna Aksara Usia 15-59 tahun**  
**per Provinsi, Tahun 2014**



Untuk mempercepat penurunan angka tuna aksara di Indonesia, sejak beberapa tahun terakhir pemerintah pusat melalui dana APBN mengkonsentrasikan upaya penuntasan tuna aksara (afirmasi) di daerah-daerah terpadat angka tuna aksara. Berdasarkan data yang diolah oleh Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014, terdapat 25 kabupaten yang dinilai terpadat angka tuna aksara (kantong tuna aksara) di Indonesia yang masing-masing jumlahnya di atas 200.000 orang, dan sebanyak 12 kabupaten di antaranya berada di Provinsi Jawa Timur.

Secara berurutan ke 25 kabupaten angka terpadat tuna aksara tersebut, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 8**  
**Kabupaten Terpadat Tuna Aksara Usia 15-59 tahun, Tahun 2014**



#### b. Pendidikan Keaksaraan Lanjutan

Pendidikan keaksaraan lanjutan merupakan layanan pendidikan keaksaraan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat paska pendidikan keaksaraan dasar.

Untuk mempertahankan melek aksara yang telah diraih oleh warga belajar paska keaksaraan dasar, maka perlu dilanjutkan pendidikannya melalui program pendidikan keaksaraan lanjutan, yang dikemas dalam berbagai menu program, antara lain:



### 1) Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)

Pendidikan keaksaraan usaha mandiri merupakan pendidikan keaksaraan yang menekankan peningkatan keaksaraan dan pengenalan kemampuan berusaha. Oleh karena itu, kemampuan atau keterampilan dasar usaha yang dilatihkan kepada warga belajar lebih diarahkan pada pembelajaran keterampilan bermatapencapaian yang dapat meningkatkan keaksaraan dan penghasilan peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan. Sasaran penerima manfaat layanan program ini diprioritaskan bagi penduduk yang sudah melek aksara dan telah memiliki SUKMA melalui keikutsertaannya pada pendidikan keaksaraan dasar atau paska pendidikan keaksaraan dasar. Penyelenggara program ini adalah PKBM/ Satuan PNF sejenis/ lembaga kemasyarakatan yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas pembelajaran keaksaraan yang ditunjukkan dengan adanya narasumber teknis untuk pelatihan keterampilan praktis atau pembelajaran kewirausahaan, data warga belajar, tutor, dan sarana pembelajaran yang disahkan oleh Kepala Desa atau RT/RW.

### 2) Pendidikan Multikeaksaraan

Pendidikan multikeaksaraan merupakan pendidikan keaksaraan yang menekankan peningkatan keragaman keberaksaraan dalam segala aspek kehidupan.



Sesuai perkembangan pendidikan keaksaraan saat ini, maka pendidikan keaksaraan tidak lagi hanya dimaknai sebagai layanan pendidikan bagi warga masyarakat yang tuna aksara, tetapi lebih jauh layanan pendidikan keaksaraan sudah mengarah universal yang memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam berbagai aspek kehidupan.



Oleh karena itu, pendidikan multikeaksaraan dapat dikemas dalam berbagai menu layanan program, antara lain:

#### a) Pendidikan Keaksaraan berbasis Keluarga

Pendidikan keaksaraan keluarga merupakan kemampuan memberdayakan keluarga untuk melatih kemampuan berkomunikasi melalui teks lisan, tulis, dan angka dalam bahasa Indonesia agar anggota keluarga yang belum beraksara mampu memperoleh, mencari, dan mengelola informasi untuk memecahkan masalah sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan risiko kematian ibu melahirkan dan bayi, ekonomi keluarga, dan pendidikan karakter dalam keluarga.





b) Pendidikan Keaksaraan berbasis Cerita Rakyat



Pendidikan Keaksaraan Berbasis Cerita Rakyat merupakan kemampuan mendongeng/berbicara, membaca, dan menulis cerita rakyat sehari-hari tentang legenda, kejadian dan fenomena alam (misalnya: bencana, gerhana dan lain-lain), kisah hidup, dan sejarah lokal yang inspiratif dan berkarakter untuk meningkatkan keberaksaraan dan keberdayaan masyarakat serta pelestarian sejarah

lokal yang ditunjukkan dalam teks lisan, tulis, atau media komunikasi lainnya.

c) Pendidikan Keaksaraan berbasis Kewirausahaan

Pendidikan Keaksaraan Kewirausahaan merupakan kemampuan kewirausahaan masyarakat yang dibelajarkan melalui rintisan/pengembangan inkubator bisnis dan sentra usaha mandiri untuk meningkatkan keberaksaraan dan penghasilan peserta didik dan masyarakat sekitar.



d) Pendidikan Keaksaraan berbasis Seni Budaya Lokal



Pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal merupakan kemampuan me-lestarikan seni budaya lokal melalui pembelajaran dan pelatihan untuk meningkatkan keberaksaraan dan keberdayaan masyarakat di bidang seni budaya lokal.

e) Pendidikan Keaksaraan berbasis Teknologi



Pendidikan keaksaraan berbasis teknologi merupakan upaya memfasilitasi layanan pembelajaran multikeaksaraan yang meliputi antara lain: keaksaraan media dan teknologi, keaksaraan perdamaian dan multikultural, dan keaksaraan bencana dengan memanfaatkan peralatan teknologi.

f) Pendidikan Keaksaraan berbasis Peningkatan Budaya Tulis melalui Koran Ibu

Peningkatan budaya tulis melalui koran ibu merupakan tindakan pembelajaran yang berpihak (*affirmative action*) terhadap peningkatan kemampuan dan budaya tulis perempuan yang dilatihkan dalam jurnalisme warga kepada peserta didik perempuan sekaligus sebagai penguatan keberaksaraan melalui berbagai media informasi, komunikasi dan teknologi.



g) Pendidikan Keaksaraan berbasis Peningkatan Budaya Tulis melalui Koran Anak

Peningkatan budaya tulis melalui koran anak merupakan tindakan pembelajaran dan perlindungan yang berpihak (*affirmative action*) terhadap peningkatan kemampuan dan budaya tulis anak marjinal yang rentan terhadap perdagangan orang, Eksploitasi Seks Anak (ESA) yang dilatihkan dalam jurnalisme kepada peserta didik anak yang memerlukan perlindungan sekaligus sebagai penguatan keberaksaraan melalui berbagai media informasi, komunikasi, dan teknologi.





## 2. Pengembangan Budaya Baca Masyarakat

Program pengembangan budaya baca masyarakat selama ini dilakukan melalui perintisan dan pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sesungguhnya TBM ini sudah mulai dirintis dan dibentuk oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat (nomenklatur lama) sejak tahun 1970-an. Pembentukan TBM dimaksudkan sebagai sarana atau wadah untuk menyediakan bahan bacaan bagi masyarakat khususnya bagi warga belajar keaksaraan yang sudah melek aksara agar tidak buta aksara kembali. Namun tujuan yang paling utama dari pembentukan TBM ini adalah untuk mengembangkan minat baca masyarakat sehingga berkembang menjadi budaya baca. Membaca merupakan modal utama sebagai pintu masuk untuk memperoleh pengetahuan dan berbagai keterampilan. Oleh karena itu, program pengembangan budaya baca dipandang sangat penting kaitannya dengan upaya merealisasikan idealisme Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Program peningkatan budaya baca mempunyai sasaran semua warga masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan kemampuan profesional yang berguna bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraannya. Hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan program ini adalah tersedianya bahan bacaan dan sumber informasi yang dapat diperoleh masyarakat secara mudah dan murah. Program ini diprioritaskan untuk penduduk miskin, pengangguran, warga tidak terampil, putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah, serta penduduk kurang beruntung lainnya.

Lembaga penyelenggara program yang diharapkan berkontribusi dalam pengembangan program ini adalah lembaga pelaksana program pendidikan nonformal seperti satuan-satuan PNF, lembaga kursus, PKBM, forum TBM, forum komunikasi keaksaraan, forum tutor keaksaraan, lembaga pengembangan/pelatihan terpadu masyarakat (LPTM), organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga pendidikan formal, tempat-tempat ibadah (masjid, gereja, pura, vihara), serta organisasi masyarakat sejenis lainnya yang melaksanakan pendidikan nonformal.

Penyelenggaraan TBM biasanya disinergikan oleh PKBM dengan penyelenggaraan program PAUD, dengan maksud agar para ibu yang sedang menunggu anaknya dapat memanfaatkan waktu luangnya dengan sambil membaca. Dengan mengembangkan budaya baca yang tinggi, memungkinkan seseorang mampu belajar secara mandiri untuk meningkatkan kualitas hidup sepanjang hayat. Pemerintah berupaya mendorong dan memotivasi masyarakat agar gemar membaca, sehingga menjadi budaya membaca. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, antara lain perlu dukungan sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah yang kondusif dalam memasyarakatkan budaya baca dan mendorong belajar, serta membudayakan kegiatan membaca dan mendorong belajar.





- b. Menyediakan akses TBM yang luas dan merata sehingga terjangkau masyarakat dalam rangka pemenuhan bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Pemenuhan kebutuhan bahan-bahan bacaan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mudah diperoleh melalui toko buku, perpustakaan dan TBM di wilayah pemukiman penduduk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Keluarga yang memiliki perpustakaan dan kebiasaan membaca bersama, perlu dikembangkan secara terus-menerus sehingga menjadi salah satu tradisi dalam keluarga.

Meningkatnya jumlah dan kualitas perpustakaan dan TBM yang menyenangkan dan dibutuhkan masyarakat serta didukung oleh pelayanan yang memotivasi pengunjung dan pengguna TBM untuk semakin gemar membaca dan belajar. Program pengembangan dan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

a. Peningkatan Mutu Sarana TBM Berbasis Elektronik

Peningkatan mutu sarana TBM berbasis elektronik merupakan penyediaan fasilitas peningkatan perlengkapan dan/atau peralatan elektronik yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan TBM berbasis elektronik sebagai upaya meningkatkan mutu layanan TBM.



b. TBM Ruang Publik



TBM Ruang Publik merupakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang diselenggarakan di ruang public, antara lain di pusat perbelanjaan (mall), lingkungan rumah sakit, rumah ibadah, yang dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan budaya baca dan menulis.

c. TBM Rintisan



TBM Rintisan merupakan upaya meningkatkan perluasan akses bahan-bahan bacaan bagi masyarakat melalui pembentukan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang mampu melayani kegiatan membaca dan menulis bagi masyarakat.

d. TBM Penguatan

TBM Penguatan merupakan upaya untuk memperkuat dan meningkatkan mutu Taman Bacaan Masyarakat agar dapat memaksimalkan layanan kegiatan membaca dan menulis.

e. Pengembangan Gerakan Indonesia Membaca (GIM)

Untuk mensosialisasikan dan memperkuat komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya secara massif di seluruh lapisan masyarakat, agar program peningkatan minat dan budaya masyarakat bukan hanya sekedar hanya program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tetapi menjadi program nasional yang dilakukan melalui gerakan nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.





### 3. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan atau akses bagi warga masyarakat khususnya para pemuda yang putus sekolah dan putus lanjut di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum, yang mencakup program paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA. Program ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat mengikuti pendidikan di bangku sekolah, putus sekolah dan putus lanjut di berbagai jenjang pendidikan, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidupnya, serta masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari peningkatan taraf hidup dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pengembangan program pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C ini diharapkan semakin memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat melalui layanan pendidikan nonformal.

Lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai

penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C adalah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, rumah pintar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya yang menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C.

Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan kepada warga negara Indonesia yang karena berbagai faktor dan sebab tidak dapat memperoleh layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal, sehingga pada akhir pembelajaran program pendidikan kesetaraan diharapkan warga belajar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui setara dengan jenjang pendidikan formal.

Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan bertujuan untuk:

- menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah atau putus lanjut di tingkat SD/MI untuk Paket A, anak-anak yang putus sekolah atau putus lanjut di tingkat SMP/MTs untuk Paket B, dan anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA/MA untuk Paket C;
- mendukung dan mensukseskan kebijakan nasional tentang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan rintisan wajib belajar pendidikan menengah dua belas tahun atau pendidikan menengah universal;
- meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan formal;





- d. membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri;
- e. membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan kariernya dalam pekerjaannya.

#### 4. Pendidikan Berkelanjutan

Pendidikan berkelanjutan merupakan kesempatan belajar bagi orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan setelah mereka melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan di masyarakat. Pendidikan berkelanjutan diselenggarakan untuk tujuan melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan berkelanjutan dapat diselenggarakan dengan berbagai menu program, antara lain:

##### a. Pendidikan Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan

Pendidikankecakaphidupberorientasipemberdayaanperempuan merupakan tindakan pembelajaran dan pelatihan yang berpihak (affirmative action) terhadap peningkatan kemampuan kecakapan hidup perempuan yang meliputi kecakapan personal, sosial, intelektual, dan vokasional berkaitan dengan pendidikan karakter dalam keluarga, kesehatan ibu dan anak, keterampilan mengolah dan mendayagunakan sumber daya lokal yang memberikan nilai tambah pada kemandirian dan kehidupan keluarga.



##### b. Pendidikan Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan (EfSD)



Pendidikan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan (EfSD) merupakan kemampuan perempuan dalam pemanfaatan sumberdaya lokal untuk meningkatkan kepedulian dan pemeliharaan terhadap lingkungan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

##### c. Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)



Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Trafiking (PTPPO) diselenggarakan dalam rangka peningkatan kapasitas Gugus Tugas PTPPO untuk memperkuat kelembagaan serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk mencegah perdagangan orang dan Eksploitasi Seks Anak (ESA) melalui bidang pendidikan. Tujuan program ini adalah untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat mencegah atau mengurangi tindakan perekrutan,

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat dalam perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.







#### d. Pendidikan Pemberdayaan Anak Marjinal

Pendidikan pemberdayaan anak marjinal merupakan upaya afirmatif bagi kelompok termarginalkan, khususnya anak-anak yang rawan terhadap ancaman bahaya KDRT, HIV-AIDS, dan NAPZA untuk memberdayakan dirinya sehingga pada suatu waktu mereka memiliki kemampuan keluar dari kondisi (termarginalkan) yang dialami. Bantuan pendidikan pemberdayaan anak marjinal merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pembelajaran/pelatihan untuk memberdayakan anak marjinal dan lingkungannya.

#### 5. Kerjasama dan Kemitraan

Penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan seyogyanya tidak dianggap semata-mata hanya tugas pemerintah saja. Pemerintah memang mempunyai tanggung jawab untuk terlaksananya pendidikan bagi setiap warga negara di seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara agar dapat maju mengejar cita-citanya, untuk meningkatkan harkat dan martabat hidupnya, serta menjadi sejahtera. Pendanaan pendidikan tersebut memerlukan peranserta dari berbagai pihak terkait (stakeholder). Kemampuan pihak-pihak terkait untuk menunjang program ini perlu dikembangkan dan diatur agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas tujuan pembangunan pendidikan.

Pendidikan dianggap merupakan suatu investasi untuk dapat menghadapi berbagai masalah. Masalah yang dihadapi bukan hanya keterbelakangan dan keterbatasan dalam memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, namun juga masalah lainnya seperti pengangguran, kemiskinan, hidup tidak sehat, serta “penyakit sosial” lainnya. Itulah sebabnya umumnya negara-negara di belahan dunia ini, menempatkan kesempatan pendidikan bagi warganya pada posisi yang tinggi.



Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan terus mengembangkan layanan program yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan dan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dirancang untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat yang berada di perdesaan yang umumnya memiliki keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial/budaya, kondisi geografis, dan lain-lain. Dalam penyelenggaraan program, Ditbindiktara bekerjasama dengan berbagai lembaga/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, seperti: organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, lembaga pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi, satuan pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya. Di samping itu, unit pelaksana teknis pendidikan nonformal di daerah, seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan nonformal dan informal. Lembaga-lembaga tersebut, baik yang dikelola oleh masyarakat maupun oleh pemerintah merupakan unit terdepan untuk memberikan layanan dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal dan informal bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Di negara yang sudah maju, pembiayaan pendidikan dikelola dengan

mengambil bagian dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sesuai penghasilannya. Dalam kondisi yang serba terbatas pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, maka kontribusi masyarakat khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, mempunyai kesempatan untuk membantu pembiayaan pendidikan. Masyarakat dapat ikut berkontribusi melalui suatu bentuk kemitraan untuk memecahkan berbagai masalah dalam dunia pendidikan kita, yang terkesan seperti lingkaran setan atau berupa gunung es yang nampak indah pada puncaknya, namun menyimpan banyak masalah di bawahnya. Konsep kemitraan sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dalam jiwa dan kepribadian bangsa kita, sejak dulu sesungguhnya masyarakat kita sudah memiliki konsep kerjasama atau kemitraan yang selalu digunakan untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi, yaitu konsep “gotong royong”. Konsep tersebut tidak jauh berbeda dari istilah yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan “kemitraan”. Keduanya mempunyai tujuan yang dapat dikatakan sama, mengatasi masalah atau resiko bersama, maju bersama dan mendapat manfaat bersama juga.

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama yang bersifat mutual, saling menghargai antar pihak yang bermitra. Kepercayaan menjadi dasar dari kerjasama ini untuk mencapai tujuan, mendapatkan suatu kondisi yang kondusif bagi setiap pihak yang terlibat. Kemitraan di bidang pendidikan keaksaraan dan kesetaraan adalah sebuah upaya guna menggalang kerja sama atau kemitraan (partnership) yang baik antara pemerintah (cq. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud) dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Sebab dengan kemitraan dapat menjadi media tunggal guna membangun dan memperluas akses untuk meningkatkan mutu dan hasil pelaksanaan program pendidikan masyarakat. Kemitraan dijalin ketika dua pihak yang berkepentingan merasa memerlukan bantuan pihak lain dalam menjalankan tugasnya di bidang pendidikan masyarakat. Kemitraan berlangsung sepanjang kedua belah pihak yang berkepentingan saling memperoleh keuntungan melalui kemitraan. Kemitraan di bidang pendidikan masyarakat dilakukan di tingkat pusat dan daerah.

Di tingkat nasional, kemitraan dilakukan dengan lembaga/instansi pemerintah maupun swasta, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kepedulian dan kepentingan terhadap penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Demikian juga di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, kemitraan dengan berbagai dinas-dinas terkait di lingkungan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga/organisasi masyarakat, dan unit-unit pelaksana teknis di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, serta khususnya unit-unit pelaksana teknis di bidang pendidikan nonformal. Kemitraan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat yang telah dilakukan selama ini dan akan terus dikembangkan ke depan, dapat digambarkan sebagai berikut:

**Bagan 4**  
**Strategi Kemitraan Ditbindiktara**





Strategi pengembangan kemitraan dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan harus diarahkan dalam upaya menggali dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh berbagai lembaga/instansi atau organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga penyelenggaraan berbagai program pendidikan masyarakat dapat terselenggara secara optimal untuk memberdayakan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka memperluas jaringan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, strategi yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan selama ini adalah memperkuat kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan.

#### 6. Penguatan Sistem Pendataan dan Informasi

Dalam rangka penyajian data dan informasi kepada semua pihak-pihak terkait, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sejak tahun 2008 telah mengembangkan sistem pendataan dan informasi berbasis website (ICT). Setiap lembaga/organisasi mitra penyelenggara program di daerah dapat mengakses berbagai pedoman, petunjuk teknis, kurikulum, dan bahan-bahan ajar lainnya untuk digunakan sebagai panduan dalam menyelenggarakan program di lapangan. Di samping itu, setiap awal tahun juga setiap lembaga/organisasi mitra dapat melihat dan mengetahui skema program yang tersedia melalui dana APBN yang dapat diakses untuk membantu pendanaan penyelenggaraan program sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Untuk akuntabilitas dan transparansi program, setiap lembaga/organisasi mitra yang memperoleh bantuan setiap tahun di seluruh Indonesia dapat dilihat profilnya.

Saat ini Ditbindiktara sedang memperkuat sistem pendataan dan informasi dengan mengembangkan aplikasi pendataan, antara lain:

- a. Aplikasi pendataan (dapodik) PKBM sebagai salah satu Satuan Pendidikan Nonformal, dengan maksud agar setiap PKBM dapat memiliki nomor induk atau nomor pokok satuan pendidikan nonformal secara nasional (NPSN)
- b. Aplikasi pendataan (dapodik) warga belajar atau peserta didik, dengan maksud agar setiap warga belajar sejak awal pembelajaran telah memiliki nomor induk warga belajar secara nasional (NISN).

#### 7. Penataan Kelembagaan

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu satuan pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai wadah dan tempat pembelajaran, pelatihan, dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.

Sesuai dengan mottonya “dari, oleh, dan untuk masyarakat”, maka PKBM sebagai ujung tombak penyelenggaraan program pendidikan nonformal diharapkan dapat memperkuat dan memperluas sasaran program dikmas, sehingga memiliki kemampuan untuk menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal, dan melayani masyarakat yang belum terlayani pendidikannya. Sifat fleksibel yang dimiliki oleh PKBM dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sekaligus merupakan kekuatan yang perlu didukung untuk lebih mengefektifkan fungsi dan perannya. Kedekatannya pada masyarakat yang membutuhkan pendidikan atau keterampilan hidup, merupakan asset yang sangat berharga sebagai penguatan infrastruktur pendidikan.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan perubahan yang demikian cepat di segala bidang kehidupan. Perubahan yang demikian cepat menuntut dan mendorong Ditbindiktara cepat untuk menyesuaikan program sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kondisi demikian menempatkan peranan pendidikan nonformal dalam posisi strategis. Pendidikan nonformal tidak lagi hanya diperlukan dalam menangani masalah buta aksara, tetapi lebih jauh diharapkan dapat membantu masyarakat menambah pengetahuan, keterampilan atau keahliannya agar dapat merebut peluang dan persaingan hidup di masyarakat.

PKBM harus bersifat netral, karena tidak menggunakan atribut pemerintah atau Kemendikbud. Dengan demikian semua pihak atau golongan dapat memanfaatkan keberadaan PKBM untuk kepentingan kemajuan masyarakat. Sebagai contoh: ada PKBM yang dikelola oleh LSM, ada PKBM yang diselenggarakan di pesantren, dan PKBM yang diprakarsai oleh perusahaan, dan sebagainya. Peranan Ditbindiktara hanya memfasilitasi, sedangkan prakarsa sepenuhnya ada pada masyarakat.

Keberadaan PKBM sebagaimana dijelaskan di atas, memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai basis koordinasi program-program pembelajaran dan pelatihan di masyarakat. Tersedianya tenaga-tenaga tutor, bahan-bahan belajar/bacaan, dan sarana keterampilan (terutama

di PKBM yang sudah berkembang), merupakan daya pikat tersendiri bagi masyarakat untuk datang ke PKBM. Wadah tersebut akan menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna jika pihak-pihak yang memiliki program sejenis dapat bergabung dan menjalin koordinasi yang lebih mantap. PKBM juga memiliki potensi yang baik sebagai wadah pembelajaran dan pembinaan di bidang seni dan budaya lokal. Kerja sama dapat dilakukan antara lain melalui program pelatihan seni dan budaya lokal kepada para tutor yang ada di PKBM, program pekan olahraga dan seni (Porseni) bagi warga belajar di PKBM, pengadaan bahan bacaan yang bernafaskan agama, seni dan budaya lokal, serta program pentas seni rakyat di kalangan PKBM. Pelajaran yang diperoleh dari Jepang dengan “*Kominkan*” nya (sejenis PKBM), memberikan gambaran betapa pentingnya kemitraan pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat setempat. Peran strategis “*Community Learning Centre (CLC)*” dalam upaya pemberdayaan masyarakat, semakin mempertinggi daya tahan ekonomi negara. Lembaga sejenis CLC di negara lain tidak hanya sekedar memberikan kebutuhan pendidikan bagi warganya, namun juga sekaligus mengatasi masalah-masalah sosial sebagai akibat dari kondisi keterbelakangan pendidikan, pengetahuan, dan kemiskinan. Investasi untuk membantu CLC akan banyak memberikan efek “snowball” yang positif.

Program pendidikan nonformal seperti: pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, pengarusutamaan gender (PUG), pendidikan keaksaraan, pendidikan

pemberdayaan perempuan, kursus-kursus keterampilan dan kecakapan hidup, pengembangan budaya baca melalui TBM, dan lainnya, semuanya dapat secara fleksibel diakomodasi dalam PKBM. Dengan melihat keberadaan PKBM di Indonesia, dan dibandingkan dengan perlakuan pemerintah dan masyarakat Jepang bagi keberadaan “*Kominkan*”, maka PKBM di Indonesia terkesan “ditelantarkan” oleh pemerintah. PKBM sebagai lembaga swadaya masyarakat, sangat memerlukan uluran tangan dan bantuan dari berbagai pihak khususnya pemerintah daerah.

Dukungan terhadap PKBM dapat juga diberikan dalam bentuk penyediaan tenaga-tenaga “*volunteer*” yang terkait dengan kebutuhan tenaga pendidik atau pelatih yang ahli, perangkat kerja dan tatakelola yang memadai. Bentuk kemitraan yang memungkinkan semakin berfungsinya peran PKBM, sangat tergantung pada lingkup garapan program yang ditangani sesuai kebutuhan setempat.

Jika dilihat dari kacamata relevansi pendidikan, fungsi dan peran PKBM dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran dan pelatihan bagi warga masyarakat setempat, sangat terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta terpenuhinya tenaga sumber daya manusia yang relevan dengan program pembelajaran dan pelatihan yang diselenggarakan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Relevansi ini tidak hanya terkait untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, tapi juga dikaitkan dengan kebutuhan kemampuan peserta didik. Fleksibilitas PKBM dalam mengembangkan program pendidikan dan pelatihan sangat menunjang nilai relevansi tersebut, sehingga dengan demikian peran dan kegiatan PKBM lebih dirasakan manfaat dan kebermaknaannya bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat binaannya.

Berdasarkan kondisi dan keberadaan PKBM di Indonesia yang dirintis dan difasilitasi pembentukannya sejak tahun 1997 oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (nomenklatur baru saat ini) memiliki tanggung jawab untuk membina dan mendukung pengembangan peran PKBM agar lebih kuat dan berfungsi optimal. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bertindak sebagai katalisator dan dinamisator untuk memberdayakan PKBM, sehingga program pendidikan masyarakat dapat berjalan secara berkesinambungan, dan selalu “*up to date*” dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dan mampu mengatasi masalah-masalah pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

PKBM dapat melibatkan para tenaga ahli, para mahasiswa perguruan tinggi dari berbagai program studi melalui program pengabdian



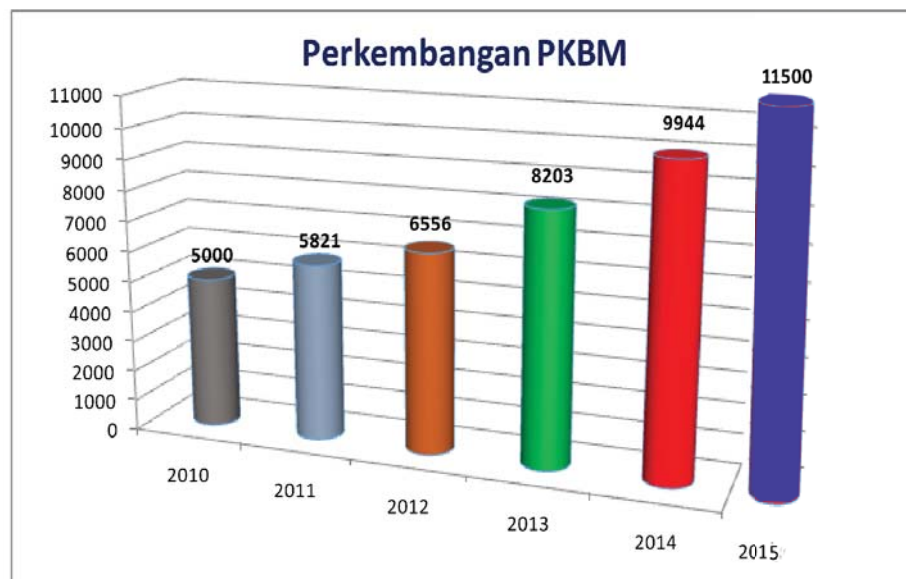


masyarakat ataupun Kuliah Kerja Nyata. Kemitraan dengan usaha kecil menengah (UKM) dengan menampung produksi masyarakat “outlet” di PKBM, dapat juga dikembangkan. Bantuan dengan mengadakan pelatihan sejenis “master trainers atau TOT” khususnya peningkatan kemampuan mengelola atau manajemen kegiatan (termasuk administrasi, keuangan atau pembiayaan), merupakan bantuan yang besar dalam mengembangkan dan meningkatkan fungsi dan peran PKBM.

Melalui pengembangan kemitraan PKBM dengan berbagai pihak tersebut, PKBM sebagai wahana pendidikan nonformal menjadi lebih bergengsi dan dapat diandalkan. Penguatan citra ini dapat berdampak pada terbangunnya rasa memiliki dari masyarakat atas keberadaan PKBM, dan dengan sendirinya dapat berkembang atas swadaya masyarakat dan terjamin keberlanjutannya (*sustainability*). Hal tersebut adalah sesuatu yang selalu diangan-angankan oleh setiap pengembang pendidikan.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sejak tahun 2010 telah melakukan penataan kelembagaan satuan pendidikan nonformal. PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal berfungsi memberikan layanan pendidikan nonformal pada masyarakat, dengan melakukan pendataan dan pemberian Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM secara online.

**Grafik 9**  
**Perkembangan Jumlah PKBM dari Tahun 2010 – 2015**



Pada tahun 2011 telah dilakukan pengembangan NILEM PKBM dan merintis pendataan secara online untuk lembaga pendidikan nonformal lainnya.

Untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, dilakukan penataan kelembagaan terhadap berbagai lembaga/organisasi sebagai satuan pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai wadah penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, antara lain dengan melalui:

a. Peningkatan mutu PKBM sesuai standar nasional

Peningkatan mutu kelembagaan PKBM merupakan kemampuan memberdayakan lembaga untuk meningkatkan kapasitas di bidang manajemen, tata kelola, sarana/prasarana, dan sumber daya manusia, dengan memberikan bantuan dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai standar nasional.

b. Penilaian kinerja PKBM

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan program yang dilaksanakan oleh PKBM, Ditbindiktara telah melakukan penilaian kinerja terhadap PKBM agar memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menyelenggarakan program sesuai standar yang ditentukan.

c. Akreditasi PKBM

Setiap PKBM yang telah memenuhi sesuai standar nasional dan memiliki kinerja yang baik, akan memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PNF.

d. Peningkatan mutu Forum Komunikasi PKBM

Peningkatan mutu Forum Komunikasi PKBM merupakan kemampuan memberdayakan manajemen, tata kelola, efesiensi, profesionalisme, sumber daya, dan karakter forum komunikasi PKBM pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

e. Pendampingan PKBM

Pendampingan PKBM merupakan pembimbingan dan bantuan teknis lainnya yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi

atau lembaga/organisasi profesi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PKBM, yang meliputi penataan dan penguatan manajemen PKBM serta pengembangan layanan, untuk mempersiapkan PKBM memperoleh akreditasi.

f. Revitalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan PNF

Sejak otonomi daerah status SKB berubah menjadi UPT daerah yang sebelumnya statusnya sebagai UPT pusat di daerah. Namun dalam perkembangannya selama ini SKB terkesan kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah, sehingga dipandang kurang optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengembang model pendidikan nonformal di daerah. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi SKB, pemerintah pusat akan memfasilitasi pengembangan eksistensi SKB sebagai satuan pendidikan nonformal yang diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai pusat rujukan atau unggulan satuan pendidikan nonformal di daerah.



g. Rintisan dan Penguatan Balai Belajar Bersama

Rintisan dan Penguatan Balai Belajar Bersama merupakan upaya memfasilitasi komunitas belajar masyarakat dengan cara menemukan kembali (*reinventing*) prinsip-prinsip ruang publik sebagai tempat memecahkan masalah melalui belajar bersama dengan melibatkan pimpinan informal, formal, dan kerukuntetangaan. Pembelajaran dilaksanakan dalam kebersamaan masyarakat yang memaksimalkan jaringan antarlembaga sebagai sumberdaya belajar.

h. Rintisan dan Penguatan Rumah Pintar

Rintisan dan Penguatan Rumah Pintar merupakan upaya memfasilitasi komunitas belajar masyarakat untuk menjadi rumah pintar sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis terutama di kawasan adat tertinggal, terpencil, perbatasan, terdepan, dan terluar, dimaksudkan sebagai layanan menjangkau masyarakat yang belum terlayani.



i. Fasilitasi pemberdayaan sekolah rumah (*homeschooling*)

Pemerintah perlu mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan nonformal kepada masyarakat yang membutuhkan. Sesuai kebutuhan masyarakat khususnya di daerah perkotaan yang memiliki kesibukan yang tinggi dalam pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari, sehingga tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan melalui jalur formal, maka mendorong hadirnya sekolah rumah (*homeschooling*) sebagai wadah pembelajaran untuk memperoleh pendidikan khususnya dalam bentuk pendidikan kesetaraan. Ditbindiktara sebagai pembina program pendidikan kesetaraan harus mengapresiasi kontribusi masyarakat yang menyediakan layanan pendidikan melalui wadah tersebut.





D. Program dan Anggaran Tahun 2016

Berdasarkan pagu anggaran APBN setiap tahun yang dialokasikan untuk Ditjen PAUD dan Dikmas, terdapat alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Pengelolaan dana tersebut kemudian diarahkan untuk mendukung program dan kegiatan di lingkungan Ditbindiktara, seperti yang tergambar dalam tabel berikut:

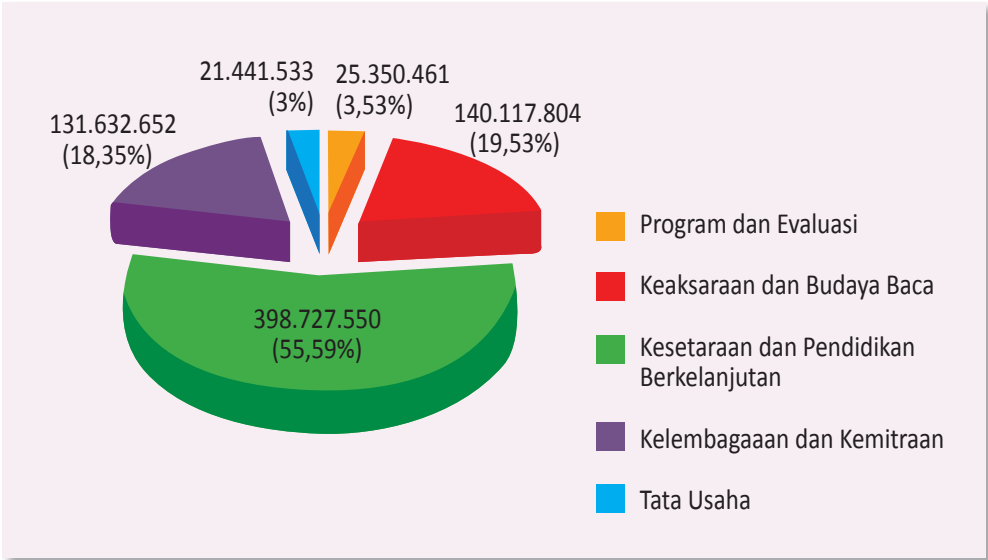
Tabel 8  
Postur Anggaran

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2016  
(dalam ribuan rupiah)

No	Satuan / Unit Kerja	Belanja Sosial		Belanja Barang yg diserahkan pada Masy/Pemda (BLK)		Belanja Pegawai/Barang/Modal (BAK)	Jumlah
		Sasaran	Jumlah	Sasaran	Jumlah		
	DITBIN-DIKTARA	18 pkt	1.800.000	35 kom, 51 desa 662 lbg 20 lok	604.146.800	111.323.200	717.270.000
1.	Subdit Program dan Evaluasi	18 pkt	1.800.000	35 kom. 51 desa	9.565.000	13.985.461	25.350.461
2.	Subdit Keaksaraan dan Budaya Baca	-	-	172.850 org 31 pkt	108.197.000	31.920.804	140.117.804
3.	Subdit Kesetaraan dan Diklanjut	-	-	249.300 org 20 lok	374.934.800	24.792.750	398.727.550
4.	Subdit Kelembagaan dan Kemitraan	-	-	662 lbg	112.450.000	19.182.652	131.632.652
5.	Subag Tata Usaha	-	-	-	-	21.441.533	21.441.533

Keterangan : Jumlah bantuan penyelenggaraan program dan bantuan sosial, sebesar Rp. 605.946.800.000 (84%).

Grafik 10  
Persentase Anggaran per Subdit dan TU di lingkungan  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2016



Berdasarkan pagu anggaran yang dialokasikan pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2016, maka jenis-jenis bantuan penyelenggaraan program yang dapat diakses oleh para pimpinan lembaga/organisasi mitra penyelenggara program di daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 9  
Jenis Bantuan Penyelenggaraan Program  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016

No	Jenis Bantuan Program	Volume	Unit Cost	Jumlah (Rp)
1.	BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar (daerah terpadat tuna aksara)	64.500 org	450.000	29.025.000.000
2.	BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Papua dan 3 T	30.000 org	750.000	22.500.000.000
3.	BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.000 org	2.500.000	2.500.000.000
4.	BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	77.370 org	600.000	46.422.000.000
5.	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A	12.640 org	970.000	12.260.800.000

6.	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B	123.160org	1.400.000	172.424.000.000
7.	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C	92.500 org	1.700.000	157.250.000.000
8.	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasional	11.000 org	2.000.000	22.000.000.000
9.	Bantuan Penyelenggaraan PKH Perempuan Marjinal	10.000 org	1.000.000	10.000.000.000
10.	Bantuan Penganangan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM)	20 pkt	130.000.000	2.600.000.000
11.	Bantuan Penganangan Gerakan Indonesia Membaca (GIM)	31 pkt	250.000.000	7.750.000.000
12.	Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra	50 lbg	50.000.000	2.500.000.000
13.	Bantuan Penataan Kelembagaan Satuan PNF (PKBM dan Rumpin)	400 lbg	100.000.000	40.000.000.000
14.	Bantuan Sarana bagi TBM	120 lbg	50.000.000	6.000.000.000
15.	Bantuan TBM di SKB	40 lbg	75.000.000	3.000.000.000
16.	Bantuan Sarana bagi SKB	30 lbg	125.000.000	3.750.000.000
17.	Bantuan Pembangunan (Revitalisasi) SKB	22 lbg	2.600.000.000	57.200.000.000
18.	Bantuan Pendampingan Komunitas Rumah Belajar (homeschooling)	35 kom	35.000.000	1.225.000.000
19.	Bantuan Pemberdayaan Desa Vokasi	20 desa	200.000.000	4.000.000.000
20.	Bantuan Pemberdayaan Kampung Literasi	31 desa	140.000.000	4.340.000.000
21.	Bantuan Tanggap Darurat Bencana	18 paket	100.000.000	1.800.000.000
Jumlah				605.946.800.000

Setiap lembaga/organisasi mitra penyelenggara program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang ingin mengakses program dan memperoleh penjelasan rinci tentang persyaratan dan tata cara mengajukan proposal, serta mekanisme pengelolaan program dari berbagai jenis bantuan penyelenggaraan program seperti tertera di atas, dapat mempelajari Petunjuk Teknis masing-masing program yang dapat diunduh di website: <http://paudni.kemdiknas.go.id/dikmas>.

## E. Mekanisme Bantuan Program Tahun 2016

### 1. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar (daerah terpadat tuna aksara)

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan Keaksaraan Dasar (daerah terpadat tuna aksara) merupakan layanan pendidikan keaksaraan dasar yang ditujukan bagi warga masyarakat yang tuna aksara latin dan berada di kabupaten terpadat angka tuna aksara agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
2.	Tujuan	Memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik (warga belajar) agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari.
3.	Sasaran	Penduduk tuna aksara latin, prioritas berusia 15 – 59 tahun yang berada di 40 kabupaten terpadat tuna aksara (di luar provinsi Papua dan Papua Barat)
4.	Persyaratan	Penerima bantuan adalah lembaga satuan pendidikan nonformal seperti PKBM, SKB, Rumpin, dan lembaga/organisasi masyarakat sebagai penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar, dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang Rp. 450.000, dengan sasaran sebanyak 64.500 orang, total biaya Rp 29.025.000.000.

Adapun sebaran atau distribusi sasaran dan biaya tersebut adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten	Sasaran (org)	Biaya (Rp)
1.	Banten	1 Lebak	2,000	900,000,000
2.	Jawa Barat	2 Indramayu	2,500	1,125,000,000
		3 Bogor	3,000	1,350,000,000
		4 Cirebon	1,800	810,000,000
		5 Karawang	1,500	675,000,000
		6 Bekasi	1,500	675,000,000



3.	Jawa Tengah	7	Brebes	2,000	900,000,000
		8	Sragen	1,200	540,000,000
		9	Tegal	1,200	540,000,000
		10	Pemalang	1,200	540,000,000
		11	Blora	1,200	540,000,000
		12	Pati	1,200	540,000,000
		13	Grobogan	1,200	540,000,000
4.	Jawa Timur	14	Jember	4,000	1,800,000,000
		15	Sumenep	2,000	900,000,000
		16	Sampang	1,500	675,000,000
		17	Bangkalan	1,500	675,000,000
		18	Probolinggo	1,500	675,000,000
		19	Malang	1,500	675,000,000
		20	Pasuruan	1,500	675,000,000
		21	Bojonegoro	1,000	450,000,000
		22	Pamekasan	1,000	450,000,000
		23	Tuban	1,000	450,000,000
		24	Situbondo	1,000	450,000,000
		25	Bondowoso	1,000	450,000,000
5.	Bali	26	Lumajang	1,000	450,000,000
		27	Bangli	1,000	450,000,000
		28	Klungkung	1,000	450,000,000
6.	Nusa Tenggara Barat	29	Karangasem	1,000	450,000,000
		30	Lombok Barat	2,000	900,000,000
		31	Lombok Tengah	2,000	900,000,000
7.	Nusa Tenggara Timur	32	Lombok Timur	1,000	450,000,000
		33	Sumba Tengah	1,000	450,000,000
		34	Sumba Barat Daya	1,000	450,000,000
		35	Timor Tengah Utara	1,000	450,000,000

8.	Sulawesi Selatan	36	Toraja Utara	1,500	675,000,000
		37	Bantaeng	1,000	450,000,000
9.	Sumatera Utara	38	Nias Selatan	1,500	675,000,000
10.	Kalimantan Barat	39	Kayong Utara	1,500	675,000,000
		40	Sanggau	1,500	675,000,000
11.	Alokasi di Pusat			5,500	2,475,000,000
Jumlah				64,500	29,025,000,000

## 2. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Papua dan 3 T

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan Keaksaraan Dasar Papua dan 3 T merupakan afirmasi layanan pendidikan keaksaraan dasar yang ditujukan bagi warga masyarakat yang tuna aksara latin di Provinsi Papua, Papua Barat, dan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3 T), agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
2.	Tujuan	Memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik (warga belajar) agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari.
3.	Sasaran	Penduduk tuna aksara latin, prioritas berusia 15 – 59 tahun, yang berada (afirmasi) di kabupaten terpadat angka tuna aksara di Provinsi Papua, Papua Barat, dan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3 T).
4.	Persyaratan	Penerima bantuan adalah lembaga satuan pendidikan nonformal seperti PKBM, SKB, Rumpin, lembaga keagamaan, dan lembaga/ organisasi masyarakat sebagai penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar, dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota.</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang Rp. 750.000, dengan sasaran sebanyak 30.000 orang, total biaya Rp 22.500.000.000, dengan alokasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Provinsi Papua dan Papua Barat, sebanyak 20.750 orang, total biaya Rp. 15.562.500.000</li> <li>Daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3 T), sebanyak 9.250 orang, total biaya Rp. 6.938.000.000.</li> </ul>

Adapun sebaran atau distribusi sasaran dan biaya tersebut adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten	Sasaran (org)	Biaya (Rp)
A.	Provinsi Papua dan Papua Barat		20.750	15.562.500.000
1.	Papua	Deiyai	3.500	2,625,000,000
		Puncak Jaya	2.500	1,875,000,000
		Memberamo Tengah	2.000	1,500,000,000
		Nduga	2.000	1,500,000,000
		Jayawijaya	2.000	1,500,000,000
		Lanny Jaya	2.000	1,500,000,000
		Puncak	1.000	750,000,000
		Intan Jaya	1.000	750,000,000
		Yalimo	1.000	750,000,000
		Paniai	1.000	750,000,000
		Tolikara	1.000	750,000,000
		Keerom	750	562,500,000
2.	Papua Barat	Teluk Wondama	1.000	750,000,000
B.	Daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3 T)		9.250	6,938,000,000
3.	Sumatera Barat	Mentawai	1.000	750,000,000
4.	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	750	562,500,000
5.	Kalimantan Barat	Bengkayang	750	562,500,000
6.	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	750	562,500,000
7.	Sulawesi Tengah	Sigi	750	562,500,000
8.	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	750	562,500,000
9.	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	750	562,500,000
10.	Kalimantan Barat	Sambas	750	750,000,000
11.	Sulawesi Selatan	Jeneponto	750	562,500,000
12.	Kalimantan Utara	Nunukan	750	562,500,000
13.	Sulawesi Tenggara	Konawe	500	375,000,000
14.	NTT	Timor Tengah Selatan	500	375,000,000
		Belu	500	375,000,000
Jumlah			30.000	22,500,000,000

### 3. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KAT)

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan afirmasi layanan pendidikan keaksaraan dasar yang ditujukan bagi warga masyarakat yang tuna aksara latin, yang berada di komunitas adat terpencil, agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
2.	Tujuan	Memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik (warga belajar) agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari.
3.	Sasaran	Penduduk tuna aksara prioritas berusia 15 – 59 tahun yang berada di daerah Komunitas Adat Terpencil (KAT)
4.	Persyaratan	Penerima bantuan adalah lembaga satuan pendidikan nonformal seperti PKBM, SKB, Rumpin, dan lembaga/organisasi masyarakat sebagai penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar, dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang Rp. 2.500.000, dengan sasaran sebanyak 1.000 orang, total biaya Rp 2.500.000.000.

Adapun sebaran atau distribusi sasaran dan biaya tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Suku/Komunitas	Kabupaten/Provinsi	Sasaran (org)	Biaya (Rp)
1.	Anak Dalam	Sarolangun, Jambi	100	25,000,000
2.	Baduy/Rawayan/Panamping/Dangka	Lebak, Banten	100	25,000,000
3.	Samin	Blora, Jawa Tengah	100	25,000,000
4.	Kajang (Tana Toa)	Bulukumba, Sulawesi Selatan	100	25,000,000
5.	Dayak	Barito Utara, Barito Timur, Murung Raya, Kalimantan Tengah	200	50,000,000



6.	Bajo	Konawe Kepulauan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	100	25,000,000
7.	Sasak Dayan	Lombok Timur, NTB	100	25,000,000
8.	Dani	Dogiyai, Papua	100	25,000,000
9.	Talang Mamak	Indragiri Hulu, Riau	100	25,000,000
Jumlah			1.000	2.500.000.000

#### 4. BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan keaksaraan usaha mandiri merupakan bagian dari layanan pendidikan keaksaraan lanjutan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat paska pendidikan keaksaraan dasar. Untuk mempertahankan melek aksara yang telah diraih oleh warga belajar paska keaksaraan dasar, perlu dilanjutkan pendidikannya melalui program pendidikan keaksaraan lanjutan, yang dikemas dalam berbagai menu program, antara lain Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM).
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>memelihara dan mengembangkan keberaksaraan peserta didik yang telah memiliki kompetensi keaksaraan dasar</li> <li>meningkatkan kemampuan berusaha secara mandiri atau kelompok sesuai potensi dan kebutuhan setempat</li> <li>Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam mengembangkan usaha yang ditekuni.</li> </ul>
3.	Sasaran	Warga masyarakat khususnya peserta didik paska keaksaraan dasar yang berada di daerah atau lokasi paska program pendidikan keaksaraan dasar, yang berada di 71 kabupaten di wilayah 18 provinsi.
4.	Persyaratan	Penerima bantuan adalah lembaga satuan pendidikan nonformal seperti PKBM, SKB, Rumpin, LKP, dan lembaga/organisasi masyarakat sebagai penyelenggara program pendidikan keaksaraan, dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang Rp.600.000, dengan sasaran sebanyak 77.370 orang, dengan total anggaran sebesar Rp 46.422.000.000.

Adapun sebaran atau distribusi sasaran dan biaya tersebut adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten		Sasaran (org)	Biaya (Rp)
1.	Banten			1,500	900,000,000
		1	Lebak	1,000	600,000,000
		2	Pandeglang	500	300,000,000
2	Jawa Barat			9,300	5,580,000,000
		3	Indramayu	1,800	1,080,000,000
		4	Bogor	2,000	1,200,000,000
		5	Cirebon	1,300	780,000,000
		6	Karawang	1,200	720,000,000
		7	Bekasi	1,200	720,000,000
		8	Subang	800	480,000,000
		9	Pangandaran	500	300,000,000
		10	Sukabumi	500	300,000,000
3.	Jawa Tengah			7,000	4.200.000.000
		11	Brebes	2,000	1,200,000,000
		12	Sragen	800	480,000,000
		13	Tegal	1,000	600,000,000
		14	Pemalang	800	480,000,000
		15	Blora	800	480,000,000
		16	Pati	800	480,000,000
		17	Grobogan	800	480,000,000
4.	Jawa Timur			19,500	11.700.000.000
		18	Jember	2,200	1,320,000,000
		19	Sumenep	2,000	1,200,000,000
		20	Sampang	1,500	900,000,000
		21	Bangkalan	1,500	900,000,000
		22	Probolinggo	1,500	900,000,000
		23	Malang	1,300	780,000,000
		24	Pasuruan	1,300	780,000,000
		25	Bojonegoro	1,000	600,000,000
		26	Pamekasan	2,000	1,200,000,000
		27	Tuban	1,000	600,000,000

		28	Situbondo	1,400	840,000,000
		29	Bondowoso	1,500	900,000,000
		30	Lumajang	1,300	780,000,000
5.	Bali			1,500	900.000.000
		31	Bangli	500	300,000,000
		32	Klungkung	500	300,000,000
		33	Karangasem	500	300,000,000
6.	NTB			3,800	2.280.000.000
		34	Lombok Barat	1,800	1,080,000,000
		35	Lombok Tengah	1,500	900,000,000
		36	Lombok Timur	500	300,000,000
7.	NTT			2,000	1.200.000.000
		37	Sumba Tengah	500	300,000,000
		38	Sumba Barat Daya	1,000	600,000,000
		39	Timor Tengah Utara	500	300,000,000
8.	Sulawesi Selatan			3,400	2.040.000.000
		40	Toraja Utara	1,000	600,000,000
		41	Bantaeng	800	480,000,000
		42	Takalar	800	480,000,000
		43	Jeneponto	800	480,000,000
9.	Sumatera Utara			800	480,000,000
		44	Nias Selatan	800	480,000,000
10.	Sulawesi Barat			1,200	720.000.000
		45	Mamuju Utara	800	480,000,000
		46	Mamasa	400	240,000,000
11.	Lampung			800	480,000,000
		47	Lampung Selatan	800	480,000,000
12.	Kalimantan Barat			1,800	1.080.000.000
		48	Kayong Utara	800	480,000,000
		49	Kubu Raya	500	300,000,000
		50	Melawi	500	300,000,000

13.	Papua			11,700	7.020.000.000
		51	Nduga	1,800	1,080,000,000
		52	Intan Jaya	1,000	600,000,000
		53	Memberamo Tengah	2,000	1,200,000,000
		54	Lanny Jaya	1,000	600,000,000
		55	Tolikara	600	360,000,000
		56	Jayawijaya	1,200	720,000,000
		57	Sarmi	400	240,000,000
		58	Keerom	900	540,000,000
		59	Yalimo	500	300,000,000
		60	Dogiyai	500	300,000,000
		61	Paniai	500	300,000,000
		62	Puncak Jaya	800	480,000,000
		63	Yahukimo	500	300,000,000
14.	Papua Barat			1,500	900.000.000
		64	Teluk Wondama	500	300,000,000
		65	Manokwari	600	360,000,000
		66	Sorong Selatan	400	240,000,000
15.	Sumatera Selatan			1,000	600,000,000
		67	Banyuasin	1,000	600,000,000
16.	Kepulauan Riau			500	300,000,000
		68	Karimun	500	300,000,000
17.	Sulawesi Tengah			1,800	1.080.000.000
		69	Donggala	800	480,000,000
		70	Parigi Moutong	1,000	600,000,000
18.	Sulawesi Tenggara			500	300,000,000
		71	Konawe Kepulauan	500	300,000,000
19.	Pusat			7,770	4,662,000,000
Jumlah				77,370	46,422,000,000



## 5. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan Kesetaraan Paket A merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak atau pemuda yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SD/MI, sehingga memperoleh kesempatan atau akses untuk mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A dan pada gilirannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SD/MI.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di tingkat SD/MI</li> <li>• mendukung dan mensukseskan kebijakan nasional tentang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</li> <li>• meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan lulusan SD/MI</li> <li>• membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri</li> <li>• membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusannya dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan karier dalam pekerjaannya.</li> </ul>
3.	Sasaran	Warga masyarakat yang putus sekolah di tingkat SD/MI, prioritas usia sekolah yang berkeinginan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya melalui pendidikan kesetaraan Paket A.
4.	Persyaratan	<p>Penerima bantuan adalah lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket A seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, rumah pintar, komunitas rumah belajar (home schooling), dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya, dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>• memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>• memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>• rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang sebesar Rp. 970.000, dengan sasaran sebanyak 12.640 orang, dengan total anggaran sebesar Rp 12.260.800.000.

## 6. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan Kesetaraan Paket B merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak atau pemuda yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SMP/MTs, atau putus lanjut SD/MI, sehingga memperoleh kesempatan atau akses untuk mengikuti pendidikan kesetaraan Paket B dan pada gilirannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMP/MTs.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMP/MTs atau putus lanjut SD/MI</li> <li>• mendukung dan mensukseskan kebijakan nasional tentang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</li> <li>• meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan lulusan SMP/MTs</li> <li>• membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri</li> <li>• membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusannya dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan karier dalam pekerjaannya.</li> </ul>
3.	Sasaran	Warga masyarakat yang putus sekolah di tingkat SMP/MTs, atau putus lanjut SD/MI, prioritas usia sekolah yang berkeinginan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya melalui pendidikan kesetaraan Paket B.
4.	Persyaratan	<p>Penerima bantuan adalah lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket B seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, rumah pintar, komunitas rumah belajar (home schooling), dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya, dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>• memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>• memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>• rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang sebesar Rp. 1.400.000, dengan sasaran sebanyak 123.160 orang, dengan total anggaran sebesar Rp 172.424.000.000.

## 7. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan Kesetaraan Paket C merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak atau pemuda yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA, atau putus lanjut SMP/MTs, sehingga memperoleh kesempatan atau akses untuk mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C dan pada gilirannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMA/MA.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA atau putus lanjut SMP/MTs</li> <li>• mendukung dan mensukseskan kebijakan nasional tentang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</li> <li>• meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan lulusan SMA/MA</li> <li>• membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri</li> <li>• membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusannya dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan karier dalam pekerjaannya.</li> </ul>
3.	Sasaran	Warga masyarakat yang putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA, atau putus lanjut SMP/MTs, prioritas usia sekolah yang berkeinginan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya melalui pendidikan kesetaraan Paket C.
4.	Persyaratan	<p>Penerima bantuan adalah lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket C seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, rumah pintar, komunitas rumah belajar (home schooling), dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya, dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>• memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>• memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>• rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang sebesar Rp. 1.700.000, dengan sasaran sebanyak 92.500 orang, dengan total anggaran sebesar Rp 157.250.000.000.

## 8. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasional

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasional merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak atau pemuda yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA, atau putus lanjut SMP/MTs, sehingga memperoleh kesempatan atau akses untuk mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C dan pada gilirannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMA/SMK/MA.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA atau putus lanjut SMP/MTs</li> <li>• mendukung dan mensukseskan kebijakan nasional tentang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</li> <li>• meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan lulusan SMA/SMK/MA</li> <li>• membekali keterampilan yang berstandar KKNi yang dapat digunakan untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri</li> <li>• membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusannya dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan karier dalam pekerjaannya.</li> </ul>
3.	Sasaran	Warga masyarakat yang putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA, atau putus lanjut SMP/MTs, prioritas usia sekolah yang berkeinginan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya melalui pendidikan kesetaraan Paket C.
4.	Persyaratan	<p>Penerima bantuan adalah lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket C seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, rumah pintar, komunitas rumah belajar (home schooling), dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya, dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>• memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>• memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>• memiliki atau bermitra dengan lembaga pelatihan keterampilan yang berstandar KKNi untuk memberikan pelatihan kepada warga belajar</li> <li>• rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang sebesar Rp. 2.000.000, dengan sasaran sebanyak 11.000 orang, dengan total anggaran sebesar Rp 22.000.000.000.



## 9. Bantuan Penyelenggaraan PKH Perempuan Marginal

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Perempuan Marginal merupakan layanan pembelajaran dan pelatihan yang berpihak (affirmative action) terhadap upaya peningkatan kemampuan kecakapan hidup perempuan marginal, yang meliputi kecakapan personal, sosial, intelektual, dan vokasional yang berkaitan dengan upaya peningkatan pendidikan karakter dalam keluarga, kesehatan ibu dan anak, keterampilan mengolah dan mendayagunakan sumber daya lokal yang memberikan nilai tambah pada kemandirian ekonomi keluarga, dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kecakapan hidup (life skills) perempuan marginal, sehingga memiliki kemampuan berusaha secara bersama-sama atau mandiri untuk memperkuat jati diri dan kualitas hidup keluarganya.</li> <li>• Menumbuhkan kemandirian dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.</li> <li>• Menumbuhkan keinginan untuk terus belajar dan berkarya, melalui keterlibatannya dalam kelompok pembelajaran dan berusaha.</li> <li>• Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-haknya sebagai warga negara yang didasari atas pemahaman tentang HAM, Hak Anak, dan Hak Perempuan, serta alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM.</li> <li>• Membentuk sikap positif dalam menghadapi perbedaan peran sosial di masyarakat serta memecahkan masalah-masalah yang ditimbulkan melalui dialog dan musyawarah.</li> <li>• Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan berimbas pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya.</li> </ul>
3.	Sasaran	Perempuan (khususnya ibu rumah tangga) berusia produktif, prioritas berdomisili di perdesaan dari kalangan masyarakat kurang beruntung secara ekonomi dan rentan terhadap dampak resiko sosial yang diakibatkan oleh kondisi sosial kehidupan masyarakat kaum marginal, seperti komunitas petani, nelayan, calon atau tenaga kerja perempuan marginal, buruh migran, dan lain-lain.
4.	Persyaratan	<p>Penerima bantuan adalah lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program pendidikan kecakapan hidup perempuan marginal seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, rumah pintar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya, dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>• memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>• memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>• rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang sebesar Rp. 1.000.000, dengan sasaran sebanyak 10.000 orang, dengan total anggaran sebesar Rp 10.000.000.000.

## 10. Bantuan Pencanaan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM)

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Pencanaan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM) merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mensosialisasikan, menggerakkan, dan membangkitkan kesadaran para pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik pertama dan terutama dalam keluarga, yang diharapkan akan semakin menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilannya yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga yang berimbas pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik pertama dan terutama dalam keluarga</li> <li>• menyusun rencana aksi Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM) kabupaten/kota</li> <li>• meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan marginal yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga yang berimbas pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya</li> </ul>
3.	Sasaran	20 lokasi (desa tertinggal) yang berada di kabupaten/kota dengan prioritas pada daerah yang merupakan kantong-kantong tuna aksara dan memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan marginal.
4.	Persyaratan	<p>Penerima bantuan adalah pemerintah desa di salah satu kabupaten/kota, dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki potensi sumber daya dan produk keterampilan spesifik yang berpotensi berkembang secara ekonomi</li> <li>• telah terbentuk unit usaha kecil (produk khas) desa setempat</li> <li>• bersedia memberikan kontribusi dalam mendukung GPPM</li> <li>• mempunyai rekening bank atas nama pemerintah desa</li> <li>• rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per desa/lokasi (kabupaten) sebesar Rp. 130.000.000, dengan sasaran sebanyak 20 kabupaten, total biaya sebesar Rp 2.600.000.000.

## 11. Bantuan Pencanangan Gerakan Indonesia Membaca (GIM)

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Pencanangan Gerakan Indonesia Membaca (GIM) merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mensosialisasikan, menggerakkan, dan membangkitkan kesadaran para pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat untuk menumbuhkan kebiasaan membaca menuju pembudayaan membaca dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menumbuhkan minat dan mengembangkan budaya baca masyarakat</li> <li>menyusun rencana aksi Gerakan Indonesia Membaca (GIM) kabupaten/kota</li> <li>mensosialisasikan manfaat kebiasaan membaca menuju pembudayaan membaca dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.</li> </ul>
3.	Sasaran	31 kabupaten/kota dengan prioritas pada daerah yang merupakan kantong-kantong tuna aksara dan memiliki komitmen kuat untuk melakukan percepatan penuntasan tuna aksara.
4.	Persyaratan	Penerima bantuan adalah pemerintah kabupaten/kota, dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki minimal 10 unit TBM</li> <li>telah membentuk Forum TBM atau pegiat literasi</li> <li>bersedia memberikan kontribusi dalam mendukung GIM</li> <li>mempunyai rekening bank atas nama dinas pendidikan</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per kabupaten/kota sebesar Rp. 250.000.000, dengan sasaran sebanyak 31 kabupaten/kota, total biaya sebesar Rp 7.750.000.000.

## 12. Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra merupakan fasilitasi yang diberikan oleh Ditbindiktara kepada berbagai lembaga/organisasi mitra seperti: FK-PKBM, Forum SKB, Forum Rumpin, Forum TBM, Forum Tutor Pendidikan Keaksaraan, Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, agar semakin meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan manajemennya dalam memberikan layanan organisasi secara profesional kepada anggotanya.

2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan manajemen organisasi untuk memperkuat jati diri dan kualitas kelembagaan organisasinya.</li> <li>Meningkatkan kualitas administrasi kelembagaan organisasinya</li> <li>Meningkatkan pendataan anggota melalui pembuatan aplikasi profil keanggotaan organisasi.</li> </ul>
3.	Sasaran	Lembaga/organisasi mitra Ditbindiktara seperti: FK-PKBM, Forum SKB, Forum Rumpin, Forum TBM, Forum Tutor Pendidikan Keaksaraan, Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota,
4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki legalitas sebagai organisasi induk</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per lembaga sebesar Rp. 50.000.000, dengan sasaran sebanyak 50 lembaga, dengan total anggaran sebesar Rp 2.500.000.000.

## 13. Bantuan Penataan Kelembagaan Satuan PNF (PKBM dan Rumpin)

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Penataan Kelembagaan Satuan Pendidikan Nonformal (Satuan PNF) merupakan fasilitasi yang diberikan oleh Ditbindiktara kepada lembaga/organisasi mitra seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Rumah Pintar (Rumpin) di berbagai daerah di seluruh Indonesia, agar semakin meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan manajemennya dalam memberikan layanan pembelajaran dan pelatihan kepada warga belajarnya.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan manajemen organisasi untuk memperkuat eksistensi dan kualitas kelembagaan organisasinya.</li> <li>Meningkatkan kualitas administrasi kelembagaan organisasinya, termasuk membuat website lembaga, antara lain memuat aplikasi pendataan sasaran atau warga belajar binaannya, profil kelembagaan/organisasi, dan lain-lain</li> </ul>
3.	Sasaran	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Rumah Pintar (Rumpin) yang membutuhkan bantuan di berbagai daerah di seluruh Indonesia



4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki legalitas sebagai lembaga penyelenggara program Ditbindiktara</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per lembaga sebesar Rp. 100.000.000, dengan sasaran sebanyak 400 lembaga, dengan total anggaran sebesar Rp 40.000.000.000.

#### 14. Bantuan Sarana bagi TBM

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Sarana bagi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) merupakan fasilitasi yang diberikan oleh Ditbindiktara kepada berbagai lembaga TBM atau taman bacaan sejenisnya, agar semakin meningkatkan kemampuan manajemen dan administrasinya dalam memberikan layanan bahan bacaan kepada masyarakat organisasi binaanya.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan manajemen dan administrasi keorganisasian TBM.</li> <li>Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas layanan TBM.</li> <li>Meningkatkan jumlah dan kualitas bahan bacaan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.</li> </ul>
3.	Sasaran	Lembaga Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di seluruh Indonesia yang membutuhkannya
4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki perijinan yang terkait dengan TBM</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per lembaga sebesar Rp. 50.000.000, dengan sasaran sebanyak 120 lembaga, dengan total anggaran sebesar Rp 6.000.000.000.

#### 15. Bantuan TBM di SKB

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan TBM di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan fasilitasi yang diberikan oleh Ditbindiktara kepada berbagai Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), agar semakin meningkatkan kemampuan manajemen dan administrasinya dalam memberikan layanan bahan bacaan kepada masyarakat binaanya.

2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan manajemen dan administrasi keorganisasian TBM di SKB.</li> <li>Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas layanan TBM di SKB.</li> <li>Meningkatkan jumlah dan kualitas bahan bacaan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.</li> </ul>
3.	Sasaran	Lembaga TBM Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di seluruh Indonesia yang membutuhkan pendirian dan pengembangan TBM di SKB.
4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki perijinan yang terkait dengan SKB</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per lembaga sebesar Rp. 75.000.000, dengan sasaran sebanyak 40 lembaga, dengan total anggaran sebesar Rp 3.000.000.000.

#### 16. Bantuan Sarana bagi SKB

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Sarana bagi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan fasilitasi yang diberikan oleh Ditbindiktara kepada berbagai lembaga SKB, agar semakin meningkatkan kemampuan manajemen dan administrasinya dalam memberikan layanan pembelajaran dan pelatihan kepada warga masyarakat binaannya.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan manajemen dan administrasi keorganisasian SKB.</li> <li>Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas program pembelajaran dan pelatihan di SKB.</li> </ul>
3.	Sasaran	Lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di seluruh Indonesia yang membutuhkannya.
4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki perijinan yang terkait dengan SKB</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per lembaga sebesar Rp. 125.000.000, dengan sasaran sebanyak 30 lembaga, dengan total anggaran sebesar Rp 3.750.000.000.

## 17. Bantuan Pembangunan (Revitalisasi) SKB

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Pembangunan (Revitalisasi) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan fasilitasi yang diberikan oleh Ditbindiktara kepada berbagai lembaga SKB yang telah berfungsi sebagai satuan pendidikan nonformal, agar semakin meningkatkan kemampuan manajemen dan administrasinya dalam memberikan layanan pembelajaran dan pelatihan prima kepada warga masyarakat binaannya.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan manajemen dan administrasi keorganisasian SKB.</li> <li>• Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas program pembelajaran dan pelatihan di SKB</li> <li>• Meningkatkan kualitas layanan program pembelajaran dan pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.</li> </ul>
3.	Sasaran	Lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di seluruh Indonesia yang telah difungsikan sebagai satuan pendidikan nonformal berdasarkan Peraturan Bupati atau Perda.
4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki perijinan dan peraturan bupati atau Perda tentang SKB sebagai satuan PNF</li> <li>• memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>• memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>• rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per lembaga sebesar Rp. 2.600.000.000 (maksimal memperoleh 9 paket bantuan @ Rp. 300.000.000), dengan sasaran sebanyak 2 lembaga (186 paket), dengan total anggaran sebesar Rp 57.200.000.000.

## 18. Bantuan Pendampingan Komunitas Rumah Belajar (Homeschooling)

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Pendampingan Komunitas Rumah Belajar (Homeschooling) merupakan fasilitasi yang diberikan oleh Ditbindiktara kepada assosiasi rumah belajar, agar memiliki kemampuan dalam rmengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik yang dilakukan oleh pengelola rumah belajar yang ada dalam wilayah binaannya.

2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan manajemen organisasi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengkoordinasikan pelaksana-naan pembelajaran</li> <li>• Meningkatkan kualitas administrasi kelembagaan dan organisasi pembelajaran</li> <li>• Meningkatkan pendataan anggota melalui pembuatan aplikasi profil keanggotaan organisasi rumah belajar.</li> </ul>
3.	Sasaran	Lembaga Komunitas Rumah Belajar (Homeschooling) di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.
4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki legalitas sebagai organisasi induk</li> <li>• memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>• rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per lembaga sebesar Rp. 35.000.000, dengan sasaran sebanyak 35 lembaga, dengan total anggaran sebesar Rp 1.225.000.000.

## 19. Bantuan Pemberdayaan Desa Vokasi

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Pemberdayaan Desa Vokasi merupakan fasilitasi yang diberikan oleh Ditbindiktara kepada berbagai desa di beberapa daerah yang dinilai memiliki potensi sumber daya dan keterampilan yang khas atau unik, agar desa memiliki peluang untuk berkembang secara ekonomi menuju desa yang maju dan sejahtera.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap warga desa dalam mengelola usaha kecil secara mandiri atau kelompok</li> <li>• Membangun kebersamaan antara sesama warga desa dalam mengejar keteringgalan dalam berbagai aspek kehidupan untuk perbaikan dan kemajuan perekonomian desa.</li> <li>• Mengembangkan perekonomian desa yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga desa setempat.</li> </ul>
3.	Sasaran	Sebanyak 20 desa yang memiliki sumber daya atau potensi secara ekonomi untuk berkembang, yang berada di 20 daerah.



4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa memiliki unit usaha yang potensial untuk berkembang</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga desa</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per desa sebesar Rp. 200.000.000, dengan sasaran sebanyak 20 desa, dengan total anggaran sebesar Rp 4.000.000.000.

## 20. Bantuan Pemberdayaan Kampung Literasi

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Pemberdayaan Kampung Literasi merupakan fasilitasi yang diberikan oleh Ditbindiktara kepada berbagai desa yang selama ini sebagai lokasi pembelajaran pendidikan keaksaraan (kantong tuna aksara), yang berada di beberapa daerah, memiliki potensi sumber daya dan peluang untuk berkembang secara ekonomi.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap warga desa dalam berbagai aspek kehidupan.</li> <li>Membangun kebersamaan antara sesama warga desa dalam mengejar ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan untuk perbaikan dan kemajuan perekonomian desa.</li> <li>Mengembangkan perekonomian desa yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga desa setempat.</li> </ul>
3.	Sasaran	Sebanyak 31 desa yang berada di beberapa daerah, selama ini dijadikan sebagai basis pembelajaran pendidikan keaksaraan, memiliki sumber daya atau potensi secara ekonomi untuk berkembang.
4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa memiliki unit usaha yang potensial untuk berkembang</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga desa</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per desa sebesar Rp. 140.000.000, dengan sasaran sebanyak 31 desa, dengan total anggaran sebesar Rp 4.340.000.000.

## 21. Bantuan Tanggap Darurat Bencana

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Tanggap Darurat Bencana merupakan fasilitasi yang diberikan oleh Ditbindiktara kepada berbagai daerah yang dilanda bencana alam, untuk mengurangi beban berat yang dihadapi masyarakat dalam kondisi darurat bencana.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu memulihkan beban hidup yang dihadapi warga masyarakat dalam kondisi darurat bencana alam yang terjadi secara tidak terduga.</li> <li>Membangun kebersamaan dan kepedulian antara sesama warga masyarakat yang mengalami bencana alam, agar dapat mengurangi beban hidup yang berat dialami oleh setiap keluarga dalam wilayah bencana.</li> </ul>
3.	Sasaran	Sebanyak 18 paket bantuan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mendesak warga masyarakat yang mengalami bencana.
4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa yang mengalami bencana alam, yang sangat memerlukan bantuan dalam berbagai hal dan dalam waktu yang cepat</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per paket sebesar Rp. 100.000.000, dengan sasaran sebanyak 18 paket, dengan total anggaran sebesar Rp 1.800.000.000.

## BAB 4

# PROGRAM TEROBOSAN



**"Untuk mencegah kekambuhan  
keniraksaraan penduduk dewasa, sekaligus  
untuk meningkatkan budaya baca program  
keaksaraan pun disinergikan dengan  
perluasan akses terhadap bahan bacaan".**

### A. Gerakan Indonesia Membaca (GIM)

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang cepat dalam segala bidang kehidupan, menuntut orientasi program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan ke depan dapat lebih berperan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan program sesuai kebutuhan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan keberaksaraan penduduknya yang pada akhirnya bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan peran dan fungsi pendidikan keaksaraan dan kesetaraan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat agar mampu mengenali dan memahami diri dan lingkungannya, dan mempergunakan pemahamannya itu untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Kemampuan untuk memahami ini diawali dengan kemampuan "membaca" dan mencermati atau mempelajari fenomena yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian diharapkan melalui pelaksanaan program pendidikan keaksaraan diharapkan dapat mewujudkan kebiasaan dan kegemaran membaca, dan melalui kebiasaan dan kegemaran membaca kemudian tumbuh budaya belajar dan budaya membaca, yang pada gilirannya diharapkan mewujudkan masyarakat yang cerdas intelektual, cerdas emosional dan cerdas spiritual.

Kenyataan menunjukkan upaya mewujudkan masyarakat gemar membaca, khususnya bagi warga masyarakat paska keaksaraan dasar, sering terkendala karena terbatasnya bahan bacaan dan sarana perpustakaan atau taman bacaan masyarakat di lokasi paska program pendidikan keaksaraan dasar. Akibatnya banyak diantara warga masyarakat paska keaksaraan



dasar yang telah melek aksara kemudian tuna aksara kembali karena tidak adanya pembiasaan membaca atau tidak tersedianya program lanjutan bagi mereka untuk mempertahankan melek aksara yang telah mereka raih sebelumnya pada penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar.

Keberhasilan pemerintah dan masyarakat dalam memberantas buta aksara dan meningkatkan jumlah penduduk Indonesia yang memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung perlu terus dibina dan ditingkatkan, khususnya bagi mereka yang merupakan aksarawan baru agar terus belajar melalui pembiasaan membaca dan kegemaran membaca.



Program pengembangan budaya baca masyarakat pada hakekatnya bertujuan untuk:

1. mendorong berkembangnya minat baca dalam rangka membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju, dan mandiri.
2. Membina aksarawan baru dalam upaya melestarikan dan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
3. Membangkitkan dan meningkatkan minat baca masyarakat sebagai tahapan terwujudnya budaya baca.
4. Menyediakan sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk mendorong terciptanya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca masyarakat, antara lain disebabkan karena:

1. Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan belum menjangkau sampai lapisan masyarakat terbawah, mengakibatkan masyarakat lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan sandang, papan, dan pangan daripada membaca dan belajar.

2. Arus globalisasi dan persaingan antar bangsa saat ini, berdampak pada Indonesia yang cenderung menjadi konsumen produk negara lain, sehingga daya saing semakin melemah dan memberikan dampak negatif terhadap pengembangan budaya baca dan belajar.
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat dan pesat, cenderung memperlemah minat dan kebiasaan membaca.

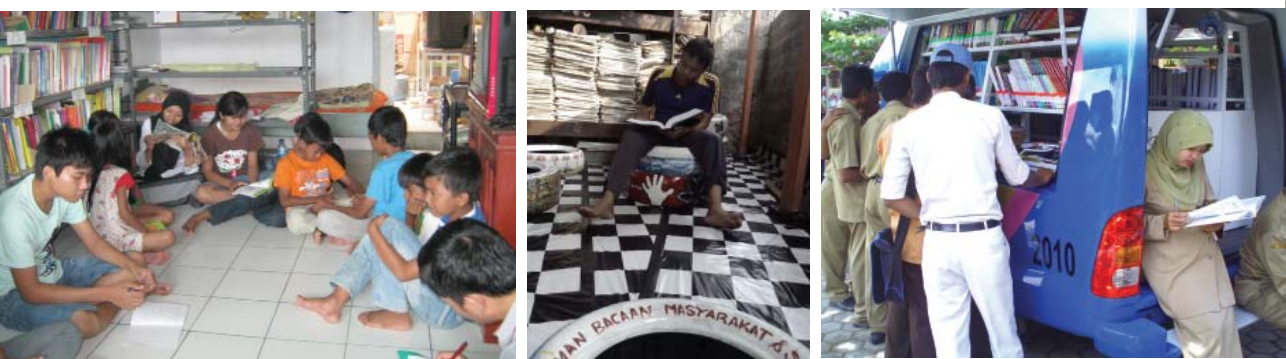
Membaca merupakan modal utama dan pertama sebagai pintu masuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan keterampilan dan produktifitas. Namun kenyataannya, jika dibanding dengan negara-negara tetangga (apalagi dengan negara maju), kesadaran membaca atau tingkat rata-rata lama dan kedalaman membaca masyarakat Indonesia, masih sangat rendah (bahkan terendah di ASEAN ?).

Pemerintah terus berupaya mendorong masyarakat agar gemar belajar dan membaca menuju masyarakat yang berbudaya membaca, maka dibutuhkan berbagai kondisi yang mendukung, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:





- Kebijakan pemerintah yang proaktif memasyarakatkan gemar membaca dan belajar menuju masyarakat yang berbudaya membaca.
- Menyediakan akses TBM yang luas dan merata sehingga terjangkau masyarakat dalam rangka pemenuhan bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan.
- Pemenuhan kebutuhan bahan-bahan bacaan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mudah diperoleh di toko buku, perpustakaan dan TBM di wilayah pemukiman penduduk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
- Keluarga yang memiliki perpustakaan dan kegiatan membaca secara bersama, perlu dikembangkan sehingga menjadi salah satu tradisi dalam keluarga.
- Meningkatnya jumlah dan kualitas perpustakaan dan TBM yang menyenangkan dan didukung dengan pelayanan yang prima, memotivasi pengunjung/pengguna untuk semakin gemar membaca dan belajar.



Agar pelaksanaan program pengembangan budaya baca masyarakat melalui layanan TBM dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu dukungan melalui:

- 1) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai acuan pelaksanaan program
- 2) peningkatan kapasitas pengelola TBM
- 3) kegiatan promosi, unjuk prestasi, dan penyelenggaraan lomba-lomba yang mendorong tumbuhnya minat baca, serta melakukan koordinasi dan inovasi pelaksanaan program



- 4) pemetaan sasaran untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan masing-masing TBM
- 5) Partisipasi aktif dari seluruh lembaga/instansi pemerintah dan swasta (penerbit) serta masyarakat luas untuk mendonasikan buku-buku kepada perpustakaan dan TBM
- 6) melakukan sosialisasi yang intensif kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah dan pelaku pendidikan formal dan pendidikan nonformal serta masyarakat luas di seluruh Indonesia tentang pentingnya memupuk dan mengembangkan minat baca menuju budaya baca.

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sejak tahun 2015 telah melakukan kegiatan dalam rangka Gerakan Indonesia Membaca di 5 daerah, yaitu: Gerakan Parigi Moutong Membaca, Gerakan Jayapura Membaca, Gerakan Pasuruan Membaca, Gerakan Karawang Membaca, dan Gerakan Jember Membaca. Pada tahun 2016, Ditbindiktara akan mengembangkan kegiatan gerakan membaca ini di 31 daerah di Indonesia.



## B. Gerakan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM)

Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu program yang akan dikembangkan oleh Ditbindiktara yang ditujukan bagi perempuan khususnya ibu rumah tangga, prioritas berusia muda (antara 15 - 45 tahun) yang selama ini termarginalkan (miskin dan berpendidikan rendah) di perdesaan. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik pertama dan terutama dalam keluarga, yang diharapkan akan semakin menumbuhkan kesadaran untuk mendorong anak-anaknya bersekolah dan meningkatkan pendidikan sampai setinggi-tingginya.

Kenyataan menunjukkan sekitar 65% warga belajar pendidikan keaksaraan dasar (tuna aksara) adalah perempuan, dan umumnya mereka masih berusia produktif. Hal ini merupakan tantangan dalam menyiapkan keluarga bahagia, harmonis dan sejahtera, sementara mereka hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Untuk itulah program pendidikan pemberdayaan perempuan yang dikemas dalam Gerakan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM) sangat diperlukan dengan pendekatan pembelajaran dan pelatihan keterampilan praktis yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas/kelompok masyarakat setempat, dengan penekanan pada kecakapan personal, sosial, dan vokasional.



Pada tahun 2016, Ditbindiktara akan mengembangkan program afirmasi pendidikan pemberdayaan perempuan dikemas dalam Gerakan Pemberdayaan Perempuan Marginal di beberapa daerah khususnya di wilayah perdesaan, pesisir, dan tertinggal.

Pada hakekatnya program pendidikan pemberdayaan perempuan yang dikemas melalui kegiatan GPPM ini, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kecakapan hidup (life skills) perempuan marginal, sehingga memiliki kemampuan berusaha secara bersama-sama atau mandiri untuk memperkuat jati diri dan kualitas hidup keluarganya.
2. Menumbuhkan kemandirian dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.
3. Menumbuhkan keinginan untuk terus belajar dan berkarya, melalui keterlibatannya dalam kelompok pembelajaran dan berusaha.
4. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-haknya sebagai warga negara yang didasari atas pemahaman tentang HAM, Hak Anak, dan Hak Perempuan, serta alternatif-alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM.
5. Membentuk sikap positif dalam menghadapi perbedaan peran sosial di masyarakat serta memecahkan masalah-masalah yang ditimbulkan melalui dialog dan musyawarah.
6. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan berimbas pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya.

Keberhasilan pembangunan di Indonesia sangat bergantung pada kualitas dan peranserta aktif laki-laki dan perempuan secara seimbang.

Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia menjamin kesamaan peran antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi secara riil perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Perempuan belum mendapatkan kesempatan yang optimal dalam melaksanakan peran, akses, kontrol serta manfaat dalam pembangunan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh

pendekatan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender, atau malah memiliki kecenderungan untuk turut berkontribusi dalam melanggengkan kesenjangan gender (gender gap). Pendidikan perempuan adalah suatu transformasi pengetahuan, pengalaman, sikap, perilaku, nilai, dan budaya pada kaum perempuan agar dapat mempertahankan kehidupan, memahami keseimbangan antara hak dan kewajibannya, meningkatkan harkat dan martabat dalam pembangunan dan dapat memiliki daya saing global melalui pembelajaran yang mengacu pada 4 (empat) pilar belajar dari UNESCO, yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*.

Untuk mencapai tujuan di atas, Ditbindiktara juga akan mengembangkan program pendidikan pemberdayaan perempuan yang diklasifikasi ke dalam: (1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan melalui pendidikan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, menghapuskan perdagangan (*trafficking*) perempuan, dan menghapuskan eksploitasi seksual komersil perempuan; (2) penurunan kesenjangan gender dalam bidang pendidikan; (3) penyempurnakan sistem perundang-undangan yang bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan; (4) penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan; dan (5) pengembangan sistem data dan informasi pendidikan perempuan.

### C. Akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal, perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaannya sehingga memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan berbagai program secara optimal. Pertumbuhan jumlah PKBM dalam sepuluh tahun terakhir, di satu sisi dinilai sangat menggembirakan dan harus diapresiasi, karena dipandang semakin tingginya partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam menyelenggarakan program pendidikan nonformal khususnya program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Namun di sisi lain, pertumbuhan jumlah tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga program pendidikan nonformal yang diselenggarakan terkesan dilaksanakan seadanya tanpa didukung dengan kualitas program.

**Tabel 10**  
**Data Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) per Desember 2015**

No	Provinsi	Jumlah PKBM	Jumlah PKBM		
			Ber-NILEM	Ber-NPSN	Terakreditasi
1	Aceh	323	181	149	-
2	Sumatera Utara	427	427	395	-
3	Sumatera Barat	293	232	216	5
4	Riau	221	157	139	1
5	Jambi	183	139	117	1
6	Sumatera Selatan	328	207	202	-
7	Bengkulu	535	307	292	-
8	Lampung	274	247	189	1
9	Kep. Bangka Belitung	68	68	55	-
10	Kepulauan Riau	139	139	131	-
11	DKI Jakarta	300	300	268	8
12	Jawa Barat	1.711	1.711	1.575	4
13	Jawa Tengah	950	950	779	23
14	DI Yogyakarta	340	340	297	1
15	Jawa Timur	1.320	1.320	1.171	1
16	Banten	293	273	244	5
17	Bali	91	91	79	1
18	Nusa Tenggara Barat	431	394	361	-



No	Provinsi	Jumlah PKBM	Jumlah PKBM		
			Ber-NILEM	Ber-NPSN	Terakreditasi
19	Nusa Tenggara Timur	134	134	88	-
20	Kalimantan Barat	297	164	116	-
21	Kalimantan Tengah	143	105	88	-
22	Kalimantan Selatan	185	185	163	1
23	Kalimantan Timur	183	183	158	3
24	Kalimantan Utara	63	63	56	-
25	Sulawesi Utara	126	126	79	-
26	Sulawesi Tengah	149	86	83	-
27	Sulawesi Selatan	657	479	432	-
28	Sulawesi Tenggara	324	192	151	-
29	Gorontalo	117	76	72	-
30	Sulawesi Barat	370	161	142	-
31	Maluku	61	51	43	-
32	Maluku Utara	140	56	53	-
33	Papua	263	263	193	-
34	Papua Barat	60	34	34	-
35	Luar Negeri	1		1	-
Jumlah		11.500	9.841	8.611	55

Dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan PKBM, Ditbindiktara dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan beberapa langkah yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PKBM, antara lain:

1. Mengintensifkan pemberian Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM, sehingga dapat diketahui keberadaan setiap PKBM di seluruh Indonesia.

2. Membuat aplikasi pendataan PKBM untuk mengetahui profil setiap PKBM di seluruh Indonesia.
3. Membuat standar minimal PKBM, agar masyarakat yang ingin mendirikan PKBM harus mengacu pada standar nasional pendirian PKBM.
4. Melakukan penilaian kinerja terhadap setiap PKBM sesuai ketentuan yang diatur oleh Diibindikmas.
5. Merumuskan dan menyusun aplikasi Nomor Pokok Satuan PNF Nasional (NPSN), agar setiap PKBM dapat memiliki NPSN yang bekerjasama dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Berdasarkan NPSN yang telah dimiliki oleh setiap PKBM, kemudian dilakukan pemberian Akreditasi terhadap PKBM yang memenuhi syarat.



Seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengalihkan pembinaan program pendidikan kesetaraan sejak tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Ditbindiktara Ditjen PAUD dan Dikmas, maka PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal dan sebagai penyelenggara program pendidikan kesetaraan harus terakreditasi.

Oleh karena itu, pada tahun 2016 akan diintensifkan pemberian akreditasi kepada setiap PKBM yang memenuhi syarat di seluruh Indonesia.

#### D. Revitalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Sejak otonomi daerah yang mulai diberlakukan di awal tahun 2000 an, status SKB sebagai UPT pusat (Ditjen PLSPD) yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal di daerah, diserahkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten/kota dan beralih fungsi sebagai UPT daerah.



Berkaitan dengan peralihan program pendidikan kesetaraan kepada Ditbindiktara sejak tahun 2015, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa umumnya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan. Bahkan hasil pengamatan dan evaluasi program di daerah menunjukkan bahwa SKB selama ini dipandang lebih efektif menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan jika dibanding dengan lembaga/organisasi lain. Namun ditemukan kendala tentang status SKB sebagai UPTD milik daerah di bawah binaan Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang diposisikan sebagai kantor. Sesuai tugas dan fungsinya, SKB tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan nonformal termasuk pendidikan kesetaraan, karena statusnya bukan sebagai satuan pendidikan nonformal.

Oleh karena itu, berdasarkan kebijakan pimpinan Ditjen Paud dan Dikmas mulai tahun 2016 Ditbindiktara akan melakukan revitalisasi terhadap SKB yang diawali dengan surat edaran Dirjen Paud dan Dikmas kepada seluruh bupati/walikota di seluruh Indonesia pada pertengahan tahun 2015 tentang rencana revitalisasi SKB. Kebijakan revitalisasi SKB tidak dimaksudkan untuk menarik kembali status SKB menjadi UPT pusat atau mengganti nomenklatur SKB, tetapi dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi kelembagaan SKB sebagai satuan pendidikan nonformal.

**Tabel 11**  
**Data Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) per Desember 2015**

No	Nama UPT Pusat	Provinsi	Jumlah UPTD Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah SKB di Kab/Kota	Jumlah UPTD Prov dan Kab/ Kota
1	BP-PAUDNI Reg. I Medan	Aceh	1	23	18	19
		Sumatera Utara	0	33	20	20
		Sumatera Barat	1	19	20	21
		Riau	1	12	8	9
		Jambi	1	11	9	10
		Sumatera Selatan	1	15	9	10
		Kepulauan Riau	0	7	3	3
Jumlah			5	120	87	92
2	PP-PAUDNI Reg. I Bandung	Bengkulu	1	10	10	11
		Kep. Bangka Belitung	0	7	5	5
		DKI Jakarta	1	6	0	1
		Jawa Barat	0	26	25	25
		Banten	1	8	6	7
Jumlah			3	57	46	49
3	PP-PAUDNI Reg. II Semarang	Jawa Tengah	0	35	41	41
		Lampung	1	14	8	9
		D.I Yogyakarta	1	5	5	6
Jumlah			2	54	54	56
4	BP-PAUDNI Reg. II Surabaya	Jawa Timur	0	38	18	18
		Nusa Tenggara Timur	1	21	22	23
Jumlah			1	59	40	41



No	Nama UPT Pusat	Provinsi	Jumlah UPTD Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah SKB di Kab/Kota	Jumlah UPTD Prov dan Kab/ Kota
5	BP-PAUDNI Reg. III Makassar	Sulawesi Utara	1	15	22	23
		Sulawesi Tengah	1	11	12	13
		Sulawesi Selatan	1	24	24	25
		Sulawesi Tenggara	1	12	16	17
		Gorontalo	1	6	10	11
		Sulawesi Barat	1	5	5	6
Jumlah			6	73	89	95
6	BP-PAUDNI Reg. IV Banjar Baru	Kalimantan Barat	1	14	9	10
		Kalimantan Tengah	1	14	6	7
		Kalimantan Selatan	1	13	13	13
		Kalimantan Timur	1	14	13	14
Jumlah			4	55	41	44
7	BP-PAUDNI Reg. V Mataram	Bali	1	9	8	9
		Nusa Tenggara Barat	1	10	10	11
Jumlah			2	19	18	20
8	BP-PAUDNI Reg. VI Sentani Papua	Maluku	1	11	6	7
		Maluku Utara	1	9	8	9
		Papua Barat	0	11	7	7
		Papua	1	29	13	14
Jumlah			3	60	34	37
Total			26	497	409	434

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dapat diwujudkan dengan adanya revitalisasi SKB ini, antara lain:

1. Status kelembagaan SKB menjadi lebih jelas, yaitu satuan pendidikan nonformal yang memiliki kewenangan menyelenggarakan program pendidikan nonformal, diantaranya program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
2. Sumber pendanaan untuk membiayai berbagai penyelenggaraan program di SKB menjadi lebih jelas dan pasti, yaitu dapat melalui APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota (sharing pendanaan).
3. Status kelembagaan dan warga belajar (peserta didik) SKB terdaftar dalam Dapodik Kemendikbud, sehingga diakui keabsahan program dan administrasi pembelajarannya.
4. Status kepegawaianya menjadi lebih jelas.
5. Kelembagaan SKB dapat diarahkan menjadi satuan pendidikan nonformal unggulan atau rujukan di tingkat kabupaten/kota.

Bagi SKB yang telah diusulkan oleh bupati/walikota menjadi satuan pendidikan nonformal, akan diprioritaskan mendapat bantuan pembangunan sarana dan prasarana serta bantuan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dari Ditbindiktara pada tahun 2016.



## BAB 5 PENUTUP



"Pendidikan Keaksaraan dan Kesenakaraan merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan diwujudkan secara terpadu dan terintegrasi dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat".

Demikian Profil Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesenakaraan ini disajikan secara singkat dengan maksud agar dapat digunakan oleh semua pihak yang terkait baik di pusat maupun daerah, untuk mengenal dan memahami lebih jauh tentang keberadaan kelembagaan dan keorganisasian Ditbindikmas serta program-program pemberdayaan masyarakat yang dibina dan dikembangkan, khususnya para lembaga/ organisasi masyarakat sebagai mitra penyelenggara dan pengelola program di daerah. Melalui buku ini, diharapkan agar para pemangku kepentingan dapat memanfaatkannya sebagai alat sosialisasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas, sehingga program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dapat dirasakan kebermanfaatan dan kebermaknaannya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, bangsa dan negara.

Kami menyadari masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki dalam buku ini, demikian juga tentang manajemen pengelolaan dan pembinaan program pendidikan masyarakat di pusat dan daerah. Untuk itu, kami sangat menghargai saran, masukan, dan kritik membangun dari semua pihak yang memiliki kepedulian untuk memperbaiki dan mengembangkan program pendidikan masyarakat pada masa-masa yang akan datang.

Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesenakaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alamat: Kompleks Kemendikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725575, Faksimile (021) 5725039, Email: [program.paudni@kemdikbud.go.id](mailto:program.paudni@kemdikbud.go.id) Website: [www.paudni.kemdiknas.go.id/dikmas](http://www.paudni.kemdiknas.go.id/dikmas)



# DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2009. Survey Sosial Ekonomi Nasional 2005-2009. Jakarta: BPS*
- Bappenas. 2010. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010. Jakarta: Bappenas*
- Bappenas. 2010. Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia. Jakarta: Bappenas*
- Bokova, Irina. 2010. Address by Irina Bokova, Director-General of UNESCO on the Occasion of the E-9 Ministerial Review Meeting on Education for All. Abuja: UNESCO.*
- Bokova, Irina. 2010. Address by Irina Bokova, Director-General of UNESCO on the Occasion of International Literacy Day September 8, 2010. New York: UNESCO.*
- Kemdiknas. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2009-2014.*
- Kemdiknas. 2010. Pendidikan Keaksaraan: Memberdayakan Masyarakat Marjinal. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.*
- Kemdiknas. 2009. Improving Literacy for All. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.*
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003.*
- Pemerintah Indonesia. 2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009.*
- Pusat Statistik Pendidikan, Kemdiknas. 2010. Data Keniraksaraan Berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kementerian Pendidikan Nasional.*
- Yulaelawati. 2010. Keaksaraan Prasyarat Bagi Semua Orang dalam Jurnal Akrab! Edisi 1 Keaksaraan untuk Semua. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.*
- UNESCO. 2010. Education for All Global Monitoring Report 2010. Oxford University Press.*

# Profil Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan



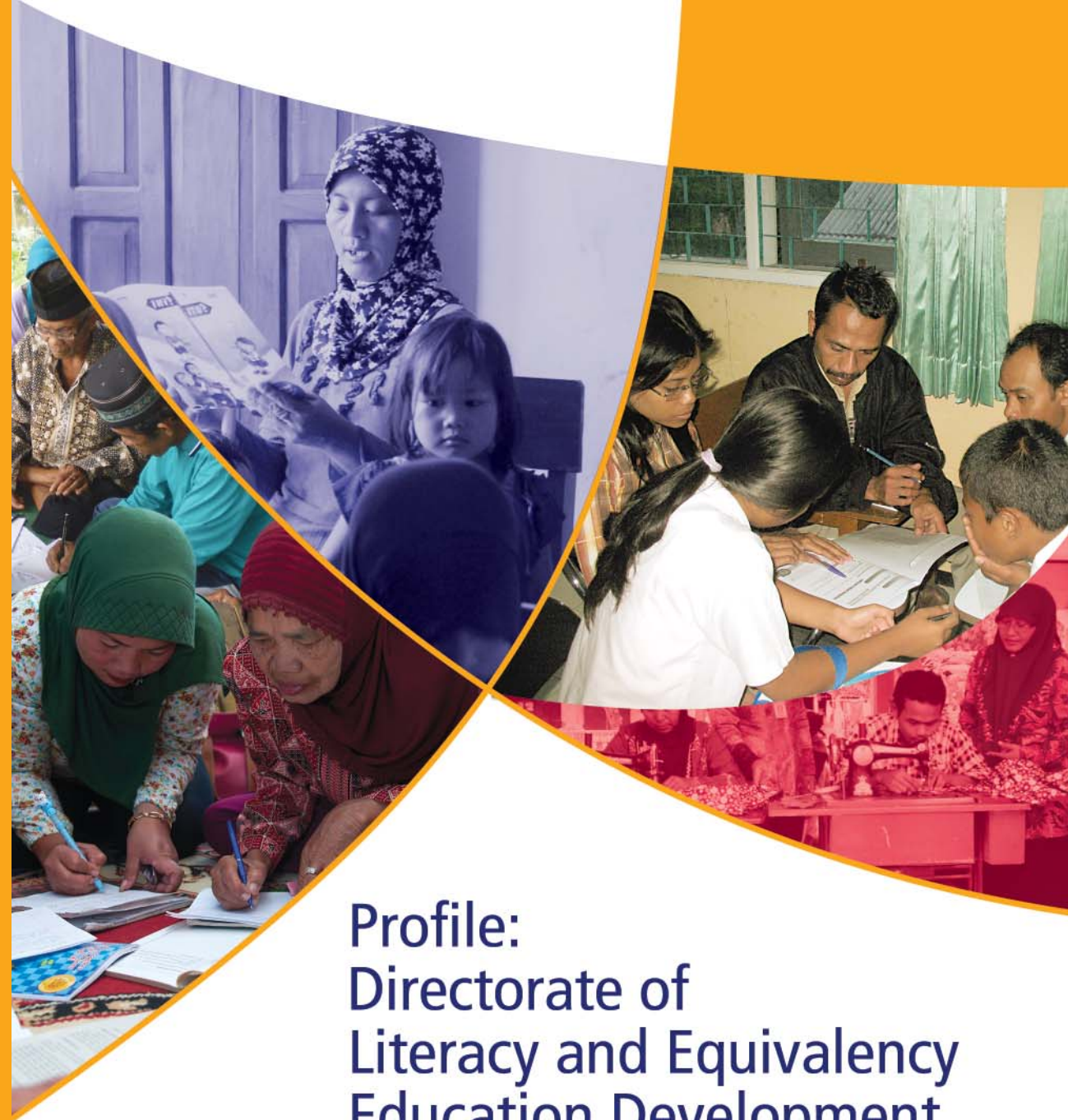
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan  
Tahun 2016



Profil: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan



Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia  
Directorate General of Early Childhood and Community Education  
Directorate of Literacy and Equivalency Education Development  
2016



## Profile: Directorate of Literacy and Equivalency Education Development





Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia  
Directorate General of Early Childhood and Community Education  
Directorate of Literacy and Equivalency Education Development  
2016

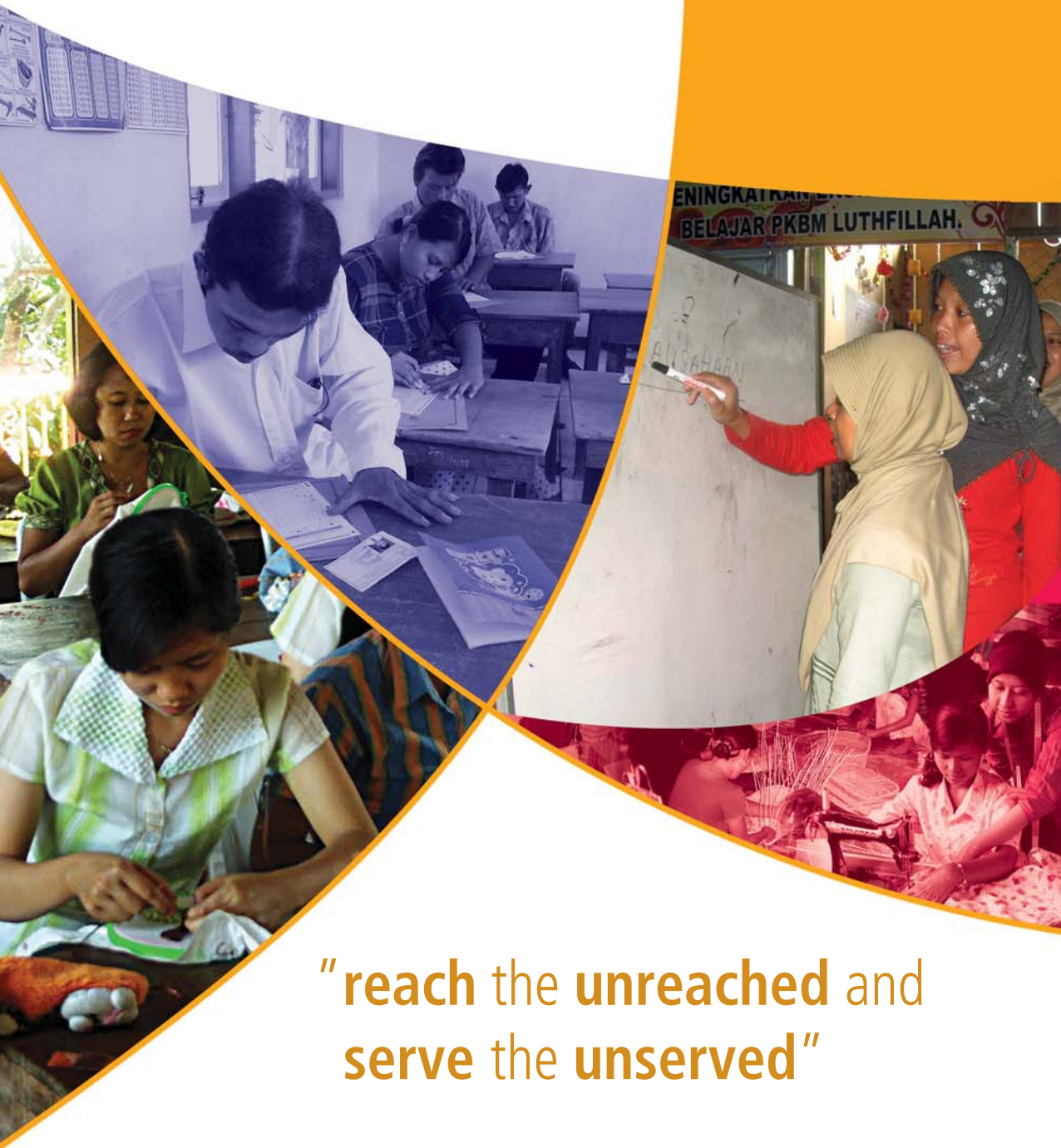


# Profile: Directorate of Literacy and Equivalency Education Development



# FOREWORD

Director of Literacy and Equivalency Education Development



**"reach the unreached and serve the unserved"**

Universal Declaration of Human Rights affirms that every person has the rights to receive decent and quality education regardless of his/her age, gender, race, class or religion. Education is one of the fulfillments of human rights to develop personality and character which respect freedom of mind, and cultivate and promote mutual understanding, tolerance, friendship, and peace.

The realization of an empowered, literate, intelligent, and independent community through adult education could be achieved through non-formal education. In the context of lifelong learning, non-formal education is dedicated to "reach the unreached" and "serve the unserved".



**Dr. Erman Syamsuddin**  
Director of Literacy and  
Equivalency Education Development

To fulfill the rights to adult education, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development, Directorate General of Early Childhood and Community Education, Ministry of Education and Culture, provides non-formal education services that are expected to encourage the growth of lifelong learning community. The fulfillment of citizens' rights to adult education is expected to reach the whole community. Therefore, non-formal education services are prioritized to reach specific segments of the community due to marginalization (geographic, socio-economic, gender, ethnicity and culture, as well as legal issues and social diseases). The services implemented are namely: basic literacy education, self-entrepreneurship literacy, reading culture development, equivalency education (Package A, B and C), continuing education (women empowerment and education), and non-formal education institutional strengthening.



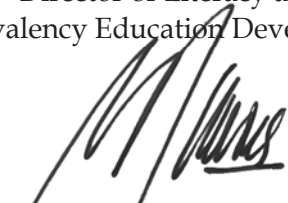
The Programs and activities of Directorate of Literacy and Equivalency Education Development aim to increase: (i) the availability and affordability of literacy and equivalency education services for youth and adults who dropped out school to support the 12-year compulsory education; (ii) the provision of Community Reading Centers to increase public awareness and interest in reading; (iii) the provision of continuing education (women empowerment education); (iv) the provision of literacy and equivalency education facilities and infrastructures; and, (v) the institutionalization of non-formal education institutions, such as Community Learning Centers (CLC), Collective Learning Halls (SKB), Smart Houses (Rumpin), and others. These activities are intended to meet growing public demand for non-formal education services.

To ensure the quality control of literacy education services, one of the challenges faced by Directorate of Literacy and Equivalency Education Development is to increase adult literacy rate that does not discriminate any party, to guarantee the assurance of obtaining educational services for all.

This “Organizational Profile of Directorate of Literacy and Equivalency Education Development” is published to provide a comprehensive overview and explanation on the existence and development of Directorate of Literacy and Equivalency Education Development in providing non-formal education programs. This book is expected to be one of the socialization media for all parties, stakeholders, institutions/organizations at national and local levels, and the community, to better understand the programs fostered and developed by Directorate of Literacy and Equivalency Education Development.

Finally, I would like to deliver my sincere appreciation to various parties for their contribution and role in preparing this book. I really hope that this book which is written with full sincerity and commitment would be useful for all of us, with the hope that God gives His grace and guidance to all of us. Amen.

Jakarta, January 2016  
Director of Literacy and  
Equivalency Education Development,



Dr. Erman Syamsuddin  
NIP. 195703041983031015

# CONTENTS

Foreword .....	iii
Contents .....	v
Chapter I. Introduction.....	1
A. Overview of Literacy and Equivalency Education .....	1
B. Strategic Role of Literacy and Equivalency Education .....	3
Chapter II. Organization and Administration .....	9
A. Vision, Mission and Quality Management.....	9
B. Organizational Structure .....	12
C. Duties and Functions.....	12
D. Workforce.....	18
Chapter III. Policies and Programs .....	31
A. Policies .....	31
B. Program Development Strategies .....	34
C. Programs and Activities.....	41
D. Competitive Funding and Financing .....	66
E. Operational Aid Mechanism 2016 .....	69
Chapter IV. Current Breakthroughs .....	93
A. Indonesia Reading Movement (GIM) .....	93
B. Marginalized Women Empowerment Movement (GPPM) .....	97
C. Community Learning Center Accreditation.....	100
D. Revitalization of Collective Learning Hall (SKB) .....	104
Chapter V. Closing .....	109

# CHAPTER I

## INTRODUCTION



"Non-formal education is organized for citizens who require educational services as a replacement, addition, and/or complement to formal education in the context of lifelong learning".

### A. Overview of Literacy and Equivalency Education

Since the beginning of Indonesian independence, community education programs have been playing an important and strategic role in developing education in the country. The founding fathers of Indonesia appropriately affirmed that one of the purposes for establishing the Republic of Indonesia is "to educate the life of the people". Before the independence, it was estimated that only 3% of Indonesia's population could go to school. In other words, approximately 90% of the population were illiterate. To address this major issue, in 1946, the Ministry of Education, Teaching and Culture through Community Education Division set illiteracy eradication program to be one of education development priorities, carried out under the name "ABC





Course". In 1949, Community Education Division was altered to Bureau of Community Education; one of its main duties was to eradicate illiteracy. In 1951, the plan "Ten Years of Illiteracy Eradication" was formulated, aiming at completing and freeing people from illiteracy in a period of 10 years. However, in 1960, it turned out that there were still about 40% illiterate people, especially adults (*Directorate of Community Education, Illiteracy Eradication in Indonesia, 1972*).

In 1960, the President announced "President's Command" to eradicate illiteracy until 1964. On December 31, 1964, it was declared that the Indonesian population aged 13-45 years (except West Irian) were free from illiteracy. The definition of literacy here was ability to read and write short sentences, such as self-name and address. In 1966-1970, Indonesia adopted functional illiteracy eradication program through a national campaign to free people from illiteracy on a large scale, and selectively chose illiterate groups working in various fields, such as factory workers, farmers, and plantation laborers, so that they could harness the power of literacy in improving their productivity.

Along with the changing demands of national development especially in the civil service, and to strengthen the educational management, the government made several changes in the nomenclature of the Ministry of National Education. However, up to this present moment, for its important role, Directorate of Community Education as one of the working units in the Ministry of National Education was maintained to continue its various programs which essentially focused on community empowerment, especially marginalized groups. In addition, in the early 2000s, to sharpen the focus of the programs, Directorate of Community Education gradually created new echelon II units in Directorate General of Out of School Education, namely: Directorate of Early Childhood Education, Directorate of Courses and Training, and Directorate of Equivalency Education.

In 2007, the nomenclature of Directorate General of Out of School Education was changed to Directorate General of Non-Formal and Informal Education (DG NFIE). In late 2010, it was restructured to Directorate General of Early Childhood, Non-formal and Informal Education (DGE CNFIE), encompassing; Directorate of Community Education Development, Directorate of Courses and Training Development, Directorate of Early Childhood Education Development, and Directorate of Teachers and Education Personnel of Early Childhood, Non-Formal and Informal Education Development.

In 2015, through the Regulation of Minister of Education and Culture Number 11/2015 on the Organization and Administration of Ministry of Education and Culture, the nomenclature of Directorate General of Early Childhood, Non-Formal and Informal Education experienced another change. It is now called Directorate General of Early Childhood and Community Education, comprising of Directorate of Literacy and Equivalency Education Development, Directorate of Courses and Training Development, Directorate of Early Childhood Education Development, Directorate of Family Education Development, and Secretariat of Directorate General of Early Childhood and Community Education Development.

To provide a comprehensive overview and explanation to various stakeholders, institutions/organizations at central and local levels, and partner agencies/organizations as well as the community in general about the current existence of Directorate of Literacy and Equivalency Education Development, this book is published.

## **B. Strategic Role of Literacy and Equivalency Education**

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in its preamble, emphasizes the needs to educate the life of the people. In Article 31, it is mentioned that every citizen has the right to receive education. Thus, giving education is a responsibility that should be realized by the government and all people of Indonesia. This national commitment becomes the driving force for all elements, both the government and community members to implement

education, as an integral part of fighting against poverty and helplessness in the macro framework of human resources development.

Education as part of human rights is explicitly stated in Article 28B Paragraph (2) of the 1945 Constitution: "Every child shall have the right to live, to grow and to develop, and shall have the right to protection from violence and discrimination.", and in Article 28C Paragraph (1): "Every person shall have the right to develop him/herself through the fulfillment of his/her basic needs, the right to get education and to benefit from science and technology, arts and culture, for the purpose of improving the quality of his/her life and for the welfare of the human race."

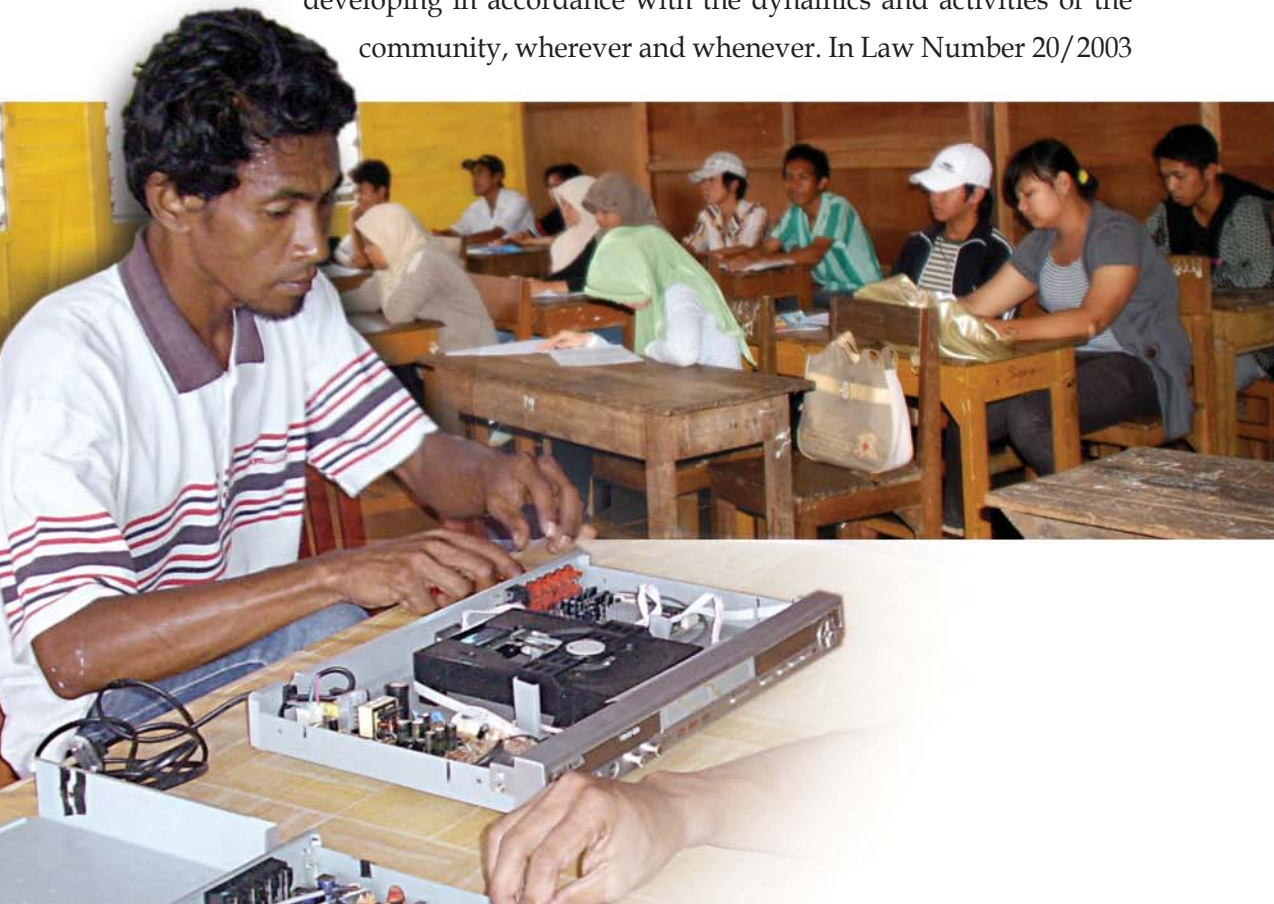
As an effort to improve the quality of Indonesian human resources and develop the learners' potentials based on the objectives of national education, the government seeks to improve the quality and equity of education, either through formal or non-formal education.

The existence and presence of Non-Formal Education (NFE) are naturally developing in accordance with the dynamics and activities of the community, wherever and whenever. In Law Number 20/2003

on National Education System, specifically in Articles 26 and 27 on non-formal and informal education, it is mentioned that non-formal education has equal position and role to formal education as an integral part of the entire national education system. "Non-formal education is organized for citizens who require educational services as a replacement, addition, and/or complement to formal education in the context of lifelong learning. Non-formal education includes life skills education, early childhood education, youth education, women empowerment education, literacy education, vocational education and apprenticeship, equivalency education, as well as other education aimed at developing the learners' ability."

In another section of the Education Law, it is stipulated that "the graduates of non-formal education could be rewarded equivalent to the graduates of formal education after undertaking the equivalency assessment organized by agencies appointed by the government or local government with reference to the national standards of education."

In addition, it is mentioned that "non-formal education units consist of: courses institution, training institution, study group, *community learning center*, and religious study group (*majelis taklim*), as well as other similar



education units". Meanwhile, informal education is recognized as education that takes place in the family and the environment in which people live and exist, and the learning activities could be done independently.



Non-formal education is essentially organized by, from, and for the people. It has already existed long before formal education. Consequently, it is fair and reasonable if the implementation and management of non-formal and informal education is mostly carried out by foundations, institutions or community, religious and professional organizations, and families in the community. However, the government should be responsive to increasing non-formal education challenges faced.

Approaches and implementation strategies of non-formal education are in line with its nature and history because families along with the environment are the first and foremost places where education takes place. Someone's personality is formed, shaped and developed according to his potentials in his own family and environment. The phases of education in the family and environment depend on the intensity and quality of educational intervention in the family and environment in accordance with the principles of non-formal education.



Recognizing the important role of non-formal education in improving the quality of human resources in this globalization era, the government is calling for participation from the society and all components of the nation to develop proactive educational services as a response to the development and community's needs in local, national and global levels. This is in line with the mandate of the Education Law (Article 55) which states that "the

society has the right to organize community-based education in formal and non-formal education in accordance with the peculiarities of religions, social environment, and culture for the benefits of the society". However, in Article 62, it is clearly stated that "every formal and non-formal education institution must obtain permission from the government or local government."



In line with the point of view above, since 1998, Directorate of Community Education, Directorate General of Non-Formal and Informal Education, Department of National Education initiated the establishment of Community Learning Center (CLC). The CLC is intended as a place for learning and training of various non-formal education programs to meet certain community's needs based on their potentials, conditions and characteristics. In addition, it serves as a forum of coordination and learning in order to improve the community's knowledge, attitudes, skills/expertise, and talents or hobbies that is fully organized and managed by the community.

In the last fifteen years, due to the increasing public awareness and the government's commitment, support and attention to non-formal education services, the development of CLC as one of the non-formal education units experienced a rapid growth in Indonesia.



# CHAPTER II

## ORGANIZATION AND ADMINISTRATION

### A. Vision, Mission and Quality Management

#### 1. Vision

Directorate of Literacy and Equivalency Education Development as one of the technical or working units of Directorate General of Early Childhood and Community Education, Ministry of Education and Culture, has a vision “to foster literacy and equivalency educational actors and ecosystem based on mutual collaboration.”

#### 2. Mission

To achieve the vision above, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development set the following mission:

*Strengthening educational actors and improving access to and quality of literacy and equivalency education, as well as developing bureaucracy effectiveness by increasing management and public involvement, through the following services:*

- literacy education;
- reading culture development;
- equivalency education;
- continuing education (women empowerment education); and,
- institutional strengthening.

#### 3. Quality Management

Since 2007, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development (formerly Directorate of Community Education



“Continuing education is developed in order to improve women’s life skills as they are biggest targets of literacy education through practical skills training, integrated with entrepreneurial activities.”



Development) has obtained ISO 9001:2008 from UKAS Quality Management with Certificate Number: 28787/A/0001/UK/En, dated December 14, 2007, as a symbol of appreciation for its improving performance.

In line with it, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development set the Quality Management as follows:

*Providing fair and quality literacy and equivalency education services to learners with:*

- **Dedication** to fulfill responsibilities and duties
- **Innovation** in developing programs
- **Commitment** to empower the community
- **Quality** in serving the best
- **Agenda** of accessible and meaningful programs and activities
- **Synergy** in harmony with various stakeholders in designing, implementing and evaluating programs

## B. Organizational Structure

In line with the Regulation of Minister of Education and Culture Number 11/2015 on the Organization and Administration Structure of Ministry of Education and Culture, the organizational structure of Directorate of Literacy and Equivalency Education Development could be described as follows:



**Figure-1**  
**Organizational Structure of Directorate of Literacy and Equivalency Education Development**



## C. Duties and Functions

Based on the Regulation of Minister of Education and Culture Number 11/2015 (Articles 30-195) on the Organization and Administration of Ministry of Education and Culture, the duties and functions of Directorate of Literacy and Equivalency Education Development, Directorate General of Early Childhood and Community Education, along with its units, are as follows:

### 1. Directorate of Literacy and Equivalency Education Development

#### a. Duties

Carry out the formulation and implementation of literacy and equivalency education development policy.

#### b. Functions

- 1) formulating literacy and equivalency education policy in the areas of curriculum, learners, infrastructures and facilities, financing, and management;
- 2) coordinating and implementing literacy and equivalency education policy in the areas of curriculum, learners, infrastructures and facilities, financing, and management;
- 3) facilitating infrastructures and facilities as well as funding for literacy and equivalency education;
- 4) formulating norms, standards, procedures, and criteria of literacy and equivalency education in the areas of curriculum, learners, infrastructures and facilities, financing, and management;
- 5) providing technical guidance and supervision on literacy and equivalency education;
- 6) evaluating literacy and equivalency education development; and,
- 7) undertaking the administration affairs of the Directorate of Literacy and Equivalency Education Development.

To accomplish the duties and functions above, Directorate of Community Education Development consists of:

- a) Sub-Directorate of Program and Evaluation;
- b) Sub-Directorate of Literacy Education and Reading Culture;

- c) Sub-Directorate of Equivalency and Continuing Education;
- d) Sub-Directorate of Institutionalization and Partnership;
- e) Task Force Sub-Division;
- f) Functional Group.

### 2. Sub-Directorate of Program and Evaluation

#### a. Duties

Preparing materials for the formulation of policies, programs, activities, and budget, evaluating program implementation and budget expenditure, and formulating the report of the Directorate.

#### b. Functions

- 1) Preparing materials for the formulation of literacy and equivalency education development policy;
- 2) collecting, analyzing, and presenting data and information on literacy and equivalency education development;
- 3) formulating programs, activities, and budget of the Directorate;
- 4) facilitating literacy and equivalency education funding;
- 5) monitoring and evaluating program and activity implementation, as well as the budget expenditure of the Directorate; and,
- 6) preparing the Directorate's reports.

To accomplish the duties and functions above, Sub-Directorate of Program and Evaluation is divided into two sections:

#### a. Program Formulation Section

This Section bears the responsibility to prepare the materials for formulating the Directorate's policies, programs, activities and budget, as well as to provide funding for literacy and equivalency education.

#### b. Program Evaluation Section

This Section bears the responsibility to collect, analyze, and present data and information, monitor and evaluate program and activity implementation, budget expenditure and funding provision of literacy and equivalency education development.



### 3. Sub-Directorate of Literacy Education and Reading Culture

#### a. Duties

Formulating, coordinating and implementing policies, norms, standards, procedures, criteria, technical guidance and supervision, curriculum quality assurance, and infrastructures and facilities of literacy education and reading culture.

#### b. Functions

- 1) formulating, coordinating and implementing literacy education and reading culture policy in the areas of curriculum and infrastructures and facilities;
- 2) preparing materials and providing infrastructures and facilities of literacy education and reading culture;
- 3) preparing materials to facilitate the implementation of quality assurance in the field of curriculum and infrastructures and facilities of literacy education;
- 4) formulating norms, standards, procedures, and criteria of literacy and reading culture in the areas of curriculum and infrastructures and facilities;
- 5) providing technical guidance and supervision on literacy education and reading culture; and
- 6) undertaking evaluation and report of literacy education and reading culture development.

To accomplish the duties and functions above, Sub-Directorate of Literacy Education and Reading Culture is divided into two sections:

#### a) Literacy Education Section

This Section bears the responsibility to prepare materials for formulating, coordinating and implementing policies, norms, standards, procedures, criteria, technical guidance and supervision, curriculum quality assurance, evaluation and report on literacy education curriculum and infrastructures and facilities.

#### b) Reading Culture Section

This Section bears the responsibility to prepare materials for formulating, coordinating and implementing policies, norms, standards, procedures, criteria, technical guidance and supervision, curriculum quality assurance, evaluation and report on reading culture infrastructures and facilities.

### 4. Sub-Directorate of Equivalency and Continuing Education

#### a. Duties

Formulating, coordinating and implementing policies, norms, standards, procedures, criteria, technical guidance and supervision, curriculum quality assurance, and infrastructures and facilities of equivalency and continuing education.

#### b. Functions

- 1) formulating, coordinating and implementing equivalency and continuing education policy in the areas of curriculum and infrastructures and facilities;
- 2) preparing materials and providing infrastructures and facilities of equivalency and continuing education;
- 3) preparing materials to facilitate the implementation of quality assurance in the field of curriculum and infrastructures and facilities of equivalency education;
- 4) formulating norms, standards, procedures, and criteria of equivalency and continuing education in the areas of curriculum and infrastructures and facilities;
- 5) providing technical guidance and supervision on equivalency and continuing education; and
- 6) undertaking evaluation and report of equivalency and continuing education development.

To accomplish the duties and functions above, Sub-Directorate of Equivalency and Continuing Education is divided into two sections:

#### a) Equivalency Education Section

This Section bears the responsibility to prepare materials for formulating, coordinating and implementing policies, norms, standards, procedures, criteria, technical guidance and supervision, curriculum quality assurance, evaluation and report on equivalency education curriculum and infrastructures and facilities. coordinating and implementing policies, norms, standards, procedures, criteria, technical guidance and supervision, curriculum quality assurance, evaluation and report on literacy education curriculum and infrastructures and facilities.

## b) Continuing Education Section

This Section bears the responsibility to prepare materials for formulating, coordinating and implementing policies, norms, standards, procedures, criteria, technical guidance and supervision, curriculum quality assurance, evaluation and report on continuing education curriculum and infrastructures and facilities.

## 5. Sub-Directorate of Institutionalization and Partnership

### a. Duties

Formulating, coordinating and implementing policies, norms, standards, procedures, criteria, technical guidance and supervision, management quality assurance, and quality character education improvement of literacy and equivalency education learners.

### b. Functions

- 1) formulating, coordinating and implementing literacy and equivalency education policy in the areas of institutionalization and partnership;
- 2) preparing materials and providing infrastructures and facilities of equivalency and continuing education;
- 3) preparing materials to improve the quality character education of literacy and equivalency education learners;
- 4) formulating norms, standards, procedures, and criteria of literacy and equivalency education in the areas of institutionalization and partnership;
- 5) providing technical guidance and supervision on institutionalization and partnership of literacy and equivalency education; and

- 6) undertaking evaluation and report of literacy and equivalency education in the areas of institutionalization and partnership.

To accomplish the duties and functions above, Sub-Directorate of Institutionalization and Partnership is divided into two sections:

### a) Institutionalization Section

This Section bears the responsibility to prepare materials for formulating, coordinating and implementing policies, norms, standards, procedures, criteria, technical guidance and supervision, management quality assurance, evaluation and report on the institutionalization of literacy and equivalency education.

### b) Partnership Section

This Section bears the responsibility to prepare materials for formulating, coordinating and implementing policies, norms, standards, procedures, criteria, technical guidance and supervision, management quality assurance, evaluation and report on the partnership of literacy and equivalency education.

## 6. Task Force Sub-Division

Task Force Sub-Division is responsible to carry out the Directorate's administrative affairs in relation to correspondence, employment, financing, state's property, and domesticity.





## D. Workforce

### 1. High Rank Officials in Directorate of Literacy and Equivalency Education Development

Table-1 shows the list of High Rank Officials in Directorate of Literacy and Equivalency Education Development.

**Table-1**

**List of High Ranking Officials in Literacy and Equivalency Education Development**  
(as of December 2015)

No	Nama	Jabatan	N I P	Gol
1	Dr. Erman Syamsuddin, SH., M.Pd.	Director of Literacy and Equivalency Education Development	195703041983031015	IV/d
2	Drs. Pahala Simanjuntak, MM.	Deputy Director of Program and Evaluation	195901181985031003	IV/b
3	Dr. Samto	Deputy Director of Literacy Education and Reading Culture	196506201992031002	IV/b
4	Dr. Kastum	Deputy Director of Equivalency and Continuing Education	196407171993031001	IV/b
5	Drs. Cecep Suryana, MM.	Deputy Director of Institutionalization and Partnership	196505301992031003	IV/a
6	Thuarita Cahyawati, S.Sos.	Head of Task Force Sub Division	197008111998022001	III/d
7	Khairullah, M.Si.	Head of Program Formulation Section	197506072006041001	III/d
8	Yohana Rumanda, M.Pd.	Head of Program Evaluation Section	197506282003122001	III/c
9	Johan Winarni, M.Pd.	Head of Literacy Education Section	197211101998022001	IV/a
10	Mohamad Alipi, S.Pd.	Head of Reading Culture Section	196701071992031003	III/c
11	Drs. Bambang Windoko, M.Pd.	Head of Equivalency Education Section	196210281991031002	IV/a
12	Subi Sudarto, S.Sos., M.Si.	Head of Continuing Education Section	197401282006041001	III/c
13	Lismanto, S.AP., M.Si.	Head of Institutionalization Section	197004211990091002	III/c
14	Drs. Y. Toto Argo Nugroho	Head of Partnership Section	195903041985031002	IV/a

### 2. Employees at Directorate of Literacy and Equivalency Education Development

Table-1 shows the list of employees at Directorate of Community Education Development.

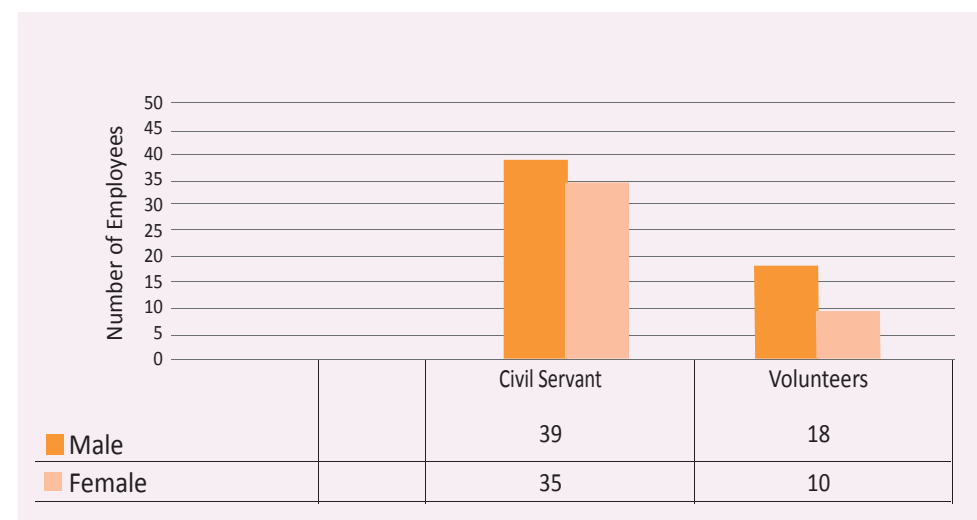
**Table-2**

**List of Employees at Directorate of Literacy and Equivalency Education Development**  
(as of December 2015)

No	Sex	Civil Servants	Volunteers	Total
1	Male	39	18	57
2	Female	35	10	45
Total		74	28	102

**Graphic-1**

**Employees at Directorate of Literacy and Equivalency Education Development Based on Sex**  
(as of December 2015)



Source: Directorate of Literacy and Equivalency Education Development, 2015

Based on the data shown in the table above, the number of employees at Directorate of Literacy and Equivalency Education Development is 102 people, consisting of 74 people (73%) Civil Servants and 28 people (27%) volunteer workers.



Based on the figures, there are 57 people (56%) male employees, consisting of 39 Civil Servants and 18 volunteer workers. Meanwhile, the number of female employees is 45 people (46%), consisting of 35 Civil Servants and 10 volunteer workers.

The division of employees based on their working unit is described in the following tables and graphics.

**Table-3**  
**Employees at Directorate of Literacy and Equivalency Education Development**  
**Based on Working Unit**  
(as of December 2015)

No	Working Unit (Sub-Directorate/Sub-Division)	Civil Servants/ Probationary Civil Servants			Volunteer Workers			Total		
		M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
1	Program and Evaluation	6	6	12	4	2	6	10	8	18
2	Literacy Education and Reading Culture	6	5	11	4	2	6	10	7	17
3	Equivalency and Continuing Education	8	5	13	3	2	5	11	7	18
4	Institutionalization and Partnership	7	6	13	3	2	5	10	8	18
5	Task Force	12	13	25	4	2	6	16	15	31
Total		39	35	74	18	10	28	57	45	102

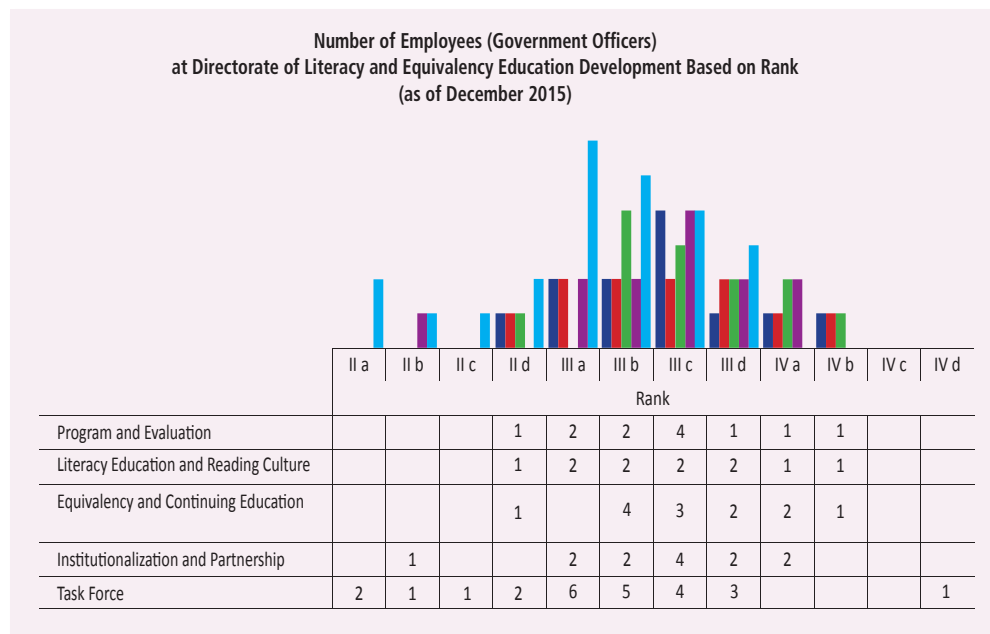


**Table-4**  
**Employees (Government Officers)**  
**at Directorate of Literacy and Equivalency Education Development Based on Rank**  
(as of December 2015)

No	Working Unit (Sub-Directorate/Sub-Division)	Rank												Total	
		Ib	Ila	Ilb	Ilc	Ild	IIla	IIlb	IIlc	IIId	IVa	IVb	IVc		IVd
1	Program and Evaluation					1	2	2	4	1	1	1			12
2	Literacy Education and Reading Culture					1	2	2	2	2	1	1			11
3	Equivalency and Continuing Education					1		4	3	2	2	1			13
4	Institutionalization and Partnership			1			2	2	4	2	2				13
5	Task Force		2	1	1	2	6	5	4	3				1	25
Jumlah			2	2	1	5	12	15	17	10	6	3		1	74



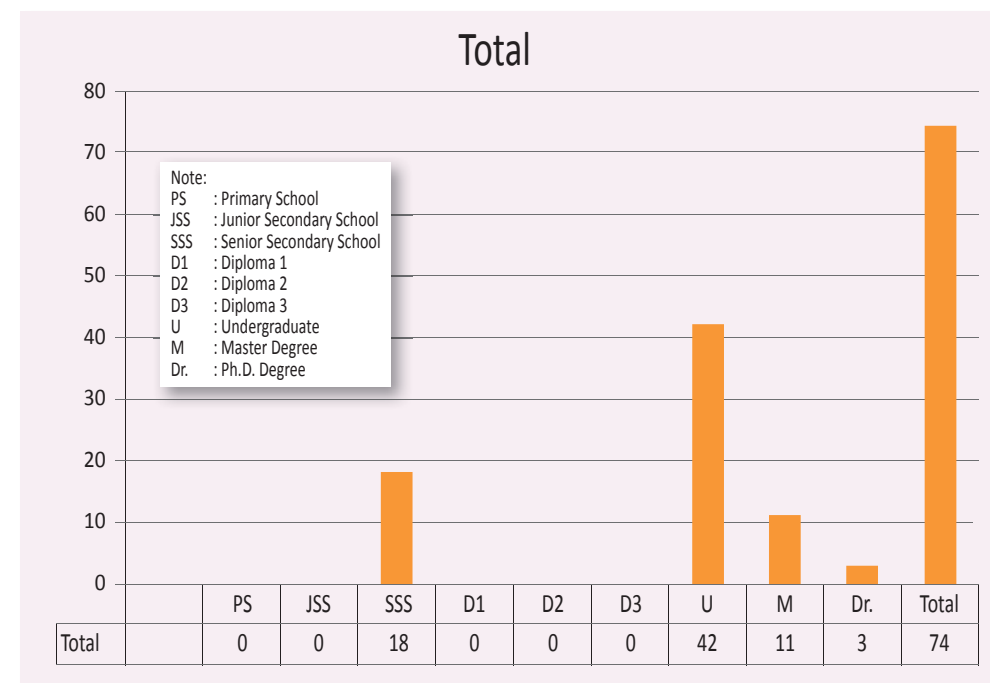
**Graphic-2**  
**Number of Employees Based on Rank**



**Table-5**  
**Employees (Government Officers) at Directorate of Literacy and Equivalency**  
**Education Development Based on Level of Education**  
(as of December 2015)

No	Working Unit (Sub-Directorate/Sub-Division)	Level of Education									Total
		PS	JSS	SSS	D1	D2	D3	U	M	Dr.	
1	Program and Evaluation			2				6	4		12
2	Literacy Education and Reading Culture			4				5	1	1	11
3	Equivalency and Continuing Education			2				7	3	1	13
4	Institutionalization and Partnership			2				9	2		13
5	Task Force			8				15	1	1	25
Total				18				42	11	3	74

**Graphic-3**  
**Number of Government Officers at Directorate of Literacy and Equivalency**  
**Education Development Based on Level of Education**  
(as of December 2015)



# CHAPTER III

## POLICIES AND PROGRAMS



"Non-formal education is organized for citizens who require educational services as a replacement, addition, and/or complement to formal education in the context of lifelong learning".

### A. Policies

Non-formal education is a process in which the educational efforts initiated by the government are embodied in an integrated manner with the efforts of local residents to improve the conditions of social, economics, and culture to be useful and empowering. Non-formal education is focused on the availability and affordability of continuing adult education services that are equitable, quality and relevant to the needs of the community.

Literacy education is developed in order to provide education service for adults, especially illiterate population. In line with the Abuja agreement on literacy development, literacy programs emphasize multi-literacy services in addition to functional literacy and life skills. Since approximately 70 percent of the illiterate population are female and most of them are in the age of 45 years and above, the literacy programs are integrated with women empowerment education and reading culture development.

Furthermore, to prevent relapsing and improve reading culture, literacy programs are synergized with the expansion of access to reading materials. The provision of reading materials is realized with the expansion of community reading center at the district level and is expanded through public spaces such as markets, malls, worship spaces, hospitals, and social institutions.



Since 2015, in accordance with the Ministry of Education and Culture policy, the responsibility for the management and development of Equivalency Education (Package A, B and C) is handed over from Directorate General of Basic and Secondary Education to Directorate General of Early Childhood and Community Education, specifically Directorate of Literacy and Equivalency Education Development. Considering the high dropout rate at the primary up to senior secondary high school level, equivalency education needs to be developed according to the needs and development of today's education, particularly as an effort to support the government's policy on compulsory twelve-year education (previously nine years).

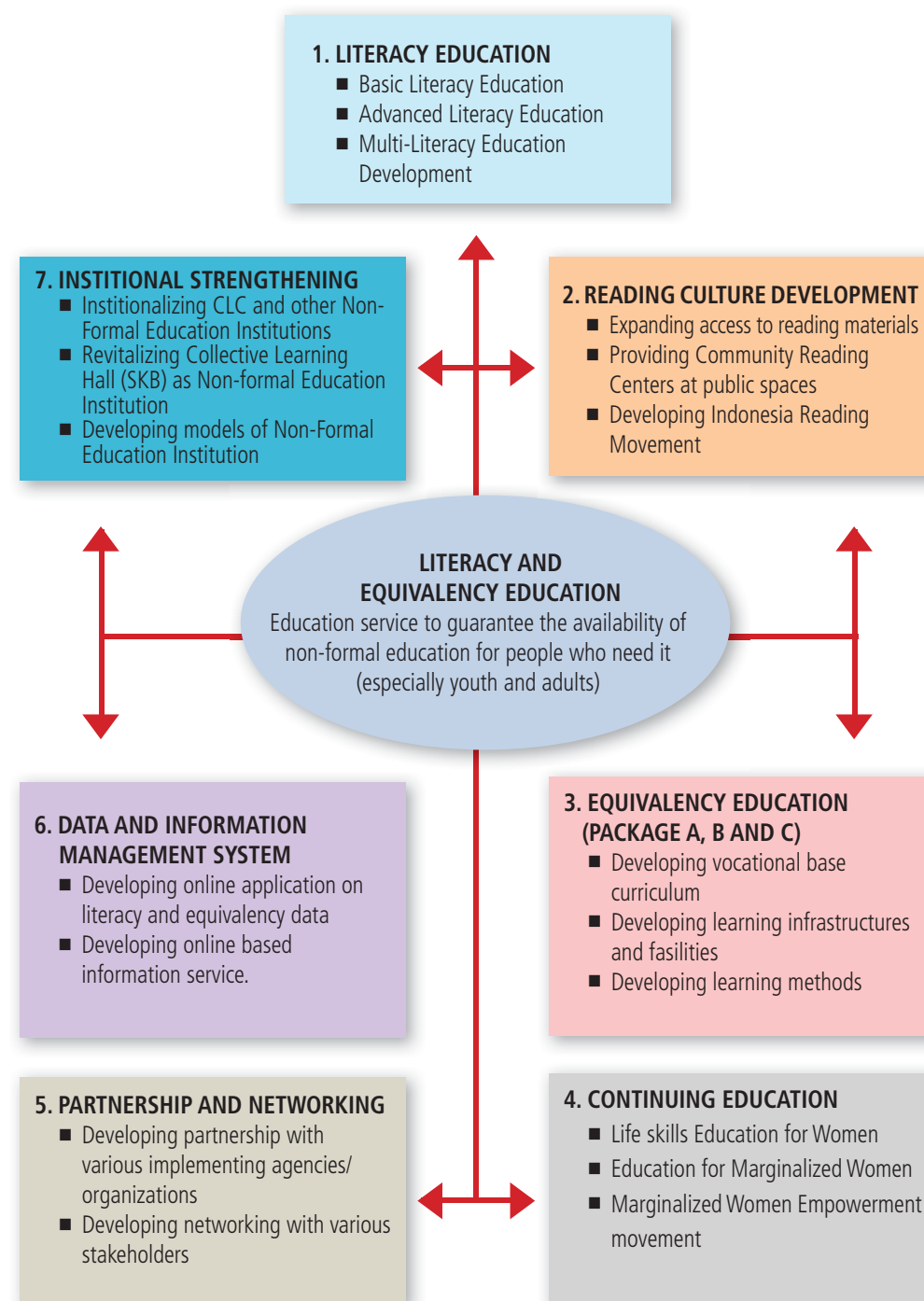
Continuing education is developed in order to improve women's life skills as they are biggest targets of literacy education through practical skills training, integrated with entrepreneurial activities. The synergy and integration of literacy and equivalency education with various life skills programs, it is expected that there will be a lifelong learning community as an investment to create a literate, fond of reading, gender-sensitive, and noble community.

Literacy and equivalency education policies and programs are developed



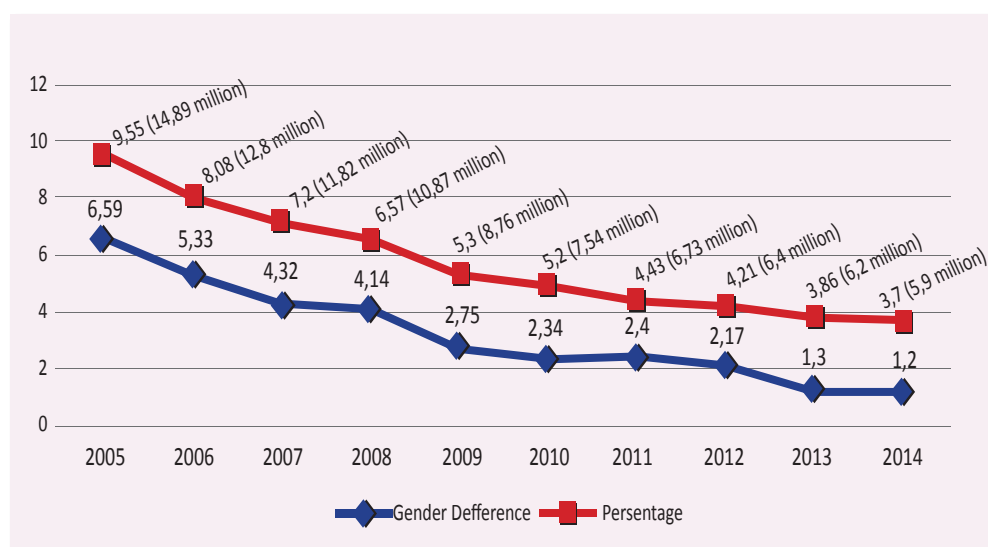
in an integrated manner through synergy and integration that support each other as illustrated in the Figure below.

**Figure-2**  
**Policies and Programs of Directorate of Literacy and Equivalency Education Development**



In the last ten years, Indonesia should be grateful for its significant improvement in adult literacy rate. Based on the data gained from the National Bureau of Statistics (BPS), Indonesia has proven its success in adult literacy by exceeding the target of Education for All (EFA) by halving the illiterate population: 15.4 million (10.20%) in 2004 to 7.54 million (5.02%) in 2010. Meanwhile in 2014, the literate population in Indonesia reached 96.30% and hence, the remaining illiterates are 5.9 million people (3.7%). Disparities among provinces also showed significant progress, in which only two provinces with adult illiteracy rate over 10% of and six provinces with over 200,000 illiterate adults.

**Graphic-4**  
Number and Percentage of Adult Illiteracy (15-59 years old)  
2005-2014



At national level, the illiteracy rate for 15-59 years old population reached 3.70% (5,984,075 people). However, disparity among provinces remains inevitable. The adult illiteracy rate at 2 provinces was above 10 %, namely Papua (28.61%) and West Nusa Tenggara (10.62%); 6 provinces were between 2.0%-9.9% West Sulawesi (7.63%), South Sulawesi (7.15%), East Nusa Tenggara (6.94%), East Java (5.78%), West Kalimantan (5.50%), and Bali (5.11%). Meanwhile, the adult illiteracy rate of the remaining 26 provinces was below 5%. The Figure below shows the latest condition of adult illiteracy in Indonesia.

**Figure-3**  
Spread of Adult Illiteracy in Indonesia



Literacy can be defined as the ability to read and write printed materials along with the ability to communicate in oral and written texts. However, along with the demands of globalization and the rapid advancement of information and communication technology, literacy evolved towards a diverse context. Today literacy means ability to use various semiotic forms in visual, aural and digital modes. The mastery of visual, aural and digital texts has become a necessity in today's literacy education.

Referring to the definition of literacy, literacy is a powerful tool to alleviate poverty and improve the dignity of a person. It is important to note that literacy is part of basic education for all. Literacy is a second chance for those who did not acquire sufficient literacy skills at the age of compulsory education. Thus, literacy is considered as an effective way to enlighten and embrace people in facing challenges in life, improve the quality of life as well as realize the people's prosperity.

One of the successful factors contributing to the improvement of adult literacy rate in Indonesia is community involvement, including women's organizations. There are some lessons learned from various experiences in improving literacy rate with the involvement of women's organizations, the

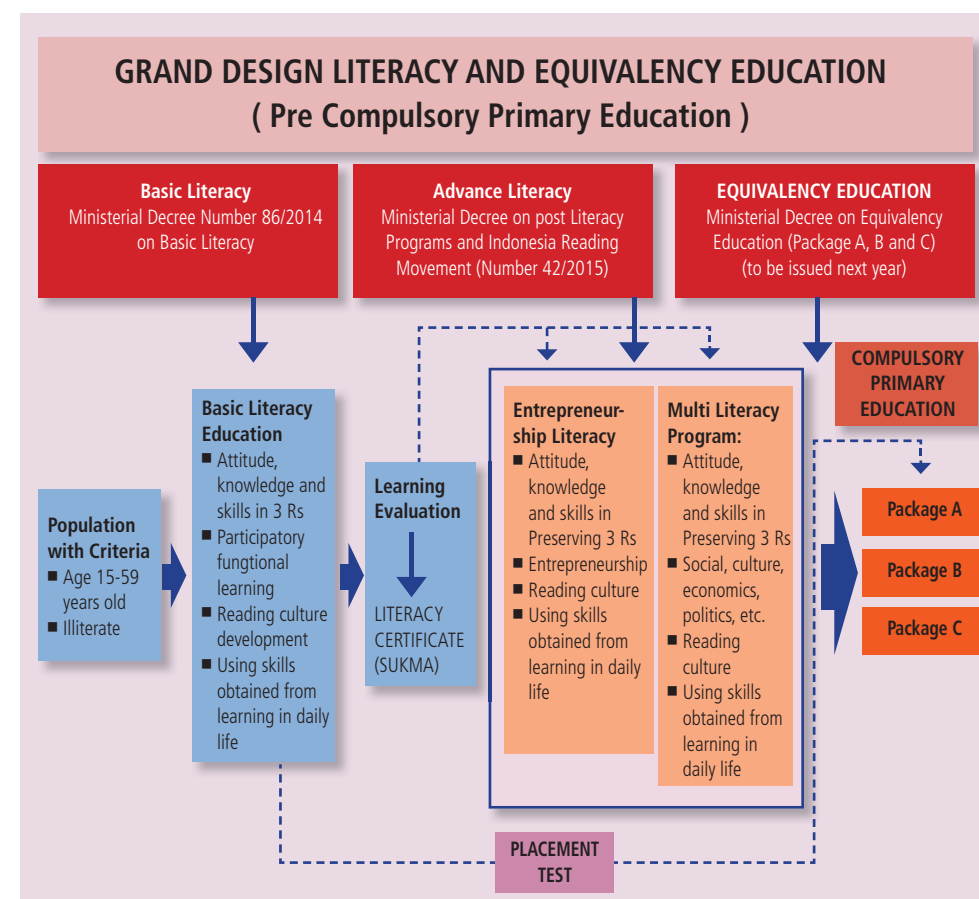


leadership of local leaders, the use of the mother tongue in the process of literacy learning, the integration of entrepreneurship in literacy education programs and the provision of literate environment through Community Reading Center as a post-literacy service. Another important thing worth noting in adult literacy achievement is UNESCO awarded Indonesia with King Sejong Literacy Prize in 2012 for its high commitment and success in improving literacy. The program “Improving the Quality of literacy through the Literacy Entrepreneurship, Reading Culture and Tutor Training” developed by Directorate of Community Education Development has stunned UNESCO because of its extensive coverage, reaching approximately three million people and its approach to literacy education through entrepreneurial activities, reading culture development through community reading centers at public spaces, such as markets and worship places, and the development of professional tutors. This award is expected to remind all parties about the role and significance of literacy for the people of Indonesia. Literacy and equivalency education is expected to provide open, quality and greater learning opportunities for people who choose non-formal education



as an alternative and/or those who have not received education services through formal education. This is in line with the vision and mission of Directorate of Literacy and Equivalency Education as explained at the beginning of this book, and it could be illustrated in the following Figure.

**Figure-4**  
**Grand Design Literacy and Equivalency Education**



In expanding access and affordability of quality and relevant community education, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development set development policies and planned programs that are expected to give significant contribution in solving various problems of the nation, especially in the field of non-formal and informal education in order to develop Indonesian human resources.

In line with the strategic plans of Directorate General of Early Childhood and Community Education, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development set performance indicators as follows.

**Table-6**  
**Key Performance Indicators (IKK) Directorate of Literacy and Equivalency Education**  
**Development 2015-2019**

IKK	Target	Unit	2015	2016	2017	2018	2019
SK. 4.2018.1	Increasing youth and adults receiving quality community education with gender equality and Education for Sustainable Development (ESD) perspectives in all provinces, cities/districts						
IKK – 1	Number of adults receiving basic literacy education	People	150,525	150,525	150,525	150,525	150,525
IKK – 2	Number of adults receiving Self-Entrepreneurship Literacy Education and Pre-Package A	People	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200
IKK – 3	Number of youth and adults receiving equivalency education: Package A students receiving operational aid	People	3,140	2,635	2,345	2,245	2,025
IKK – 4	Number of youth and adults receiving equivalency education: Package B students receiving operational aid	People	652,213	169,660	156,558	143,456	130,354
IKK – 5	Number of youth and adults receiving equivalency education: Package C and Vocational students receiving operational aid	People	25,200	407,070	427,449	433,308	429,611
IKK – 6	Number of home-schools receiving home-school operational aid	Institution	-	35	45	50	50
IKK – 7	Number of villages implementing Vocational Village	Village	-	68	68	68	68
IKK – 8	Number of villages implementing Literacy Village	Village	-	68	68	68	68

IKK – 9	Number of adult females receiving life skills education for women	People	10,000	13,000	15,500	18,000	20,500
IKK – 10	Number of model CLCs and Smart Houses managed by Local Government	Institution	260	307	307	307	102
IKK – 11	Number of CLCs receiving institutional strengthening aid	Institution	445	545	600	625	675
IKK – 12	Number of CRCs receiving ICT and reading materials aid	Institution	-	214	235	257	280
IKK – 13	Number of CRCs newly established at Collective Learning Hall (SKB)	Institution	-	97	125	125	42
IKK – 14	Number of revitalized Collective Learning Halls	Institution	-	20	10	25	25
IKK – 15	Number of Collective Learning Halls receiving aid to improve their learning facilities	Institution	-	68	80	100	120
IKK – 16	Number of documents on norms, standards, procedures and criteria of community education	Document	20	15	10	10	10
IKK – 17	Number of office equipment and facilities	Unit	1	1	1	1	1
IKK – 18	Number of operational vehicles	Unit	2	-	-	2	-
IKK – 19	Number of documents on program planning and evaluation	Document	2	2	2	2	2
IKK – 20	Number of financial, employment and administrative documents	Document	4	4	4	4	4
IKK – 21	Number of documents for commemorating International Literacy Day and implementing competitions and appreciations	Document	1	1	1	1	1



## B. Program Development Strategies

In accordance with the vision, mission and policy of Directorate of Literacy and Equivalency Education Development, the programs developed are illustrated in the following table.

**Table-7**  
**Policies and Strategies in Developing Literacy and Equivalency Education Programs 2015-2019**

No	Policy	Program Development Strategy
1	Literacy education program development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Providing basic literacy education competency standards</li> <li>Providing entrepreneurship literacy competency standards</li> <li>Providing multi-literacy competency standards</li> <li>Providing learning materials for basic, entrepreneurship and multi-literacy programs</li> <li>Training the trainers (TOT) of basic, entrepreneurship and multi-literacy programs</li> <li>Training assessment team of basic, entrepreneurship and multi-literacy programs</li> <li>Providing affirmative basic literacy education program for areas with high illiterate population, such as Papua and outermost, outer-front and underdeveloped regions</li> <li>Prioritizing entrepreneurship literacy at areas implementing basic literacy as a follow-up program</li> <li>Forming study groups at villages as program providers</li> <li>Providing competitive-subsidy for program implementation</li> </ul>
2	Community reading interest and culture program development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expanding access to reading materials</li> <li>Providing Community Reading Centers at Public Spaces</li> <li>Developing and expanding Indonesia Reading Movement</li> <li>Providing competitive-subsidy for the implementation of Indonesia Reading Movement</li> </ul>

3	Equivalency education program development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Providing equivalency education Package A competency standards</li> <li>Providing equivalency education Package B competency standards</li> <li>Providing equivalency education Package C competency standards</li> <li>Providing equivalency education Package C-Vocational competency standards</li> <li>Developing learning infrastructures and facilities of equivalency education: Package A, B and C</li> <li>Providing competitive-subsidy for program implementation</li> </ul>
4	Continuing education program development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing life skills education for marginalized women</li> <li>Developing women empowerment program focusing on marginalized women and ethnic minorities</li> <li>Developing Marginalized Women Empowerment Movement</li> <li>Providing competitive-subsidy for program implementation</li> </ul>
5	Cooperation and partnership development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing cooperation with various partner organizations and agencies</li> <li>Developing partnership with various stakeholders</li> </ul>
6	Data and information system development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing application on literacy and equivalency education data</li> <li>Developing web-based information service system</li> <li>Collecting data by name by address (online application data)</li> </ul>
7	Institutionalization of non-formal education institution	<ul style="list-style-type: none"> <li>Institutionalizing Community Learning Center (CLC) and other Non-Formal Education Institutions</li> <li>Revitalizing Collective Learning Hall (SKB) as Non-Formal Education Institution</li> <li>Developing models of non-formal education institutions</li> </ul>

## 1. Literacy and Reading Culture Development Strategies

To implement the policies described in the table above, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development manage to prepare learning materials that are more functional and contextual so that they could be beneficial and useful for the society. Meanwhile, the program implementation should be flexible in providing the learning space, time, material and process. In addition, it should also be in accordance with the circumstances, conditions and needs of the local community, as well as the people's age and education levels, socio-economic conditions and the learning environment.

At the implementation level, each organizing institution should formulate effective and efficient learning strategy and approach bearing in mind that the funding allocation provided by the government is relatively small. For example, in implementing basic literacy education program, it should consider the followings:

- Learners are grouped based on the location where they live; each group consists of maximum 10 people;
- Each group is guided by at least one educator (tutor) who has been equipped through training and/or workshop on teaching-learning materials;
- Learning methods or approaches are tailored based on the local context (functional thematic), but still refer to the guidelines set by the government;
- Learning schedule is agreed by the tutors and learners in accordance with the local needs and conditions;

- The duration of the learning depends on the learners' ability to learn, but is designed for 6 (six) months with the number of learning hours of 114 (one hundred and fourteen) hours;
- The learning assessment is carried out to determine the extent of learning achievement in accordance with literacy competency standards (SKK); and,
- Learners who pass the post test will receive a Literacy Certificate (SUKMA).

To reach the unreached and serve unserved people with education, especially illiterate population that are extremely difficult to reach (the hardrock) for they are 44 years old and over, Directorate of Literacy and Equivalency Education formulates policy management programs, especially literacy education, namely:

- Using mother tongue as the language of instruction.
- Concentrating the program implementation at areas with the highest illiterate population, especially outermost, outer-front and underdeveloped regions (3T).
- Involving figures or religious/cultural/community leaders, and local institutions/organizations in implementing the program.
- Maximizing the local potentials to support the implementation of learning and training.
- Synergizing the program implementation with a variety of community empowerment programs.







The targets of the program are people at remote and disadvantaged areas as mentioned above. Until now, there are isolated population in Indonesia that are very difficult to receive access to education, for example: Anak Dalam in Jambi, Bajo in Southeast Sulawesi, Kajang in South Sulawesi, Baduy in Banten, Dayak in Kalimantan, and many other tribes living in Papua. Most of these indigenous communities are illiterate because they are difficult to accept changes, less open to others, depend on the environment, and are difficult to change their behavior.

In mapping its programs, Directorate of Literacy and Equivalency Education always carefully take into account funding priority based on

the community needs. In other words, the funding should: (i) portray the government's concern for people and families who are less fortunate because of economic, geographic, and socio-cultural factors, and did not get adequate education service; (ii) meet the people's constitutional rights through non-formal education (path and institution) to respond to international commitments and national education goals; and (iii) see the development of the country's financial capability and community's potential contribution to education.

## 2. Equivalency Education Development Strategies

Special for equivalency education program, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development are currently developing various programs with the following approaches:

- Collecting data of the learners "by name by address" to distribute Student National Identification Number (NISN).
- Formulating vocational based curriculum (only cover essential academic competencies).
- Developing learning materials that are adaptive to the credit system by module/textbook (no more report card required).
- Developing andragogic learning models.





- e. Preparing guidelines for program implementation and providers.
- f. Enhancing the educators and providers' competency.
- g. Mapping and improving the institutional capacity of each non-formal education agency as the program provider based on Minimum Service Standards (SPM).
- h. Selecting the feasibility of each non-formal education institution as the program provider.
- i. Giving heavy punishment to non-formal education institution committing fraudulence.
- j. Applying placement test or Recognition Prior Learning (RPL) to determine class placement.
- k. Preparing accredited education institutions (A and B) as test centers.

### 3. Institutional Strengthening Development Strategies

The improvement of institutional management is carried out through the following strategies:

- a. Enhancing the role of non-formal education institutions and partner organizations to increase access to and equity in literacy education.
- b. Improving data management, developing model education institutions, and fulfilling educational facilities to stimulate the quality of literacy and equivalency education.
- c. Developing Collective Learning Hall (SKB) as non-formal education institution and empowering Community Learning Center (CLC) and other Non-Formal Education Institutions to increase their management efficiency.

## C. Programs and Activities

In accordance with the duties and functions of Directorate of Literacy and Equivalency Education Development as explained earlier, the literacy and equivalency education programs and activities are developed into several menus as follows.:

### 1. Literacy Education

Literacy education programs are developed as efforts to provide various literacy education services based on the community's characteristics, potentials and needs.

Literacy education is packed into several menus of activities and the followings are the description for each activity.

#### a. Basic Literacy

Basic Literacy is an education service dedicated to illiterate population to enable them to read, write, count, speak Bahasa Indonesia and analyze so that they could actualize themselves.

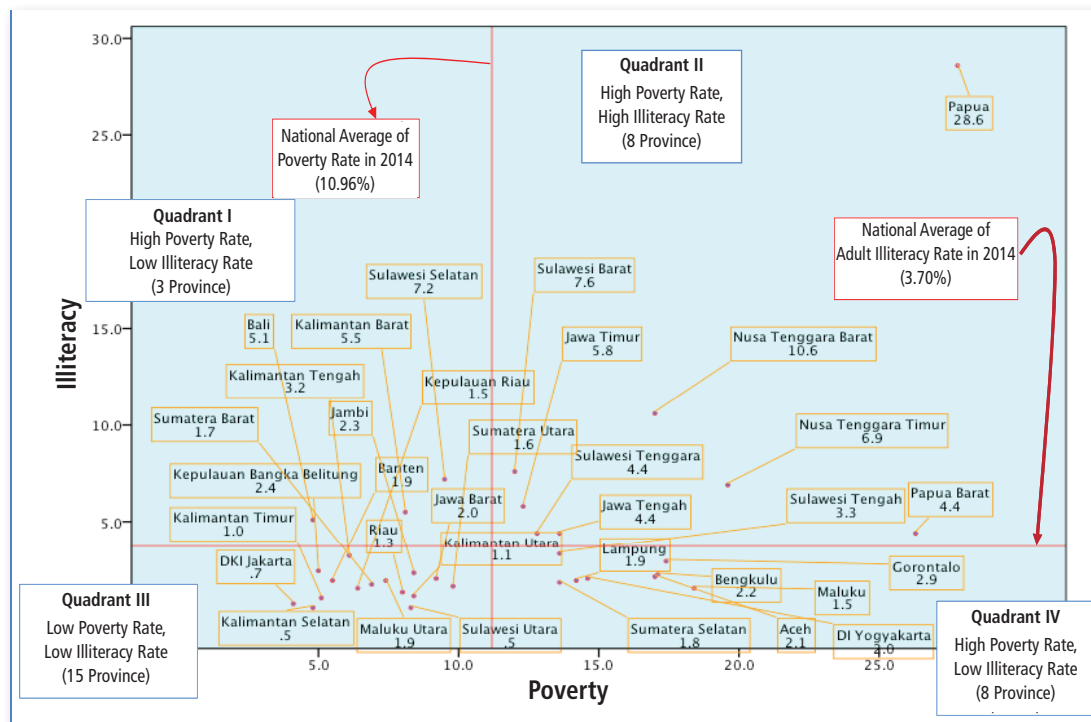
There are some big challenges in improving adult literacy rate, namely: 1) the characteristics of the remaining illiterate population (3.7%) are scattered in the poorest quantile and most remote areas,



as well as belong to a certain community with certain culture; 2) some newly literate population relapse for lack of motivation in preserving literacy skills; 3) there is a challenging issue contributing to the increase on number of illiterate population, that is drop outs of primary 1-3 that have strong potentials to be illiterate.



**Grafik 5**  
Relationship Pattern Between Illiteracy and Poverty Rates in Indonesia

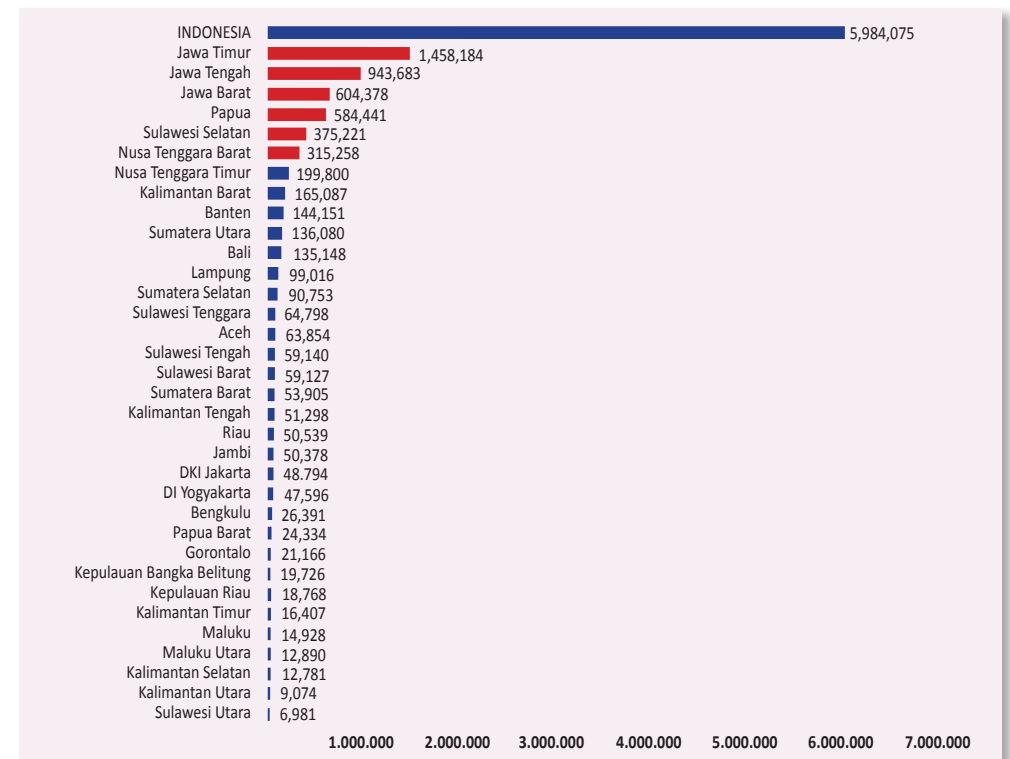


The most difficult challenge, however, lies on people's awareness and commitment on the importance of literacy. It is difficult to change their mindset while as matter of fact, realizing a lifelong learning environment and conducive atmosphere for children's education requires a literate community. Literacy is not only about fulfilling human rights, but it is also an obligation to open the door towards a knowledge-based national development.

Much progress has been on track to achieve the 2015 targets in the field of literacy, but tough challenges in the future remain. If we are to prove the promises made in Dakar in 2000, these challenges must be overcome by a stronger international commitment.

Seen from its total number, West Java Province remains the area with the highest illiterate population in Indonesia, as shown in the following graphic..

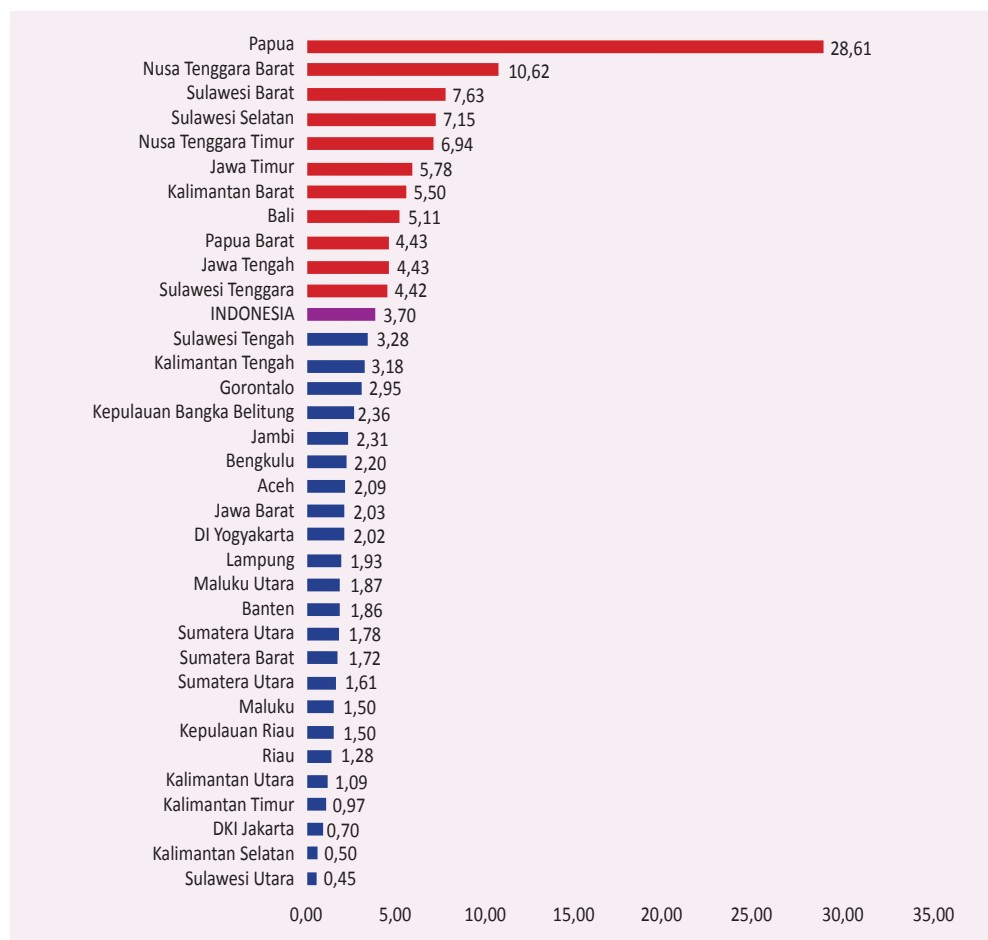
**Graphic-6**  
Number of Adult Illiterate Population (15-59 Years Old)  
By Province, 2014



In Indonesian context, future literacy education programs are expected to be a community movement that could reduce disparity in knowledge and skills as well as play a vital role in economic, culture, and digital activities to realize a peaceful, equitable, civilized and prosperous Indonesia. The Indonesian government together with local government and the community continue and strengthen their commitment and efforts to reduce the number of illiterate population gradually.

Seen from its percentage, Papua is the province with the highest percentage of illiterate population in Indonesia and North Sulawesi with the lowest (see the graphic below).

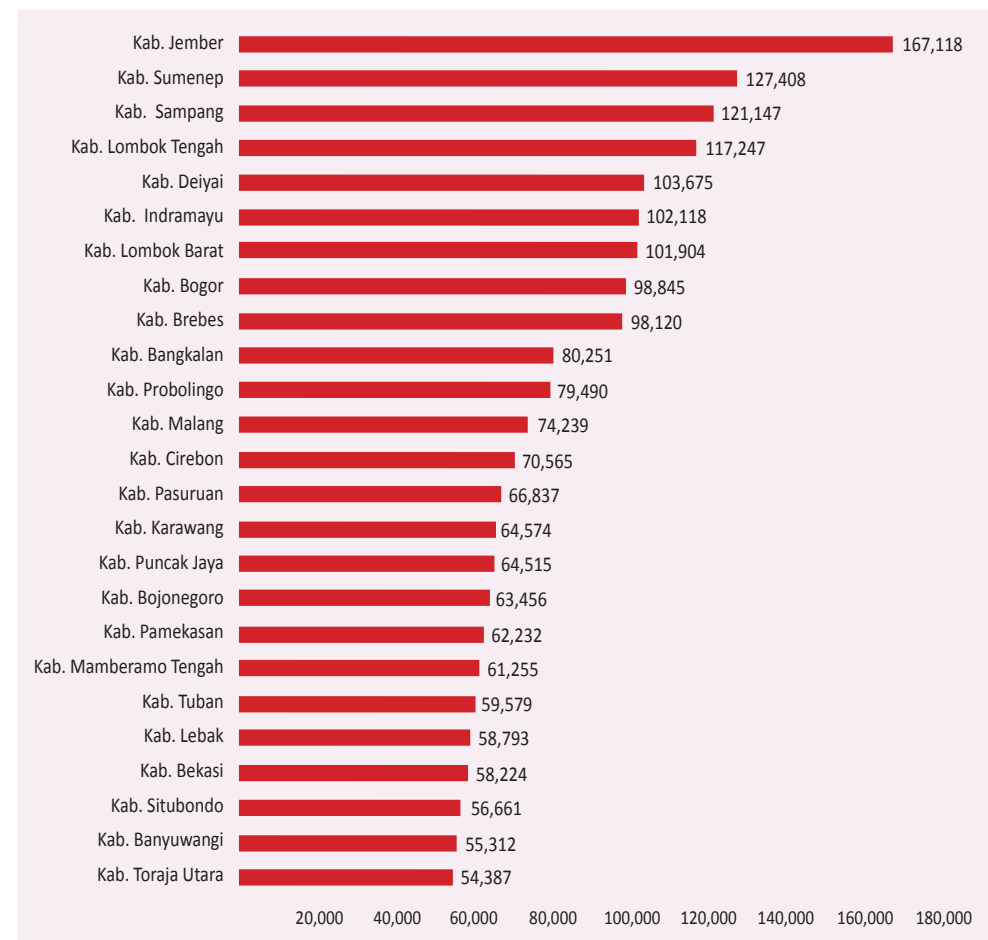
**Graphic-7**  
**Percentage of Adult Illiterate Population (15-59 Years Old)**  
**By Province, 2014**



To accelerate adult literacy achievement in Indonesia, since the last few years the national government concentrated their attention on areas with high illiterate population. Based on the data from Center of Education and Culture Data, the Ministry of Education and Culture, in 2014, there were 25 Districts with the highest illiterate population in Indonesia. Each District had 200,000 illiterate people, and 12 of them are located in East Java Province.

The following Graphic shows in order 25 Districts with the highest illiterate population in Indonesia.

**Graphic-8**  
**25 Districts with the Highest Number of Adult Illiterate Population, 2014**



#### b. Advanced Literacy

Advanced literacy education is a post-basic literacy education service that offers literacy learning to learners who have completed basic literacy education in order to develop their competencies.

To maintain their literacy skills, it is necessary for learners who have completed basic literacy education to continue their study to advanced literacy education, which comprises (1) Self-Entrepreneurship Literacy Education, which focuses on the improvement of literacy and entrepreneurial skills, and (2) Multi-Literacy Education, which emphasizes the improvement of literacy skills in all aspects of life.



### 1) Self-Entrepreneurship Literacy Education

Self-Entrepreneurship Literacy Education is a literacy education service that focuses on the improvement of literacy and entrepreneurial skills. Basic entrepreneurial skills trained to the learners focus on livelihood skills that can improve the learners' literacy and income either individually or in groups as an effort to strengthen literacy and alleviate poverty. The beneficiaries of the program are people who have reached basic literacy competency and have received a Literacy Certificate (SUKMA) through their participation in basic literacy education.

The organizers of this program are to have the legality, capacity and integrity of literacy learning as indicated by the availability of resource persons for practical skills training or entrepreneurship learning, learners, tutors, and learning infrastructures and facilities which are legalized by Head of Village. The providing institutions could be a Study Group, CLC, SKB, Smart House, courses and training institution (LKP), Majelis Taklim, school, university, PKK, and other institutions.

### 2) Multi-Literacy Education

Multi-literacy education focuses on the improvement of literacy skills in all aspects of life.



Today, literacy education is no longer just perceived as an education service dedicated to illiterate population, but it is universal education service that gives an opportunity for individuals to improve their quality of life in many aspects of life.

Multi-literacy education is packaged in a variety of themes,



namely science and technology, health and sports, arts and culture, politics and nationality, professional skills and employment, etc. The program implementation is carried out through several menus as follows:

#### a) Family Literacy Education

Family Literacy Education is the ability to empower the family to train communication skills through verbal, written or numeric text into Bahasa Indonesia so that family members who are illiterate can obtain, search, and organize information to solve everyday problems, especially those related to the prevention of mother and infant death risk, family economy, and character education in the family.





## b) Folklore-based Literacy



Folklore-based Literacy is the ability to talk/tell stories, read and write everyday folklore on legends, myths, and natural phenomena (i.e. disaster, eclipse, etc.), biographies, and local history that are inspiring and have character to improve literacy and community empowerment as well as preserving local history shown by verbal or written text or other media of communication.

## c) Entrepreneurship Literacy

Entrepreneurship Literacy is the ability of community entrepreneurship learned through the pioneering or development of business incubators and entrepreneurship centers to increase literacy and income of learners and the community.



## d) Local Arts and Culture Based Literacy Education

Local Arts and Culture Based Literacy Education is the ability



to preserve local arts and culture through learning and training in improving literacy and community empowerment in local arts and culture.

## e) Science and Technology Based Literacy Education

Science and Technology Based Literacy



Education is an endeavor to facilitate multi-literacy learning service which comprises of functional literacy, critical literacy, media and technology literacy, peace and multicultural literacy, and disaster literacy by the utilization of technological tools.

## f) Writing Culture Improvement through Mothers Newspaper (Koran Ibu)

ran Ibu)

Writing Culture Improvement through Mothers Newspaper (Koran Ibu) is an affirmative action in improving the writing ability and writing culture of women trained in citizen journalism to female students as well as being a literacy enhancement through various media of information, communication and technology.



## g) Writing Culture Improvement through Children Newspaper (Koran Anak)

Writing Culture Improvement through Children Newspaper (Koran Anak) is a form of affirmative action in the improvement of the writing ability and writing culture of marginalized children who are prone to human trafficking and child sexual exploitation through journalism training for children needing protection as well as being a literacy enhancement through various information, communication and technology media.







## 2. Reading Culture Improvement

Reading culture improvement programs are carried out through the following programs.

### a. Electronic Based Community Reading Center (CRC) Quality Upgrading Facility

Electronic Based Community Reading Center (CRC) Quality Upgrading Facility is the provision of technological tools and equipment needed to support the implementation of electronic based CRC as an effort to improve the service quality of CRC.



### b. Public Space CRC

Public Space CRC is a community reading center located in a public space such as shopping centers/ malls, hospitals, or places of worship in which the community can use to improve reading and writing culture.



### c. Pioneering CRC



Pioneering CRC is an endeavor to improve access to reading materials for the community by the formation of CRC which are able to serve the reading and writing activities of the community.

### d. Enhancing CRC

Enhancing CRC is the endeavor to strengthen and improve the quality of CRC to be able to maximize their services in providing reading and writing activities.

### e. Indonesia Reading Movement

To socialize and strengthen the commitment of local governments and all stakeholders in increasing reading interest and culture in society, there should be a massive effort that is conducted as a national movement, involving all levels of society. The program is expected to increase people's reading interest and culture in the context of lifelong learning.





### 3. Equivalency Education

Equivalency education is a non-formal education providing the opportunity for people, especially the youth who dropped out of school: primary school (SD/MI), Junior Secondary School (SMP/MTs), and Senior Secondary School (SMA/MA).

Equivalency education comprises Package A equivalent to primary school (SD/MI), Package B equivalent to Junior Secondary School (SMP/MTs), and Package C equivalent to Senior Secondary School (SMA/MA). The program is intended for students who could not enroll in school or drop out of school at various levels of education. It is also dedicated to population at productive age who want to improve their knowledge and skills and those who require specific services in meeting their needs, as a result of the increase in living standards and the advancement in science and technology. As non-formal education services, Package A, Package B and Package C programs are expected to expand the reach of education to the community.

Organizations/Agencies or non-formal education Institutions authorized to implement Package A, B and C are Community Learning Centers (CLC), Collective Learning Halls (SKB), Courses and Training Institutions (LKP), Study Groups, Smart Houses, and other non-formal education institutions.

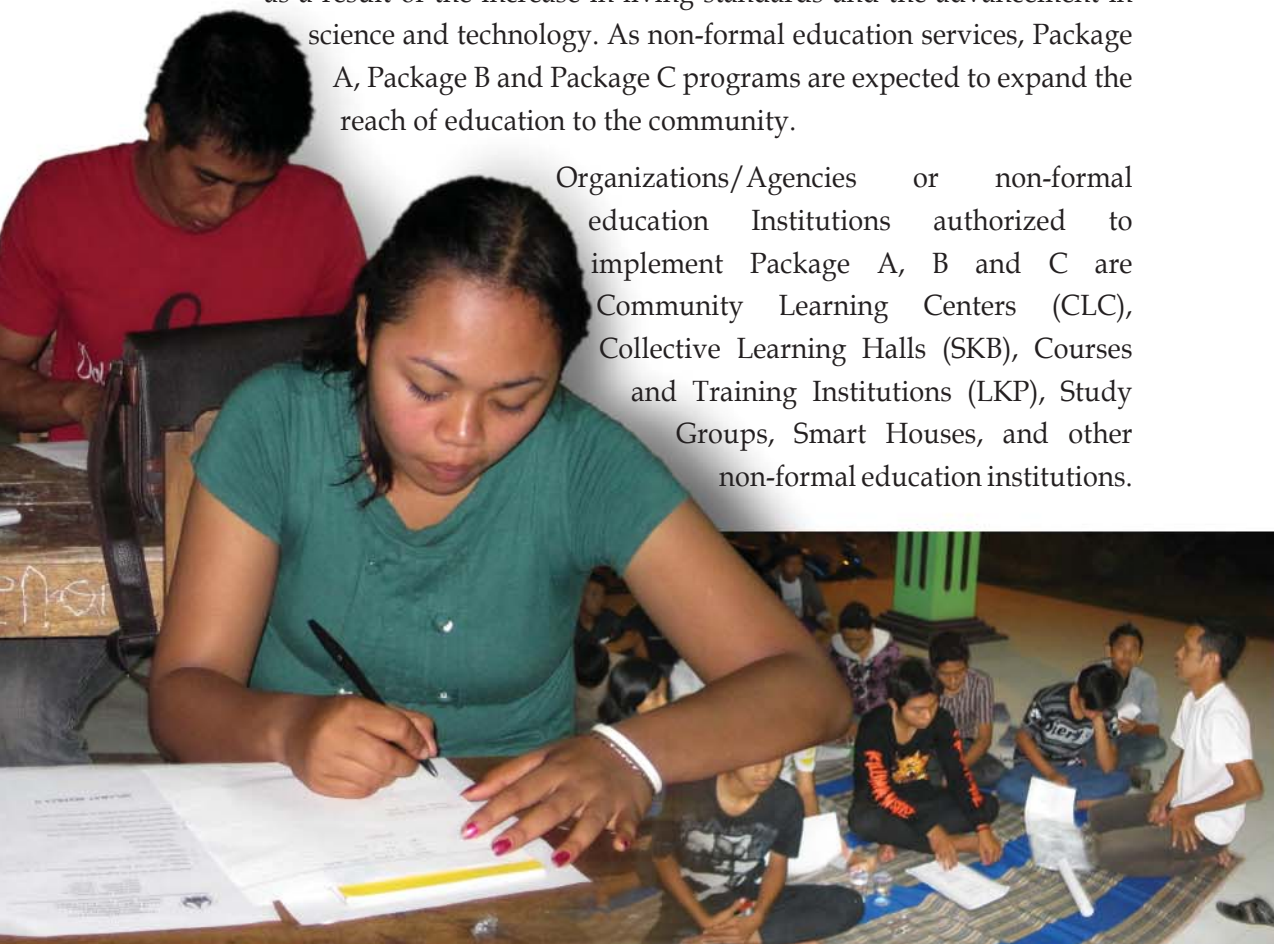
The implementation of Package A, B, and C are intended to provide education service to Indonesian citizens who did not have opportunity to access formal education for various factors and reasons. By the end of the program, the learners are expected to have knowledge, skills and attitudes equivalent to those in formal education.

The objectives of equivalency education are as follows:

- provide education service to Indonesian citizens, especially the youth, who dropped out of school: primary school (SD/MI), Junior Secondary School (SMP/MTs), and Senior Secondary School (SMA/MA).
- support and succeed the national policy on twelve-year compulsory education.
- improve the learners' knowledge, skills, and attitudes equivalent to those of formal education.
- equip learners with basics life skills that are useful to earn living or do business independently.
- equip learners with knowledge, skills and attitudes to make them able to pursue their education to a higher level, or increase their career at work.

### 4. Continuing Education

Continuing education is a learning opportunity for adults to improve their skills so that they could participate in the community or earn a job. Continuing education is organized to expand access to basic education and prepare learners to be community members who have the ability





to hold a mutual relationship with the socio-culture environment and natural surroundings, as well as develop capabilities for employment or higher education.

Continuing education can be provided through the following menus, namely:

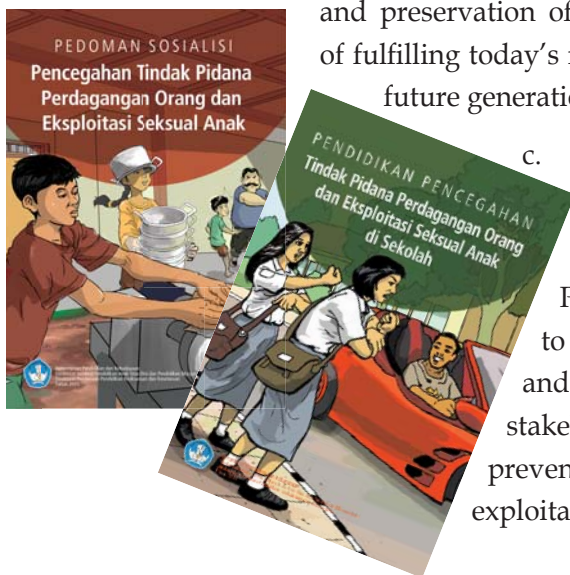


a. Women Empowerment Oriented Life Skills Learning

Women Empowerment Oriented Life Skills Learning is an affirmative action on the improvement of life skills ability comprising of personal, social, intellectual and vocational skills related to character education in the family, mother and child health, and the skills to process and use local resources which give adding-value to family life and independence.

b. Women's Education for Sustainable Development (ESD)

Women's Education for Sustainable Development (ESD) is the ability of women in utilizing local resources to increase concern and preservation of the environment with the principle of fulfilling today's needs without sacrificing the needs of future generations.



c. Capacity Building of Trafficking Prevention Task Force

Capacity Building of Trafficking Prevention Task Force is the endeavor to strengthen and form institution and increase coordination with various stakeholders in the district/city level to prevent human trafficking and child sexual exploitation through education.

d. Marginalized Children Empowerment Education

Marginalized Children Empowerment Education is an affirmative service for marginalized groups, especially children vulnerable to threats of domestic violence, HIV/AIDS and drugs in order to empower themselves so that they would be able to escape from the marginalization that they are experiencing. Competitive funding of Marginalized Children Empowerment Education is the operational grant for the implementation of learning/training of empowering marginalized children along with their environment.

5. Partnership and Networking

The implementation of literacy and equivalency education programs should not be considered as solely the government's responsibility. The government does have a duty to provide education for every citizen in all parts of Indonesia. Education is the right of every citizen so that he/she could pursue his/her aspiration, enhance quality of life, and become prosperous. The education funding requires participation from various parties (stakeholders). Their support to literacy and equivalency education programs should be developed and managed in order to achieve efficiency and effectiveness in realizing the educational development goals.

Education is considered as an investment to face a variety of problems. The problems faced are not only backwardness and limitations in knowledge and skills, but also other issues such as unemployment, poverty, unhealthy lifestyle, as well as other social diseases. That is why all countries in general put education in the highest priority.

In order to overcome the problems above, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development continue to develop services that are expected to improve the community's knowledge, skills and attitudes which in turn will improve the community's well-being and quality of life. Various policies and programs of community education are designed to provide educational services to wider community, especially people living in rural areas since they generally have limitations in various aspects of life such as economic, socio-cultural, geographical, and many others.

In implementing its programs, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development works with various institutions/organizations engaged in community education, such as: social organizations, religious organizations, women organizations, community service organizations at higher education, non-formal education units like CLCs, and other similar non-formal education units. In addition, the technical operation units, such as the Collective Learning Halls and Centers of Learning Development, actively participate in organizing and developing non-formal and informal education programs. These institutions, both managed by the community and by government, are the leading units in providing non-formal and informal education programs.

In developed countries, the financing of education is managed by taking part of the taxes paid by the public. Under very limited conditions in a developing country like Indonesia, the contribution of the public, especially the upper middle class, has the opportunity to help finance education. The community could contribute through a partnership to solve various problems in our education, which seem like a vicious circle or an iceberg, beautiful at its peak, but has a lot of problems underneath.

The concept of partnership is actually not something new in Indonesia. In Indonesian culture, long ago people actually had the concept of cooperation or partnership called “gotong royong” or “mutual aid”. The concept is not much different from the current term which is better known as “partnership”. Both have the same goal which is to collectively overcome problems or risks, progress and get a mutual benefit as well.

Partnership is a form of mutual cooperation and mutual respect among the parties that partner. The basis of this cooperation is trust to achieve goals and reach conducive environment for all parties involved.

Partnership in the field of literacy and equivalency education is an attempt to build good cooperation between the government (Directorate of Literacy and Equivalency Education Development) with all stakeholders. This partnership could be a media to build and expand access to improve the quality of community education.

Partnership is built when two parties are interested to build cooperation in carrying out their duties in the field of community education. The partnership will last as long as both parties are mutually benefited. Partnership in the field of community education is carried out at national and local levels.

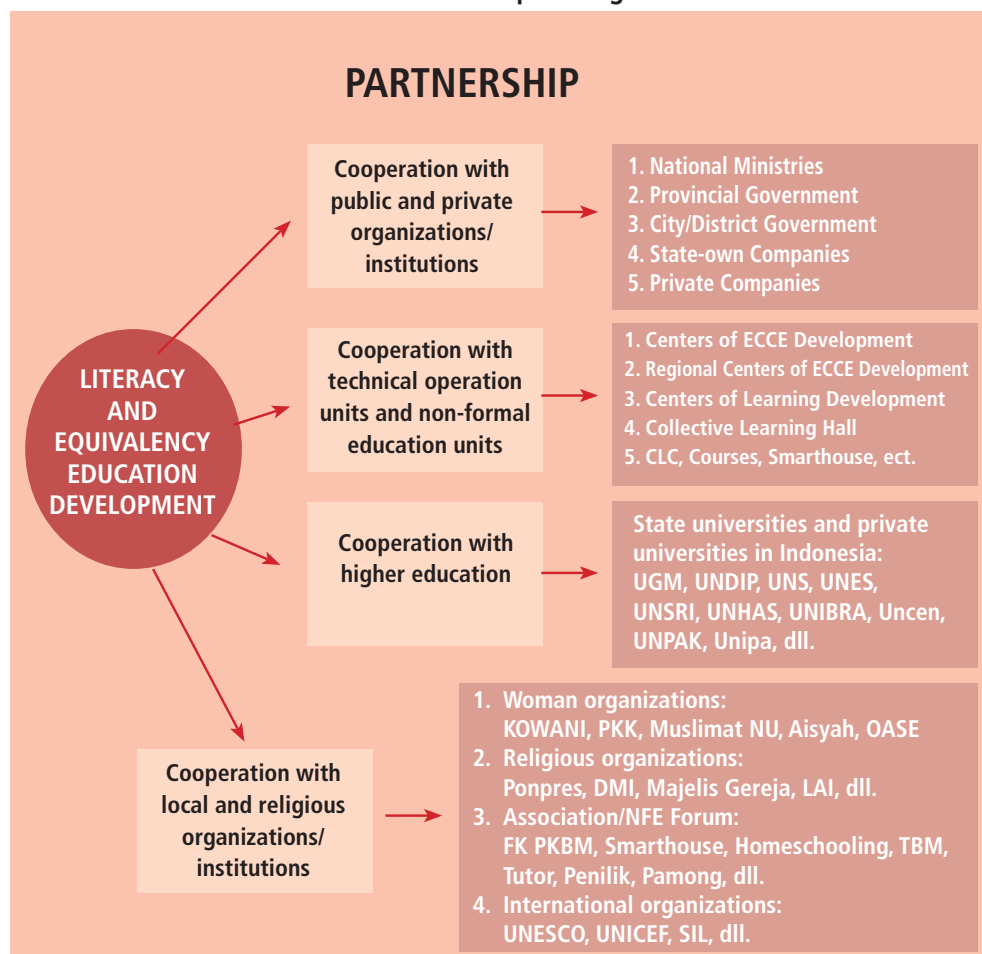
At the national level, the partnership is built with government institutions/organizations, private sectors, community organizations, and other stakeholders that have a concern and interest in the implementation of community education programs. Similarly, at the provincial or city/district level, partnership is built with relevant local government agencies, universities, community institutions/organizations, and technical operation units of education, social, economic, and especially non-formal education.

Partnerships in the implementation of literacy and equivalency education programs that have been conducted so far and will continue to be developed in the future could be described as follows:





**Figure 5**  
**Directorate of Literacy and Equivalency Education Development**  
**Partnership Strategies**



Partnership development strategies in the implementation of literacy and equivalency education programs should be directed to harness all potentials of the various institutions/agencies/ government organizations, private and public institutions, and other stakeholders, so that community education programs could be implemented optimally to empower the community that in the long run would improve the community's well-being and quality of life. Therefore, in order to expand the network of partnerships with various stakeholders, the strategy developed by Directorate of Community Education Development is to strengthen cooperation and partnerships with various stakeholders.

## 6. Data and Information Management System

In order to present open data and information to all relevant parties, since 2008, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development has developed web-based data and information system. Through the online system, each program implementing institution/organization could access a wide range of technical guidelines, curriculum and teaching-learning materials to be used in implementing literacy and equivalency education programs. In addition, at the beginning of new fiscal year, implementing institutions/partner organizations could see and know available and accessible program and funding schemes from the national budget to support their funding in implementing literacy and equivalency education programs according to their own needs and budget availability. For its accountability and transparency, the profile of each institution/partner organization receiving operational aid can be seen on the online system.

Currently, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development is strengthening data and information collection system by developing data applications, namely:

- Data application (Dapodik) for CLC as Non-Formal Education Institution: to identify CLC with National Identification Number of Non-Formal Education Unit (NPSN)
- Data application (Dapodik) for learners or students: to identify each learner with Student National Identification Number (NISN).

## 7. Institutional Strengthening

Community Learning Center (CLC) is a non-formal education unit that serves as a media and place of learning, training, and information which is established and managed by the community, aiming at empowering local potentials to improve knowledge, skills and attitudes of the community academically, economically and socio-culturally.

In accordance with its motto "from, by and for the community," CLC as the implementer of community education programs is expected to strengthen and expand its targets, so it has the ability to reach the unreached. CLC's flexibility in implementing community empowerment programs needs to be supported to improve its functions and roles. In addition, CLC's proximity to the people who need education or life skills is a very valuable asset to strengthen their education.

The rapid development of science and technology has made a rapid change in all areas of life that urges and encourages Directorate of Literacy and Equivalency Education Development to keep adapting

its programs according to the community's development and needs. This condition puts the role of non-formal education or community education in a very strategic position. Community education is no longer just needed to deal with the issue of illiteracy, but it is further expected to help people gain knowledge, skills or expertise in order to seize opportunities and competition in life.

CLC should also be neutral because it does not use any government's attributes. Thus, all parties or groups could take advantage of the existence of CLC for the sake of the community's empowerment. For example: there are CLCs managed by NGOs, held in Islamic center, initiated by a private company, and so on. The role of Directorate of Community Education is to facilitate them, while the initiative is entirely from the community.

The existence of CLC as explained above has great potentials to be used as the coordination basis of learning and training programs in the community. The availability of tutors, learning/reading materials, and infrastructures/facilities in the CLC become assets that could attract the community to join. In addition, the CLC will be more powerful and effective if all parties implementing similar programs join and establish a stable coordination.

CLC also has great potentials as a place of learning and development in the fields of arts and local culture. Cooperation can be done through training of local arts and culture to the existing tutors in CLC, sports and arts competition for the CLC's learners, the procurement of reading materials, and the stage for folk arts performance in the CLC.

Lessons learned from Japan with its *Kominkan* (a kind of CLC) gives an overview of the importance of partnership between government, private sector and local non-governmental organizations. CLC's strategic role of in empowering the community enhances the country's economic resilience. *Kominkan* does not only fulfill the citizens' educational needs, but it also addresses the social problems resulted by the condition of education, knowledge, and poverty backwardness. The investment on CLC will give positive "snowball" effects.

Non-formal education programs such as early childhood education (ECE), Equivalency Education Package A, Package B and Package C, gender mainstreaming in education, literacy education, women empowerment education, vocational courses and training, reading culture development through CRC, etc. could be flexibly accommodated in the CLC. Referring to the existence of CLC in Indonesia, and compared to how the Japanese treated the existence of *Kominkan*, there is an impression that CLC in Indonesia is "abandoned" by the government. CLC as a non-governmental organization is in need of a help and support from various parties, especially the government.

The support to CLC might also be in the forms of providing volunteer tutors or trainers who are expert or competent and have adequate managerial skills. Partnerships that allow the proper functioning of the CLC's role are highly dependent on the scope of the programs handled by the CLC in accordance with the local needs.

If viewed from the perspective of relevance, the function and role of the CLC in meeting the community learning and training needs are strongly associated with the provision of adequate infrastructures and facilities, as well as the fulfillment of human resource personnel who are relevant to the learning and training programs needed by the community. This relevance is not only related to the development of people's economy, but it is also linked to the learners' ability. CLC's flexibility in developing learning and training programs strongly support the relevance value. Therefore, CLC could show its benefit and meaning to the improvement of people's well-being and quality of life.

Based on today's condition and situation of CLC in Indonesia, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development has the responsibility to support the development of CLC to be more powerful and optimally functional. The Directorate acts as a catalyst and dynamist to empower CLC so that community education programs could be implemented sustainably, up to date with the rapid





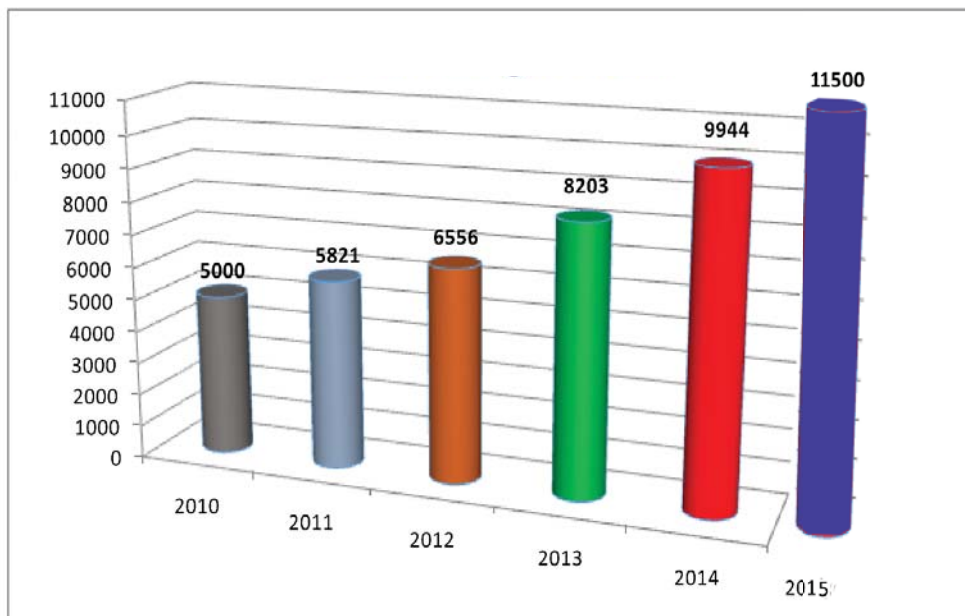
development of the community's needs, and able to overcome issues of education and training needed by the local community.

CLC could involve experts or university students from various majors through community service programs or Field Work. Partnerships with small and medium enterprises (SMEs) to accommodate the CLC's products could also be developed. Training master trainers or training of trainers especially in increasing the ability to manage activities (including administration and finance) is a big help in developing and improving the function and role of the CLC.

Through these partnerships with various parties, the CLC, as non-formal education unit, would be more prestigious and reliable. This branding can give an impact on the establishment of community's sense of belonging to the CLC. If it is so, the CLC would by itself be able to develop and secure its sustainability. This is something that everybody always dreams of.

Since 2010, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development has carried out institutional strengthening programs for non-formal education institutions. CLC as one of non-formal education institutions serves to provide non-formal education for public, and it is given an *Online Institutional Identification Number* (NILEM).

**Graphic-9**  
**Number of Community Learning Centers, 2010-2015**



In order to optimize the implementation of literacy and equivalency education, it is important to provide institutional strengthening programs to non-formal education institutions through the following services.

- a. **Institutional Quality Upgrading of Community Learning Center**  
Institutional Quality Upgrading of Community Learning Center is the institutional empowerment in capacity building in management, governance, infrastructures and facilities, and human resource.
- b. **Community Learning Center Performance Evaluation**  
To sustain and improve the quality of the programs implemented by CLCs, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development will strengthen CLC-performance evaluation system to improve its capability and capacity in delivering programs based on the national standards.
- c. **Community Learning Center Accreditation**  
All CLCs that have met the national standards and have a good performance evaluation score will obtain accreditation from the Non-Formal Education National Accreditation Council (BAN-PNF).
- d. **Quality Upgrading of Community Learning Center Communication Forum**  
Quality Upgrading of Community Learning Center Communication Forum is the ability to empower the management, governance, efficiency, professionalism, resources and character of Community Learning Center Communication Forum (FK PKBM) in the national, provincial and city/district level.
- e. **Community Learning Center Assistance**  
Community Learning Center Assistance is the assistance or other technical support given by higher education institutions

or professional institutions/organizations to improve the institutional capacity of community learning centers. This comprises of development and strengthening of community learning center management as well as service development to prepare the community learning center in attaining accreditation.

f. Revitalizing Collective Learning Hall (SKB) as Non-Formal Education Institution

After the regional autonomy system was regulated, Collective Learning Hall (SKB) that used to function as Central Technical Implementing Unit (UPT) was changed into Local Technical Implementing Unit (UPTD). However, in its development, SKB seems to receive less attention from the local government. That is why SKB is perceived unable run its function optimally in developing models of non-formal education implementation. In order to revitalize its function, the national government is



facilitating the development of SKB as a non-formal education institution. SKB is expected to function optimally as a center or model in non-formal education.

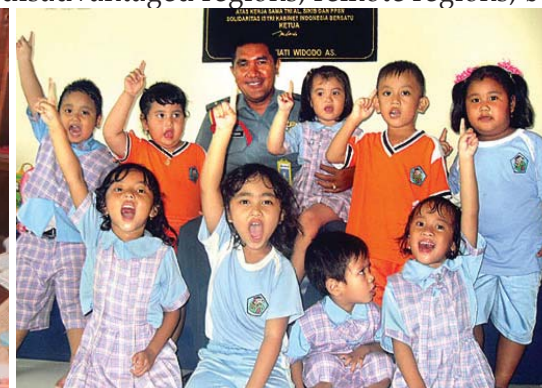
g. Pioneering and Enhancing Collective Learning Hub

Pioneering and Enhancing Collective Learning Hub is an endeavor to facilitate learning communities by reinventing the principle of public space as a place for problem solving through collective learning by involving informal, formal and neighborhood leaders.

Learning is implemented together within the community while maximizing institutional networking as learning resources.

h. Pioneering and Enhancing Smart House

Pioneering and Enhancing Smart House is the endeavor to facilitate learning communities to build smart houses as non-formal education institutions especially in indigenous lands, disadvantaged regions, remote regions, border regions,



and farthest regions, as an effort to reach the unreached communities.

i. Empowering Homeschooling Community (homeschooling)

It is important for the government to appreciate community participation in providing non-formal education services to people in need. According to the needs of society, especially in urban areas where the demand is high in employment and daily activities, some people could not get the opportunity to access formal education. This condition initiates the presence of home-school as a learning facility, especially in the form of equivalency education. Directorate of Literacy and Equivalency Education is to appreciate the community by providing education services through that learning facility.





## D. Competitive Funding and Financing

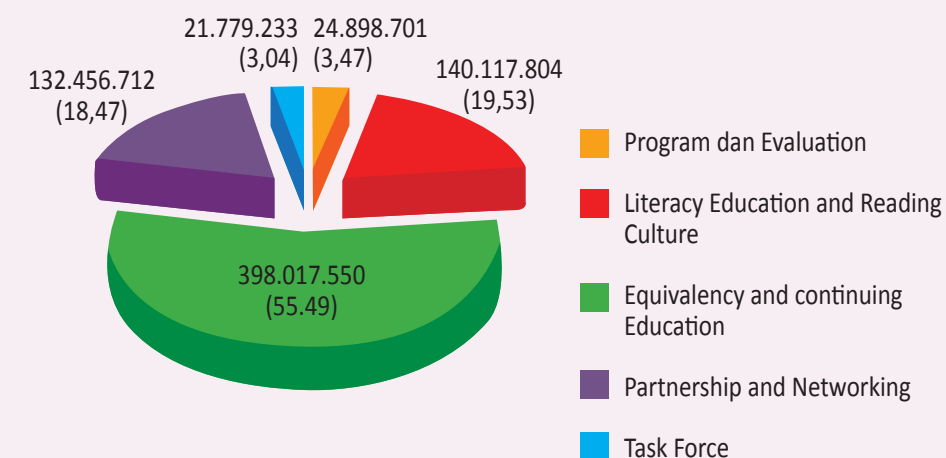
Directorate of Literacy and Equivalency Education is given the responsibility to manage a certain amount of budget allocated from the national budget. The management of the budget is allocated to support the implementation of literacy and equivalency education programs and activities as illustrated in the following table.

**Table-8**  
**Budget of Directorate of Literacy and Equivalency Education Development, 2016**

No	Working Unit	Social Expenditure		Material Expenditure Given to the Community/Local Government		Capital Expenditure	Total (IDR 000)
		Target	Total	Target	Total		
	DIRECTORATE OF LITERACY & EQUIVALENCY EDUCATION DEVELOPMENT	18 packages	1.800.000	35 communities 51 villages 416.170 people 662 institutions 20 locations	599.846.800	117.423.200	717.270.000
1.	Program and Evaluation	18 packages	1.800.000	35 communities 51 villages	8.340.000	14.873.701	24.898.701
2.	Literacy Education & Reading Culture	-	-	169.370 people 31 packages	106.097.000	34.020.804	140.117.804
3.	Equivalency and Continuing Education	-	-	246.800 people 20 locations	374.034.800	26.582.750	398.017.550
4.	Partnership and Networking	-	-	662 lbg	112.450.000	20.006.712	132.456.712
5.	Task Force	-	-	-	-	21.779.233	21.779.233

**Graphic-10**

**Percentage of Budget by Sub-Directorate/Sub-Division**  
**Directorate of Literacy and Equivalency Education Development, 2016**  
Based on the budget allocation above, the operational aid that could be accessed by implementing organizations/institutions are as follows.



**Table-9**  
**Operational Aid (Competitive Funding)**  
**Directorate of Literacy and Equivalency Education Development**

No	Operational Aid	Volume	Unit Cost	Total (IDR)
1.	Basic Literacy Education for areas with the highest illiterate population	64.500 people	450.000	29.025.000.000
2.	Basic Literacy Education for Papua and outermost, outer-front and underdeveloped areas	30.000 people	750.000	22.500.000.000
3.	Basic Literacy Education for Tribal Community at Remote Areas	1.000 people	2.500.000	2.500.000.000
4.	Self-Entrepreneurship Literacy Education	77.370 people	600.000	46.422.000.000
5.	Equivalency Education-Package A	12.640 people	970.000	12.260.800.000
6.	Equivalency Education-Package B	123.160 people	1.400.000	172.424.000.000
7.	Equivalency Education-Package C	92.500 people	1.700.000	57.250.000.000

8.	Equivalency Education-Vocational Package C	11.000 people	2.000.000	22.000.000.000
9.	Life Skills Education for Marginalized Women	10.000 people	1.000.000	10.000.000.000
10.	Marginalized Women Empowerment Movement (GPPM)	20 packages	130.000.000	2.600.000.000
11.	Indonesia Reading Movement (GIM)	31 packages	250.000.000	7.750.000.000
12.	Capacity Building for Partner Organizations	50 institutions	50.000.000	2.500.000.000
13.	Capacity Building for Non-Formal Education Institutions (CLC and Smart House)	400 institutions	100.000.000	40.000.000.000
14.	Learning Facilities for Community Reading Centers	120 institutions	50.000.000	6.000.000.000
15.	Community Reading Center at Collective Learning Hall (SKB)	40 institutions	75.000.000	3.000.000.000
16.	Learning Facilities for Collective Learning Hall (SKB)	30 institutions	125.000.000	3.750.000.000
17.	Revitalization of Collective Learning Hall (SKB)	22 institutions	2.600.000.000	57.200.000.000
18.	Assistance for Homeschooling Community	35 communities	35.000.000	1.225.000.000
19.	Vocational Village	20 villages	200.000.000	4.000.000.000
20.	Literacy Village	31 villages	140.000.000	4.340.000.000
21.	Natural Disaster Response	18 packages	100.000.000	1.800.000.000
Total				605.946.800.000

Each institution/organization implementing literacy and equivalency education programs as well as partner agencies that want to access the operational aid and receive a detailed description on the requirements and procedures for proposals can visit: <http://paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas/>.

## E. Operational Aid Mechanism 2016

### 1. Basic Literacy Education (for areas with the highest illiterate population)

No	Component	Explanation
1.	Definition	An education service dedicated to illiterate population at areas with the highest illiteracy rate to enable them to read, write, count, speak Bahasa Indonesia and analyze so that they could actualize themselves.
2.	Objective	Equip illiterate population with basic reading, writing, counting, speaking skills to improve their daily quality of life
3.	Target	Illiterate population, with priority of 15-59 years of age, at 40 districts with the highest illiteracy rate (outside Papua and West Papua Provinces)
4.	Requirement	The beneficiaries of the aid are Community Learning Centers (CLCs), Collective Learning Halls (SKB), Smart Houses, and Civil Society Organizations implementing basic literacy education program. They are to fulfill the following requirements: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legality</li> <li>• Bank account</li> <li>• Tax ID number</li> <li>• Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	B u d g e t Allocation	IDR 450,000 per person for 64,500 people with the total amount of budget IDR 29,025,000,000

The distribution of the operational aid above is as follows.

No	Province	District	Target (people)	Budget (IDR)
1.	Banten	1 Lebak	2,000	900,000,000
2.	West Java	2 Indramayu	2,500	1,125,000,000
		3 Bogor	3,000	1,350,000,000
		4 Cirebon	1,800	810,000,000
		5 Karawang	1,500	675,000,000
		6 Bekasi	1,500	675,000,000



3.	Central Java	7	Brebes	2,000	900,000,000
		8	Sragen	1,200	540,000,000
		9	Tegal	1,200	540,000,000
		10	Pemalang	1,200	540,000,000
		11	Blora	1,200	540,000,000
		12	Pati	1,200	540,000,000
		13	Grobogan	1,200	540,000,000
4.	East Java	14	Jember	4,000	1,800,000,000
		15	Sumenep	2,000	900,000,000
		16	Sampang	1,500	675,000,000
		17	Bangkalan	1,500	675,000,000
		18	Probolinggo	1,500	675,000,000
		19	Malang	1,500	675,000,000
		20	Pasuruan	1,500	675,000,000
		21	Bojonegoro	1,000	450,000,000
		22	Pamekasan	1,000	450,000,000
		23	Tuban	1,000	450,000,000
		24	Situbondo	1,000	450,000,000
		25	Bondowoso	1,000	450,000,000
5.	Bali		Lumajang	1,000	450,000,000
		27	Bangli	1,000	450,000,000
		28	Klungkung	1,000	450,000,000
6.	West Nusa Tenggara	29	Karangasem	1,000	450,000,000
		30	Lombok Barat	2,000	900,000,000
		31	Lombok Tengah	2,000	900,000,000
7.	East Nusa Tenggara	32	Lombok Timur	1,000	450,000,000
		33	Sumba Tengah	1,000	450,000,000
		34	Sumba Barat Daya	1,000	450,000,000
		35	Timor Tengah Utara	1,000	450,000,000

8.	South Sulawesi	36	Toraja Utara	1,500	675,000,000
		37	Bantaeng	1,000	450,000,000
9.	North Sumatera	38	Nias Selatan	1,500	675,000,000
10.	West Kalimantan	39	Kayong Utara	1,500	675,000,000
		40	Sanggau	1,500	675,000,000
11.	Budget at the national government			5,500	2,475,000,000
Total				64,500	29,025,000,000

## 2. Basic Literacy Education for Papua and Outermost, Outer-Front and Underdeveloped Areas (3T)

No	Component	Explanation
1.	Definition	An education service dedicated to illiterate population at living in Papua and Outermost, Outer-Front and Underdeveloped Areas (3T) to enable them to read, write, count, speak Bahasa Indonesia and analyze so that they could actualize themselves.
2.	Objective	Equip illiterate population with basic reading, writing, counting, speaking skills to improve their daily quality of life
3.	Target	Illiterate population, with priority of 15-59 years of age, at 40 districts with the highest illiteracy rate (outside Papua and West Papua Provinces)
4.	Requirement	The beneficiaries of the aid are Community Learning Centers (CLCs), Collective Learning Halls (SKB), Smart Houses, and Civil Society Organizations implementing basic literacy education program. They are to fulfill the following requirements: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legality</li> <li>• Bank account</li> <li>• Tax ID number</li> <li>• Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 750,000 per person for 30,000 people with the total amount of budget IDR 22,500,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papua and West Papua Provinces: 20,750 people, IDR 15,562,500,000</li> <li>• Outermost, Outer-Front and Underdeveloped Areas (3T): 9,250 people, IDR 6,938,000,000</li> </ul>

The distribution of the operational aid above is as follows.

No	Province	District	Target (people)	Budget (IDR)
A.	Papua and West Papua		20.750	15.562.500.000
1.	Papua	Deiyai	3.500	2,625,000,000
		Puncak Jaya	2.500	1,875,000,000
		Memberamo Tengah	2.000	1,500,000,000
		Nduga	2.000	1,500,000,000
		Jayawijaya	2.000	1,500,000,000
		Lanny Jaya	2.000	1,500,000,000
		Puncak	1.000	750,000,000
		Intan Jaya	1.000	750,000,000
		Yalimo	1.000	750,000,000
		Paniai	1.000	750,000,000
		Tolikara	1.000	750,000,000
		Keerom	750	562,500,000
2.	West Papua	Teluk Wondama	1.000	750,000,000
B.	Outermost, Outer-Front and Underdeveloped Areas (3T)		9.250	6,938,000,000
3.	West Sumatera	Mentawai	1.000	750,000,000
4.	North Sumatera	Serdang Bedagai	750	562,500,000
5.	West Kalimantan	Bengkayang	750	562,500,000
6.	West Kalimantan	Kapuas Hulu	750	562,500,000
7.	Central Sulawesi	Sigi	750	562,500,000
8.	Central Sulawesi	Parigi Moutong	750	562,500,000
9.	West Sulawesi	Polewali Mandar	750	562,500,000
10.	West Kalimantan	Sambas	750	750,000,000
11.	South Sulawesi	Jeneponto	750	562,500,000
12.	North Kalimantan	Nunukan	750	562,500,000
13.	Southeast Sulawesi	Konawe	500	375,000,000
14.	East Nusa Tenggara	Timor Tengah Selatan	500	375,000,000
			500	375,000,000
Total			30.000	22,500,000,000

### 3. Basic Literacy Education for Tribal Remote Community

No	Component	Explanation
1.	Definition	An education service dedicated to illiterate tribal communities at remote areas to enable them to read, write, count, speak Bahasa Indonesia and analyze so that they could actualize themselves.
2.	Objective	Equip illiterate population with basic reading, writing, counting, speaking skills to improve their daily quality of life
3.	Target	Illiterate population, with priority of 15-59 years of age, at 40 districts with the highest illiteracy rate (outside Papua and West Papua Provinces)
4.	Requirement	The beneficiaries of the aid are Community Learning Centers (CLCs), Collective Learning Halls (SKB), Smart Houses, and Civil Society Organizations implementing basic literacy education program. They are to fulfill the following requirements: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legality</li> <li>• Bank account</li> <li>• Tax ID number</li> <li>• Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 2,500,000 per person for 1,000 people with the total amount of budget IDR 2,500,000,000

The distribution of the operational aid above is as follows.

No	Tribe/Community	District/Province	Target (people)	Budget (IDR)
1.	Anak Dalam	Sarolangun, Jambi	100	25,000,000
2.	Baduy/Rawayan/Panamping/Dangka	Lebak, Banten	100	25,000,000
3.	Samin	Blora, Jawa Tengah	100	25,000,000
4.	Kajang (Tana Toa)	Bulukumba, Sulawesi Selatan	100	25,000,000
5.	Dayak	Barito Utara, Barito Timur, Murung Raya, Kalimantan Tengah	200	50,000,000



6.	Bajo	Konawe Kepulauan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	100	25,000,000
7.	Sasak Dayan	Lombok Timur, NTB	100	25,000,000
8.	Dani	Dogiyai, Papua	100	25,000,000
9.	Talang Mamak	Indragiri Hulu, Riau	100	25,000,000
Total			1.000	2.500.000.000

#### 4. Self-Entrepreneurship Literacy Education

No	Component	Explanation
1.	Definition	Part of advanced literacy education service that organizes literacy learning for learners who have completed basic literacy education in order to preserve and develop their basic literacy competencies.  To maintain the learners' basic literacy skills, self-entrepreneurship literacy education is provided as a submenu of advanced literacy education service
2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>• preserve and improve the learners' basic literacy skills</li> <li>• improve the learners' entrepreneurial skills individually or in groups based on their potentials and local needs</li> <li>• improve the learners' knowledge, skills and attitudes in developing their business</li> </ul>
3.	Target	Indonesian citizens, especially post-basic literacy learners living at 71 districts in 18 provinces
4.	Requirement	The beneficiaries of the aid are Community Learning Centers (CLCs), Collective Learning Halls (SKB), Smart Houses, Courses and Training Institutions (LKP) and Civil Society Organizations implementing literacy education program. They are to fulfill the following requirements: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legality</li> <li>• Bank account</li> <li>• Tax ID number</li> <li>• Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 600,000 per person for 77,370 people with the total amount of budget IDR 46,422,000,000

The distribution of the operational aid above is as follows.

No	Province	District	Target (people)	Budget (IDR)
1.	Banten		1,500	900,000,000
		1 Lebak	1,000	600,000,000
		2 Pandeglang	500	300,000,000
2	West Java		9,300	5,580,000,000
		3 Indramayu	1,800	1,080,000,000
		4 Bogor	2,000	1,200,000,000
		5 Cirebon	1,300	780,000,000
		6 Karawang	1,200	720,000,000
		7 Bekasi	1,200	720,000,000
		8 Subang	800	480,000,000
		9 Pangandaran	500	300,000,000
		10 Sukabumi	500	300,000,000
3.	Central Java		7,000	4.200.000.000
		11 Brebes	2,000	1,200,000,000
		12 Sragen	800	480,000,000
		13 Tegal	1,000	600,000,000
		14 Pemasang	800	480,000,000
		15 Blora	800	480,000,000
		16 Pati	800	480,000,000
		17 Grobogan	800	480,000,000
4.	East Java		19,500	11.700.000.000
		18 Jember	2,200	1,320,000,000
		19 Sumenep	2,000	1,200,000,000
		20 Sampang	1,500	900,000,000
		21 Bangkalan	1,500	900,000,000
		22 Probolinggo	1,500	900,000,000
		23 Malang	1,300	780,000,000
		24 Pasuruan	1,300	780,000,000
		25 Bojonegoro	1,000	600,000,000
		26 Pamekasan	2,000	1,200,000,000
		27 Tuban	1,000	600,000,000
		28 Situbondo	1,400	840,000,000

		29	Bondowoso	1,500	900,000,000
		30	Lumajang	1,300	780,000,000
5.	Bali			1,500	900,000,000
		31	Bangli	500	300,000,000
		32	Klungkung	500	300,000,000
		33	Karangasem	500	300,000,000
6.	West Nusa Tenggara			3,800	2.280.000.000
		34	Lombok Barat	1,800	1,080,000,000
		35	Lombok Tengah	1,500	900,000,000
		36	Lombok Timur	500	300,000,000
7.	East Nusa Tenggara			2,000	1.200.000.000
		37	Sumba Tengah	500	300,000,000
		38	Sumba Barat Daya	1,000	600,000,000
		39	Timor Tengah Utara	500	300,000,000
8.	South Sulawesi			3,400	2.040.000.000
		40	Toraja Utara	1,000	600,000,000
		41	Bantaeng	800	480,000,000
		42	Takalar	800	480,000,000
		43	Jeneponto	800	480,000,000
9.	North Sumatera			800	480,000,000
		44	Nias Selatan	800	480,000,000
10.	West Sulawesi			1,200	720.000.000
		45	Mamuju Utara	800	480,000,000
		46	Mamasa	400	240,000,000
11.	Lampung			800	480,000,000
		47	Lampung Selatan	800	480,000,000
12.	West Kalimantan			1,800	1.080.000.000
		48	Kayong Utara	800	480,000,000
		49	Kubu Raya	500	300,000,000
		50	Melawi	500	300,000,000
13.	Papua			11,700	7.020.000.000

		51	Nduga	1,800	1,080,000,000
		52	Intan Jaya	1,000	600,000,000
		53	Memberamo Tengah	2,000	1,200,000,000
		54	Lanny Jaya	1,000	600,000,000
		55	Tolikara	600	360,000,000
		56	Jayawijaya	1,200	720,000,000
		57	Sarmi	400	240,000,000
		58	Keerom	900	540,000,000
		59	Yalimo	500	300,000,000
		60	Dogiyai	500	300,000,000
		61	Paniai	500	300,000,000
		62	Puncak Jaya	800	480,000,000
		63	Yahukimo	500	300,000,000
14.	West Papua			1,500	900.000.000
		64	Teluk Wondama	500	300,000,000
		65	Manokwari	600	360,000,000
		66	Sorong Selatan	400	240,000,000
15.	South Sumatera			1,000	600,000,000
		67	Banyuasin	1,000	600,000,000
16.	Riau Island			500	300,000,000
		68	Karimun	500	300,000,000
17.	Central Sulawesi			1,800	1.080.000.000
		69	Donggala	800	480,000,000
		70	Parigi Moutong	1,000	600,000,000
18.	Southeast Sulawesi			500	300,000,000
		71	Konawe Kepulauan	500	300,000,000
19.	Budget at the national government			7,770	4,662,000,000
Total				77,370	46,422,000,000



## 5. Equivalency Education-Package A

No	Component	Explanation
1.	Definition	A non-formal education providing the opportunity for people, especially children and youth who dropped out of primary school (SD/MI), to improve their knowledge, skills and attitudes equivalent to those graduated from primary school (SD/MI).
2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>provide education service to Indonesian citizens, especially children and youth, who dropped out of primary school (SD/MI)</li> <li>support and succeed the national policy on twelve-year compulsory education</li> <li>improve the learners' knowledge, skills, and attitudes equivalent to those graduated from primary school (SD/MI)</li> <li>equip learners with basics life skills that are useful to earn living or do business independently</li> <li>equip learners with knowledge, skills and attitudes to make them able to pursue their education to a higher level, or increase their career at work</li> </ul>
3.	Target	Indonesian citizens who dropped out of primary school (SD/MI), with the priority at school age who are willing to continue and finish their education through Package A.
4.	Requirement	<p>The beneficiaries of the aid are Community Learning Centers (CLCs), Collective Learning Halls (SKB), Courses and Training Institutions (LKP), Study Groups, Smart Houses, Home Schools, and other non-formal education institutions. They are to fulfill the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Legality</li> <li>Bank account</li> <li>Tax ID number</li> <li>Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 970,000 per person for 12,640 people with the total amount of budget IDR 12,260,800,000

## 6. Equivalency Education-Package B

No	Component	Explanation
1.	Definition	A non-formal education providing the opportunity for people, especially children and youth who dropped out of junior secondary school (SMP/MTs), to improve their knowledge, skills and attitudes equivalent to those graduated from junior secondary school (SMP/MTs).
2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>provide education service to Indonesian citizens, especially children and youth, who dropped out of primary school (SD/MI)</li> <li>support and succeed the national policy on twelve-year compulsory education</li> <li>improve the learners' knowledge, skills, and attitudes equivalent to those graduated from junior secondary school (SMP/MTs)</li> <li>equip learners with basics life skills that are useful to earn living or do business independently</li> <li>equip learners with knowledge, skills and attitudes to make them able to pursue their education to a higher level, or increase their career at work</li> </ul>
3.	Target	Indonesian citizens who dropped out of junior secondary school (SMP/MTs), with the priority at school age who are willing to continue and finish their education through Package B.
4.	Requirement	<p>The beneficiaries of the aid are Community Learning Centers (CLCs), Collective Learning Halls (SKB), Courses and Training Institutions (LKP), Study Groups, Smart Houses, Home Schools, and other non-formal education institutions. They are to fulfill the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Legality</li> <li>Bank account</li> <li>Tax ID number</li> <li>Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 1,400,000 per person for 123,160 people with the total amount of budget IDR 172,424,000,000

## 7. Equivalency Education-Vocational Package C

No	Component	Explanation
1.	Definition	A non-formal education providing the opportunity for people, especially children and youth who dropped out of senior secondary school (SMA/SMK/MA), to improve their knowledge, skills and attitudes equivalent to those graduated from senior secondary school (SMA/SMK/MA).
2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>• provide education service to Indonesian citizens, especially children and youth, who dropped out of senior secondary school (SMA/SMK/MA)</li> <li>• support and succeed the national policy on twelve-year compulsory education</li> <li>• improve the learners' knowledge, skills, and attitudes equivalent to those graduated from senior secondary school (SMA/SMK/MA)</li> <li>• equip learners with basics life skills that are useful to earn living or do business independently</li> <li>• equip learners with knowledge, skills and attitudes to make them able to pursue their education to a higher level, or increase their career at work</li> </ul>
3.	Target	Indonesian citizens who dropped out of senior secondary school (SMA/SMK/MA), with the priority at school age who are willing to continue and finish their education through Package C.
4.	Requirement	<p>The beneficiaries of the aid are Community Learning Centers (CLCs), Collective Learning Halls (SKB), Courses and Training Institutions (LKP), Study Groups, Smart Houses, Home Schools, and other non-formal education institutions. They are to fulfill the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legality</li> <li>• Bank account</li> <li>• Tax ID number</li> <li>• Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 1,700,000 per person for 92,500 people with the total amount of budget IDR 157,250,000,000

## 8. Equivalency Education-Vocational Package C

No	Component	Explanation
1.	Definition	A non-formal education providing the opportunity for people, especially children and youth who dropped out of senior secondary school (SMA/SMK/MA), to improve their knowledge, skills and attitudes equivalent to those graduated from senior secondary school (SMA/SMK/MA).
2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>• provide education service to Indonesian citizens, especially children and youth, who dropped out of senior secondary school (SMA/SMK/MA)</li> <li>• support and succeed the national policy on twelve-year compulsory education</li> <li>• improve the learners' knowledge, skills, and attitudes equivalent to those graduated from senior secondary school (SMA/SMK/MA)</li> <li>• equip learners with skills based on the National Framework of Qualification (NFQ) that are useful to earn living or do business independently</li> <li>• equip learners with knowledge, skills and attitudes to make them able to pursue their education to a higher level, or increase their career at work</li> </ul>
3.	Target	Indonesian citizens who dropped out of senior secondary school (SMA/SMK/MA), with the priority at school age who are willing to continue and finish their education through Package C.
4.	Requirement	<p>The beneficiaries of the aid are Community Learning Centers (CLCs), Collective Learning Halls (SKB), Courses and Training Institutions (LKP), Study Groups, Smart Houses, Home Schools, and other non-formal education institutions. They are to fulfill the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legality</li> <li>• Bank account</li> <li>• Tax ID number</li> <li>• Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 2,000,000 per person for 11,000 people with the total amount of budget IDR 22,000,000,000



## 9. Life Skills Education for Marginalized Women

No	Component	Explanation
1.	Definition	An affirmative action on the improvement of marginalized women's life skills, comprising of personal, social, intellectual and vocational skills related to character education in the family, mother and child health, and the skills to process and use local resources which give adding-value to family life and independence.
2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>improve marginalized women's life skills, so that they have the ability to earn a living by themselves or in groups to reinforce their identity and quality of life for their family.</li> <li>foster women's self-reliance and active participation in decision-making in the family, community and nation.</li> <li>foster women's desire to continue learning and inventing by engaging in learning groups and business.</li> <li>increase women's awareness of their rights as citizens based on an understanding towards human rights, Rights of the Child and Women's Rights, as well as alternative solutions to human rights violations.</li> <li>foster women's positive attitude in facing social differences and solving problems caused by dialogues and discussions.</li> <li>improve women's education and skills, which in turn could improve their family quality of life and the life of the next generation.</li> </ul>
3.	Target	Women (especially housewives) who are at productive age, live in the village, come from economically unfortunate family, and are prone to social risks caused by the social life of the community: farmers, fishermen, domestic workers, migrants, etc.
4.	Requirement	<p>The beneficiaries of the aid are Community Learning Centers (CLCs), Collective Learning Halls (SKB), Courses and Training Institutions (LKP), Smart Houses, and other non-formal education institutions. They are to fulfill the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Legality</li> <li>Bank account</li> <li>Tax ID number</li> <li>Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 1,000,000 per person for 10,000 people with the total amount of budget IDR 10,000,000,000

## 10. Marginalized Women Empowerment Movement (GPPM)

No	Component	Explanation
1.	Definition	An activity to socialize, mobilize and increase awareness from various parties and communities to improve quality of life of women as housewives and the first and foremost educators in family, which in turn could improve their family quality of life and the life of the next generation.
2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>improve the local government and relevant stakeholders' commitment in enhancing women's quality of life as housewives; the first and foremost educators in family</li> <li>formulate regional action plan for Marginalized Women Empowerment Movement (GPPM) at district/city level</li> <li>improve marginalized women's education and skills, which in turn could improve their family quality of life and the life of the next generation</li> </ul>
3.	Target	20 locations (underdeveloped villages) with high illiterate population but have strong commitment to improve marginalized women's education and skills
4.	Requirement	<p>The beneficiaries of the aid are village government in a district/city that could fulfill the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>have local potentials, resources and products possible for economic development</li> <li>have small and Medium Enterprises (SMEs)</li> <li>have willingness and contribution to support Marginalized Women Empowerment Movement (GPPM)</li> <li>have bank account c.q. village government</li> <li>have recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 13,000,000 per village/location (district) for 20 districts with the total amount of budget IDR 2,600,000,000

## 11. Indonesia Reading Movement (GIM)

No	Component	Explanation
1.	Definition	An activity to socialize, mobilize and increase awareness from various parties and communities to improve grow reading interest and habit in daily life.
2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>improve the local government and relevant stakeholders' commitment in developing the community reading culture</li> <li>formulate regional action plan for Indonesia reading Movement (GIM) at district/city level</li> <li>socialize the benefits of reading in daily life</li> </ul>
3.	Target	31 districts/cities with high illiterate population but have strong commitment to increase adult literacy rate
4.	Requirement	<p>The beneficiaries of the aid are district/city government that could fulfill the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>have at least 10 Community Reading Centers (CRC)</li> <li>establish CRC Forum</li> <li>have willingness and contribution to support Marginalized Women Empowerment Movement (GPPM)</li> <li>have bank account c.q. village government</li> <li>have recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 250,000,000 per district/city for 31 districts/cities with the total amount of budget IDR 7,750,000,000

## 12. Capacity Building for Partner Organizations

No	Component	Explanation
1.	Definition	Facilitation provided by Directorate of Literacy and Equivalency Education Development for various institutions/partner organizations, such as: Community Learning Center Forum, Collective Learning Hall Forum, Smart House Forum, Community Reading Center Forum, and Literacy Tutor Forum at national, provincial, and district/city levels, in order to increase their institutional and management capacity in delivering non-formal education services to their members professionally.

2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>Improve the organization management to strengthen the identity and quality of the institution</li> <li>Improve the administration quality of the organization</li> <li>Improve the organization membership system by making application</li> </ul>
3.	Target	Partner organizations/institutions, such as: Community Learning Center Forum, Collective Learning Hall Forum, Smart House Forum, Community Reading Center Forum, and Literacy Tutor Forum at national, provincial, and district/city levels
4.	Requirement	<p>The beneficiaries of the aid are to have and fulfill the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Legality</li> <li>Bank account</li> <li>Tax ID number</li> <li>Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 50,000,000 per institution for 50 institutions with the total amount of budget IDR 2,500,000,000

## 13. Capacity Building for Non-Formal Education Institutions (CLC and Smart House)

No	Component	Explanation
1.	Definition	Facilitation provided by Directorate of Literacy and Equivalency Education Development for partner organizations, such as: Community Learning Centers and Smart Houses in order to increase their institutional and management capacity in delivering non-formal education services to their learners professionally.
2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>Improve the organization management to strengthen the identity and quality of the institution</li> <li>Improve the administration quality of the organization</li> <li>Improve the organization membership system by making application</li> </ul>
3.	Target	Community Learning Centers and Smart Houses



4.	Requirement	The beneficiaries of the aid are to have and fulfill the following requirements: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legality</li> <li>• Bank account</li> <li>• Tax ID number</li> <li>• Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 100,000,000 per institution for 40 institutions with the total amount of budget IDR 40,000,000,000

#### 14. Learning Facilities for Community Reading Centers

No	Component	Explanation
1.	Definition	Facilitation provided by Directorate of Literacy and Equivalency Education Development for Community Reading Centers (CRCs) and the like to improve their management and administration in providing reading materials to their members
2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Improve Community Reading Centers' management and administration</li> <li>• Improve Community Reading Centers' infrastructures and facilities to enhance their quality service</li> <li>• Improve the quantity and quality of reading materials based on the community needs</li> </ul>
3.	Target	Community Reading Centers
4.	Requirement	The beneficiaries of the aid are to have and fulfill the following requirements: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legality</li> <li>• Bank account</li> <li>• Tax ID number</li> <li>• Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 50,000,000 per institution for 120 institutions with the total amount of budget IDR 6,000,000,000

#### 15. Community Learning Center at Collective Learning Hall

No	Component	Explanation
1.	Definition	Facilitation provided by Directorate of Literacy and Equivalency Education Development for Community Reading Center (CRC) at Collective Learning Halls to improve their management and administration in providing reading materials to their members

2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Improve the management and administration of Community Reading Center at Collective Learning Halls</li> <li>• Improve the infrastructures and facilities of Community Reading Center at Collective Learning Halls to enhance their quality service</li> <li>• Improve the quantity and quality of reading materials based on the community needs</li> </ul>
3.	Target	Community Reading Center at Collective Learning Halls
4.	Requirement	The beneficiaries of the aid are to have and fulfill the following requirements: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legality</li> <li>• Bank account</li> <li>• Tax ID number</li> <li>• Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 75,000,000 per institution for 40 institutions with the total amount of budget IDR 3,000,000,000

#### 16. Learning Facilities for Collective Learning Halls

No	Component	Explanation
1.	Definition	Facilitation provided by Directorate of Literacy and Equivalency Education Development for Collective Learning Halls to improve their management and administration in providing learning and training to the community
2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Improve Collective Learning Halls' management and administration</li> <li>• Improve Collective Learning Halls' infrastructures and facilities to enhance their quality service</li> </ul>
3.	Target	Collective Learning Halls
4.	Requirement	The beneficiaries of the aid are to have and fulfill the following requirements: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legality</li> <li>• Bank account</li> <li>• Tax ID number</li> <li>• Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 125,000,000 per institution for 30 institutions with the total amount of budget IDR 3,750,000,000

## 17. Revitalization of Collective Learning Halls

No	Component	Explanation
1.	Definition	Facilitation provided by Directorate of Literacy and Equivalency Education Development for Collective Learning Halls, functioning as Non-Formal Education Institutions, to improve their management and administration in providing learning and training to the community
2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Improve Collective Learning Halls' management and administration</li> <li>• Improve Collective Learning Halls' infrastructures and facilities to enhance their quality service</li> <li>• Improve the quality of learning and training based on the community needs</li> </ul>
3.	Target	Collective Learning Halls functioning as Non-Formal Education Institutions under Regent/Mayor Decree or Local Government Regulation
4.	Requirement	<p>The beneficiaries of the aid are to have and fulfill the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legality</li> <li>• Bank account</li> <li>• Tax ID number</li> <li>• Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 2,600,000,000 per institution (maximum 9 packages/ institution @IDR 300,000,000) for 2 institutions (186 packages) with the total amount of budget IDR 57,200,000,000

## 18. Assistance for Homeschooling Community

No	Component	Explanation
1.	Definition	Facilitation provided by Directorate of Literacy and Equivalency Education Development for home-schooling association to organize and coordinate the delivery of learning process to the learners

2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Improve the organization management to strengthen home schools' capacity in coordinating the learning process</li> <li>• Improve the organization's administration and delivery of learning</li> <li>• Improve the organization membership system by making application</li> </ul>
3.	Target	Home-schooling community at national, provincial and district/ city levels
4.	Requirement	<p>The beneficiaries of the aid are to have and fulfill the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legality</li> <li>• Bank account</li> <li>• Tax ID number</li> <li>• Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 35,000,000 per institution for 35 institutions with the total amount of budget IDR 1,225,000,000

## 19. Vocational Village

No	Component	Explanation
1.	Definition	Facilitation provided by Directorate of Literacy and Equivalency Education Development for various villages that have potential natural resources and unique products to develop economically toward a developed and prosperous village
2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>• improve the villagers' knowledge, skills and attitudes in managing small businesses independently or in group</li> <li>• foster unity among villagers in decreasing disparity in all aspects of life to improve the village economy</li> <li>• develop the village economy, which in turn will improve the villagers' welfare and prosperity</li> </ul>
3.	Target	20 villages that have economically-promising natural resources and local potentials



4.	Requirement	The beneficiaries of the aid are to have and fulfill the following requirements: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potential business units</li> <li>• Bank account</li> <li>• Tax ID number</li> <li>• Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 200,000,000 per village for 20 villages with the total amount of budget IDR 4,000,000,000

## 20. Literacy Village

No	Component	Explanation
1.	Definition	Facilitation provided by Directorate of Literacy and Equivalency Education Development for various villages with high adult illiteracy rate that have potential natural resources and opportunities to develop economically
2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>• improve the villagers' knowledge, skills and attitudes in all aspect of life</li> <li>• foster unity among villagers in decreasing disparity in all aspects of life to improve the village economy</li> <li>• develop the village economy, which in turn will improve the villagers' welfare and prosperity</li> </ul>
3.	Target	31 villages high adult illiteracy rate but have economically-promising natural resources and local potentials
4.	Requirement	The beneficiaries of the aid are to have and fulfill the following requirements: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potential business units</li> <li>• Bank account</li> <li>• Tax ID number</li> <li>• Recommendation from local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 140,000,000 per village for 31 villages with the total amount of budget IDR 4,340,000,000

## 21. Natural Disaster Response

No	Component	Explanation
1.	Definition	Facilitation provided by Directorate of Literacy and Equivalency Education Development for various areas hit by natural disaster to alleviate the heavy burden faced by the community in a state of emergency
2.	Objective	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alleviate the heavy burden faced by the community in a state of emergency</li> <li>• foster unity and harmony among the survivors to reduce any burden faced by each family</li> </ul>
3.	Target	18 packages of grant, suited with the emergency needs of the community at areas hit by natural disaster
4.	Requirement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• areas hit by natural disaster and require emergency aid/ assistance</li> <li>• the areas should obtain recommendation from the local education office</li> </ul>
5.	Budget Allocation	IDR 100,000,000 per package for 18 packages with the total amount of budget IDR 1,800,000,000

## CHAPTER IV CURRENT BREAKTHROUGHS



**"Furthermore, to prevent relapsing and improve reading culture, literacy programs are synergized with the expansion of access to reading materials".**

### **A. Indonesia Reading Movement (GIM)**

Along with the rapid development in science and technology and changes in all areas of life, the role of literacy and equivalency education in the future would be more vital in preparing and improving education services to fit the needs of society. Science and technology development of a country is determined by the literacy skills of its population, which in the end will lead to improving the people's prosperity.

The key role and function of literacy and equivalency education in improving people's intelligence and welfare will enable them to recognize and understand themselves and their surroundings, and use that understanding to solve various problems in daily life. This kind of ability begins with the ability to "read" and examine or study the phenomena that exist and thrive in the society. The implementation of literacy education programs is expected to create reading habit and interest, and then learning and reading culture. In time, it is expected to create an intellectually, emotionally and spiritually smart society.

Reality shows that the efforts to increase public awareness and interest in reading, especially post-basic literacy learners, often face some constraints in relation to the availability of reading materials and libraries or community reading centers. As a result, many post-basic literacy learners relapse because lack of reading habituation or the unavailability of follow up programs to maintain their literacy skills.



It is important to continue the success of the government and society in improving adult literacy rate through the habituation reading habit and interest.

The objectives of reading culture development program are to:



- encourage the development of reading interest in order to create a knowledge, civilized, developed and independent society.
- foster new literates to preserve and improve their basic reading, writing, and counting ability.
- increase public interest in reading in order to create reading culture.
- Provide learning facilities to encourage lifelong learning society.

Some of the challenges faced in increasing public awareness and interest in reading are as follows:

- Unevenly distributed economic growth makes the society prioritize the needs of clothing, housing, and food rather than reading and studying.
- Today's globalization and competition among countries make Indonesia become consumers of other countries' products, weakening the nation's competitiveness as well as reading and learning development.
- Rapid development of information and communication technology tends to weaken public reading habit and interest.

Reading is the main investment and first entrance to gain science and technology as well as to improve skills and productivity. Yet in reality, compared to neighbor countries (especially developed countries), Indonesian population's reading awareness remains at low level.

The Government continues to encourage people to love learning and reading. Therefore, it is necessary to fulfill a variety of conditions as follows:

- Government policies proactively promoting reading and learning interest.
- Access to broad and equitable Community Reading Centers to provide necessary reading materials.





- c. Quality reading materials based on the needs of the society, as well as easily accessible at bookstores (at an affordable price), libraries and Community Reading Centers.
- d. Family library and reading time to make reading as a tradition in the family.
- e. Quality and fun libraries and Community Reading Centers, supported with good customer service that motivates visitors/costumers to be fond of reading and learning

In order to make the implementation of reading culture development program through the provision of Community Reading Centers achieve optimal results, it is necessary to provide the followings:



1. norms, standards, procedures, and criteria of program implementation
2. capacity building for Community Reading Centers' managers
3. promotions, exhibitions, and competitions that encourage public interest in reading
4. target mapping to discover the strengths, weaknesses, opportunities, and challenges of each Community Reading Center
5. active participation of all institutions/government agencies and private sectors (publishing companies) as well as the community to donate



books to libraries and Community Reading Centers

6. intensive socialization to all stakeholders, especially local governments and formal education and non-formal education personnel, and the community throughout Indonesia on the importance of nurturing and developing reading interest and reading culture.

To realize the aims and objectives mentioned above, since 2015, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development has been conducting several activities under the framework of the Indonesia Reading Movement in five areas, namely: Parigi Moutong Reading Movement, Jayapura Reading Movement, Pasuruan Reading Movement, Karawang Reading Movement, and Jember movement Reading. In 2016, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development will develop reading movement activities in 31 regions in Indonesia.

## B. Marginalized Women Empowerment Movement (GPPM)

Marginalized Women Empowerment Movement (GPPM) is a program focuses on women, especially housewives at young age (between 15-45



years old) who have been marginalized (poor and less educated) in rural areas. The program is intended to improve women's quality of life as housewives, the first and foremost educators in the family, which in time could further raise their awareness in encouraging their children to go to school and get education as high as possible.

Data show that 65% of basic literacy learners are women, and generally at productive age. This is a challenge in preparing a harmonious and prosperous family, since they live in poverty, ignorance, and backwardness. Therefore, women empowerment education programs are packaged in Marginalized Women Empowerment Movement (GPPM) with the practical skills learning and training approaches, suited to the needs of the community, with an emphasis on personal, social and vocational skills.

In 2016, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development will develop affirmative education programs under the umbrella of Marginalized Women Empowerment Movement (GPPM) in some regions, especially rural, coastal and isolated areas.

2. foster women's self-reliance and active participation in decision-making in the family, community and nation.
3. foster women's desire to continue learning and inventing by engaging in learning groups and business.
4. increase women's awareness of their rights as citizens based on an understanding towards human rights, Rights of the Child and Women's Rights, as well as alternative solutions to human rights violations.
5. foster women's positive attitude in facing social differences and solving problems caused by dialogues and discussions.
6. improve women's education and skills, which in turn could improve their family quality of life and the life of the next generation.

The success of Indonesia's development is highly dependent on the quality and active participation of men and women. Although the legislation in Indonesia guarantees equal role between men and women, but women still lag behind in many areas, including education. Women could not



Essentially the empowerment programs that are packed under Marginalized Women Empowerment Movement (GPPM) aim to:

1. improve marginalized women's life skills, so that they have the ability to earn a living by themselves or in groups to reinforce their identity and quality of life for their family.

obtain an optimal opportunity to role, access, control and benefit of education development. This is caused by the development approach that has not considered gender equality, or even has a tendency to perpetuate gender inequality (gender gap). Women education is a transformation of knowledge, experiences, attitudes, behaviors, values, and culture to women in order to sustain life, understand the balance between rights and duties,

enhance dignity and participate in global competitiveness through learning that refers to the 4 (four) pillars of learning from UNESCO: learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together.

To achieve the objectives above, Directorate of Literacy and Equivalency Education will also develop women empowerment programs by: (1) improving the quality of life and the role of women through education to prevent violence against women, trafficking, and sexual exploitation; (2) decreasing the gender gap in education; (3) revising the legislation that shows gender bias and discrimination against women; (4) institutional capacity building and increasing women participation in development; and (5) developing data and information system of women education.

### C. Community Learning Center Accreditation

The quality and institutionalization of Community Learning Center (CLC) as one non-formal education institutions needs to be continuously improved so that it has the ability to organize various literacy and equivalency education programs optimally. In the last ten years, the growth of CLC is encouraging and should be appreciated, because it shows increasing community participation and contribution in organizing non-formal education programs. However, the growth in quantity is not in line with the availability of adequate facilities and infrastructures, causing non-formal education programs seem to be carried out without quality service assurance.

**Table-10**  
**Number of Community Learning Centers**  
(as of December 2015)

No	Province	Number of CLCs	Community Learning Centers		
			Online Registration ID (NILEM)	National Identification Number of Non-Formal Education Unit (NPSN)	Accredited
1	Aceh	323	181	149	-
2	North Sumatera	427	427	395	-
3	West Sumatera	293	232	216	5
4	Riau	221	157	139	1
5	Jambi	183	139	117	1
6	South Sumatera	328	207	202	-
7	Bengkulu	535	307	292	-
8	Lampung	274	247	189	1
9	Bangka Belitung Island	68	68	55	-
10	Riau Island	139	139	131	-
11	Jakarta	300	300	268	8
12	West Java	1.711	1.711	1.575	4
13	Central Java	950	950	779	23
14	Yogyakarta	340	340	297	1
15	East Java	1.320	1.320	1.171	1
16	Banten	293	273	244	5



No	Province	Number of CLCs	Community Learning Centers		
			Online Registration ID (NILEM)	National Identification Number of Non-Formal Education Unit (NPSN)	Accredited
18	West Nusa Tenggara	431	394	361	-
19	East Nusa Tenggara	134	134	88	-
20	West Kalimantan	297	164	116	-
21	Central Kalimantan	143	105	88	-
22	South Kalimantan	185	185	163	1
23	East Kalimantan	183	183	158	3
24	North Kalimantan	63	63	56	-
25	South Sulawesi	126	126	79	-
26	Central Sulawesi	149	86	83	-
27	South Sulawesi	657	479	432	-
28	Southeast Sulawesi	324	192	151	-
29	Gorontalo	117	76	72	-
30	West Sulawesi	370	161	142	-
31	Maluku	61	51	43	-
32	North Maluku	140	56	53	-
33	Papua	263	263	193	-
34	West Papua	60	34	34	-
35	Abroad	1		1	-
Total		11.500	9.841	8.611	55

Recently Directorate of Literacy and Equivalency Education has taken several steps to increase the institutional quality and capacity of Community Learning Centers (CLCs) as follows:

1. Distributing Online Registration ID (NILEM) intensively.
2. Creating data collection application to monitor the profile and existence of each CLC in Indonesia.
3. Creating minimum standards of CLC as a reference for CLC-establishment.
4. Conducting CLC Performance Evaluation.
5. Formulating and developing National Identification Number of Non-Formal Education Unit (NPSN) System in cooperation with Center for Education and Culture Data and Statistics, Ministry of Education and Culture.
6. Based on the National Identification Number of Non-Formal Education Unit (NPSN), a CLC is eligible to undertake Accreditation process.



In accordance with the policy of the Ministry of Education and Culture which handed over the Equivalency Education program development in 2015 from the Directorate General of Primary and Secondary Education to Directorate General of Early Childhood and Community Education (Directorate of Literacy and Equivalency Education Development), Community Learning Center (CLC) as one of non-formal education institutions providing equivalency education has to be accredited. Therefore, in 2016, CLC-accreditation will be carried out by any eligible CLC throughout Indonesia intensively.

## D. Revitalization of Collective Learning Hall (SKB)

Since regional autonomy was regulated at the beginning of the 2000s, Collective Learning Hall (SKB) as Central Technical Implementing Unit (UPT) providing non-formal education programs, was handed over to the District/City Government and its function was switched to Local Technical Implementing Unit (UPTD).



Many Collective Learning Halls (SKB) provide equivalency education program. Based on an observation and evaluation, SKB has been able to organize Equivalency Education program more effective than other institutions/organizations. However, there are many obstacles faced by Collective Learning Halls (SKB) after they became Local Technical Implementing Units (UPTD). In line with its core functions and duties, Collective Learning Hall (SKB) does not have the authority to deliver non-formal education programs, including equivalency education, because of its status as a government office, instead of a non-formal education institution.

Seeing the condition above, in 2016, Directorate of Literacy and Equivalency Education Development are planning to revitalize Collective Learning Halls (SKB). The effort is started by issuing a letter from the Director General of Early Childhood and Community Education dedicated to all Regents/Mayors throughout Indonesia in mid-2015 on the Revitalization Plan. The revitalization policy is not intended to change the nomenclature or withdraw the Collective Learning Halls (SKB) as Central Technical Implementing Units (UPT), but it aims to optimize the function of Collective Learning Halls (SKB) as non-formal education institutions.

**Table-11**  
**Number of Collective Learning Halls (SKB)**  
(as of December 2015)

No	Center Responsible	Province	Number of Local Technical Implementing Units (UPTD) at Provincial Level	Number of Cities/ Districts	Number of Collective Learning Halls (SKB) at City/ District Level	Number of Local Technical Implementing Units (UPTD) at Provincial and City/ District Levels
1	Center for Early Childhood and Community Education Development, North Sumatera	Aceh	1	23	18	19
		North Sumatera	0	33	20	20
		West Sumatera	1	19	20	21
		Riau	1	12	8	9
		Jambi	1	11	9	10
		South Sumatera	1	15	9	10
		Riau Island	0	7	3	3
Total			5	120	87	92
2	Center for Early Childhood and Community Education Development, West Java	Bengkulu	1	10	10	11
		Bangka Belitung Island	0	7	5	5
		Jakarta	1	6	0	1
		West Java	0	26	25	25
		Banten	1	8	6	7
Total			3	57	46	49
3	Center for Early Childhood and Community Education Development, Central Java	Central Java	0	35	41	41
		Lampung	1	14	8	9
		Yogyakarta	1	5	5	6
Total			2	54	54	56
4	Center for Early Childhood and Community Education Development, East Java	East Java	0	38	18	18
		East Nusa Tenggara	1	21	22	23
Total			1	59	40	41



No	Center Responsible	Province	Number of Local Technical Implementing Units (UPTD) at Provincial Level	Number of Cities/ Districts	Number of Collective Learning Halls (SKB) at City/ District Level	Number of Local Technical Implementing Units (UPTD) at Provincial and City/District Levels
5	BP-PAUDNI Reg. III Makassar	Sulawesi Utara	1	15	22	23
		Sulawesi Tengah	1	11	12	13
		Sulawesi Selatan	1	24	24	25
		Sulawesi Tenggara	1	12	16	17
		Gorontalo	1	6	10	11
		Sulawesi Barat	1	5	5	6
Total			6	73	89	95
6	BP-PAUDNI Reg. IV Banjar Baru	Kalimantan Barat	1	14	9	10
		Kalimantan Tengah	1	14	6	7
		Kalimantan Selatan	1	13	13	13
		Kalimantan Timur	1	14	13	14
Total			4	55	41	44
7	BP-PAUDNI Reg. V Mataram	Bali	1	9	8	9
		Nusa Tenggara Barat	1	10	10	11
Total			2	19	18	20
8	BP-PAUDNI Reg. VI Sentani Papua	Maluku	1	11	6	7
		Maluku Utara	1	9	8	9
		Papua Barat	0	11	7	7
		Papua	1	29	13	14
Total			3	60	34	37
Total			26	497	409	434

There are a number of advantages that could be realized by revitalizing Collective Learning Halls (SKB), as follows:

1. Collective Learning Halls (SKB) have clearer institutional status, that is as a non-formal education institution that has the authority to provide non-formal education programs.
2. There a definite funding source for program implementation: the national, provincial, and local district/city budget (fund sharing).
3. The learners enrolling at Collective Learning Halls (SKB) will be recognized by the Ministry of Education and Culture, republic of Indonesia.
4. Officers working at Collective Learning Halls (SKB) will have clear employment status.
5. Collective Learning Halls (SKB) can be directed to be models of non-formal education institutions at city/district levels.

Collective Learning Halls (SKB) legalized by the Regent/Mayor as non-formal education units will have the priority to receive infrastructures and facilities assistance as well as other operational aid from Directorate of Literacy and Equivalency Education Development in 2016.





## CHAPTER V CLOSING



"Non-formal education is a process in which the educational efforts initiated by the government are embodied in an integrated manner with the efforts of local residents to improve the conditions of social, economics, and culture to be useful and empowering."

The Organizational Profile of Directorate of Literacy and Equivalency Education Development has been elaborated briefly with the aim that it could be used by all stakeholders, both at national and regional levels, to know and understand more about the Directorate and literacy and equivalency education programs. This book is expected to be used as a socialization media for the local government and the community, so that literacy and equivalency education programs could indeed be useful and meaningful in improving the quality of life of the community, state and nation.

We are fully aware that there are many things to address and review in this book, as well as in the management and development of educational programs at national and local levels. For this reason, we would highly appreciate suggestions, feedback, and constructive criticism from all parties to improve and develop community education programs in times to come.

For further confirmation and clarification, please contact Directorate of Literacy and Equivalency Education Development, Directorate General of Early Childhood and Community Education, Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia, with the following address: *Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270*, Phone (+6221) 5725575, Fax. (+6221) 5725039, E-mail: [program.paudni@kemdikbud.go.id](mailto:program.paudni@kemdikbud.go.id) or visit our homepage: <http://paudni.kemdiknas.go.id/bindikmas/>.



# REFERENCES

- Badan Pusat Statistik. 2009. Survey Sosial Ekonomi Nasional 2005-2009. Jakarta: BPS*
- Bappenas. 2010. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010. Jakarta: Bappenas*
- Bappenas. 2010. Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia. Jakarta: Bappenas*
- Bokova, Irina. 2010. Address by Irina Bokova, Director-General of UNESCO on the Occasion of the E-9 Ministerial Review Meeting on Education for All. Abuja: UNESCO.*
- Bokova, Irina. 2010. Address by Irina Bokova, Director-General of UNESCO on the Occasion of International Literacy Day September 8, 2010. New York: UNESCO.*
- Kemdiknas. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2009-2014.*
- Kemdiknas. 2010. Pendidikan Keaksaraan: Memberdayakan Masyarakat Marjinal. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.*
- Kemdiknas. 2009. Improving Literacy for All. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.*
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003.*
- Pemerintah Indonesia. 2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009.*
- Pusat Statistik Pendidikan, Kemdiknas. 2010. Data Keniraksaraan Berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kementerian Pendidikan Nasional.*
- Yulaelawati. 2010. Keaksaraan Prasyarat Bagi Semua Orang dalam Jurnal Akrab! Edisi 1 Keaksaraan untuk Semua. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.*
- UNESCO. 2010. Education for All Global Monitoring Report 2010. Oxford University Press.*